

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan



PAHLAWAN NASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA

aan Direktorat
Kebudayaan

0.0598

RUS

D



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1995

920.0598
RUS
P

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

PAHLAWAN NASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA

Oleh :

Rusdi Sufi

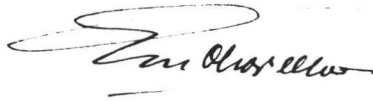
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA

1995

bangsa. Di samping juga akan dapat digunakan sebagai iktisar untuk peningkatan kesadaran sejarah masyarakat terutama generasi muda.

Jakarta, November 1995

**Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. GA. Ohorella', with a horizontal line underneath.

Dra. GA. Ohorella

PENGANTAR

Buku *Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda* merupakan salah satu dari sepuluh buku yang diterbitkan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional dalam tahun ini. Buku ini adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993/1994.

Uraian yang ada di dalam buku ini meliputi riwayat tentang masa kecil Sultan Iskandar Muda dalam lingkungan keluarganya, masa dewasa, perjuangannya menghadapi kaum kolonialis, tindak kepahlawanannya dalam membela bangsanya, serta keteladanan yang telah diperlihatkan. tidak ketinggalan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan serta latar sosial kulturalnya di mana Sultan Iskandar Muda merupakan pimpinan puncak.

Diharapkan uraian di dalam buku ini dapat membangkitkan kebanggaan nasional, membina persatuan dan kesatuan, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa serta melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan generasi penerus bangsa.

Penulisan biografi Pahlawan Nasional Iskandar Muda ini merupakan usaha dan kegiatan pembangunan di bidang kesejarahan yang akan dimanfaatkan bagi pengembangan kepribadian

tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130202962

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Disamping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin menyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya ini dikemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun

PAHLAWAN NASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA

Penulis : Rusdi Sufi

Penyunting : Drs. Zulfikar Ghazali

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Jakarta, 1995

Edisi 1995

Dicetak oleh : **cv. Dwi Jaya Karya**, Jakarta

PENGANTAR

Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini yang kemudian dikenal dengan nama Tanah Air Indonesia, telah melahirkan sejumlah tokoh atau figur yang dalam sejarah tercatat sebagai orang-orang besar.

Salah seorang di antara mereka terdapatlah nama Sultan Iskandar Muda yang memerintah Kerajaan Aceh pada tahun 1607 - 1636. Di bawah pemerintahan Sultan ini Kerajaan Aceh mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam bidang politik ekonomi dan kebudayaan. Salah satu hal yang sangat menonjol yang dilakukan Sultan ini ialah memimpin suatu kegiatan yang teratur dalam menentang agresor Portugis di kawasan Selat Malaka. Di samping juga berjasa dalam bidang politik yaitu menyusun suatu undang-undang/peraturan-peraturan yang mengatur ketatanegaraan kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama **Adat Meukuta Alam**. Sultan Iskandar Muda juga berhasil mengangkat tingkat/derajat kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Aceh pada zamannya, sehingga di bawah pemerintahannya Kerajaan Aceh dapat mencapai puncak kejayaannya.

Rakyat dan pemerintah Republik Indonesia tidak melupakan jasa-jasanya karena itu secara resmi pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1993 telah mengangkat Sultan Iskandar Muda sebagai Pahlawan Nasional.

Penulisan buku tentang Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda ini dimaksudkan untuk membina jiwa pahlawan dan memelihara

semangat patriotisme rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan membangun negara Indonesia serta dapat meneruskan cita-cita pahlawan, sebagaimana yang telah diperbuat oleh Sultan Iskandar Muda.

Kepada semua pihak khususnya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional yang telah memberikan bantuan, sehingga penulisan ini dapat terwujud, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga hasil karya ini dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada semua pihak dalam membangun Negara Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang kita cita-citakan.

Banda Aceh, Desember 1994

Penulis

Drs. Rusdi Sufi

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian dan Penulisan	4
1.3 Metode Penelitian dan Penulisan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Latar Sosio Kultural Kerajaan Aceh	
2.1 Munculnya Kerajaan Aceh dan Perkembangannya	9
2.2 Situasi Umum Kerajaan Aceh Menjelang Pemerintahan Sultan Iskandar Muda	16
Bab III Asal-Usul Sultan Iskandar Muda :	
Masa Kanak-kanak hingga Remaja	32
Bab IV Aktivitas Sultan Iskandar Muda dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama	39
Bab V Akhir Pemerintahan Sultan Iskandar Muda	82
Bab VI Simpulan	86
Daftar Bacaan	90
Lampiran	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Masalah

Perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melahirkan pahlawan-pahlawan Nasional. Pahlawan Nasional adalah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air berjasa memimpin suatu kegiatan yang terutama dalam menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri ataupun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Dengan berpedoman dan berpegang pada hal tersebut, kita sebagai bangsa yang besar harus menghargai para pahlawan. Karena itu secara resmi pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia mengangkat orang-orang yang telah berjasa besar terhadap negara dan bangsa sebagai Pahlawan Nasional. Salah seorang dari mereka ialah Sultan Iskandar Muda, yang memerintah kerajaan Aceh tahun 1607-1636.

Dalam usaha untuk memperkenalkan lebih jauh tentang kisah dan perjuangan Sultan Iskandar Muda yang didalamnya banyak mengandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk diwariskan, maka dianggap perlu melakukan penulisan biografi pahlawan tersebut

secara lebih lengkap dan menyeluruh (komprehensif). Dengan demikian nilai-nilai yang mencerminkan suatu teladan dapat diwariskan untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara.

Dalam karya-karya penulis asing dan penulis Indonesia tentang Sejarah Aceh disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda merupakan yang paling terkenal dalam deretan nama-nama Sultan yang memerintah di Kerajaan Aceh. Di bawah pemerintahan Sultan ini, Kerajaan Aceh dapat mencapai puncak kejayaannya dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan dan sebagainya.¹ Sehubungan dengan kejayaan dan kehebatan kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, T. Braddel menyebutkan bahwa pada masa itu kerajaan Aceh telah mencapai kemajuan besar dalam bidang politik dan ekonomi. Terutama peraturan yang dibuat untuk kepentingan perdagangan bahkan dapat dijadikan contoh bagi beberapa negara Eropa pada waktu itu.² Demikian pula P.J. Veth, menyatakan bahwa kegemilangan kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah yang paling agung yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh.³ Begitu pula T. Iskandar menyebutkan Sultan Iskandar Muda merupakan satu-satunya sultan terbesar yang hidup terus di dalam ingatan orang-orang Aceh.⁴

Dengan maksud untuk mendeskripsikan bagaimana situasi Kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda serta memaparkan kembali beberapa kebijaksanaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan Sultan tersebut, maka penulis mencoba menggambarkan dan menguraikannya dalam karya berupa atau berbentuk biografi, serta bermanfaat bagi peminat-peminat sejarah, khususnya peminat biografi pahlawan Nasional.

Beberapa kebijaksanaan dan tindakan Sultan Iskandar Muda merupakan kelanjutan daripada apa yang telah dilakukan oleh Sultan Aceh sebelumnya. Dengan demikian akan dibahas kebijaksanaan dan tindakan Sultan Aceh sebelumnya, meskipun dalam uraian yang terbatas. Jadi meskipun topik penulisan ini tentang Sultan Iskandar Muda, tetapi penulis juga menyinggung masa-masa sebelum pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Setiap penulis sejarah atau biografi pada umumnya berpangkal pada permasalahan yang terdapat di dalamnya. Ataupun karena ada

hal-hal baru yang belum pernah diungkapkan yang ingin dikemukakan oleh penulis sejarah atau biografi. Selain itu ada juga penulis yang ingin membantah teori atau pendapat lama dengan mengemukakan pendapat baru berdasarkan bukti-bukti baru yang dimilikinya. Begitu pula dengan penulisan ini, meskipun tidak mutlak membantah pendapat-pendapat penulis sebelumnya tentang Sultan Iskandar Muda dan juga tidak seluruhnya mengemukakan hal-hal yang baru tentang Sultan tersebut, akan tetapi penulis mempunyai beberapa permasalahan yang menyangkut sejarah Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Permasalahan yang penulis maksud ialah, tindakan-tindakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan apa saja yang telah dilaksanakan Sultan Iskandar Muda dalam memerintah Kerajaan Aceh? Dan apakah akibat dari kebijaksanaan dan tindakan Sultan tersebut bagi Kerajaan Aceh? Mengapa pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh dapat mencapai puncak kejayaannya dan mengapa pula pada masa-masa akhir pemerintahannya kerajaan Aceh menjadi mundur kembali?

Dalam penulisan biografi ini penulis mencoba menonjolkan peranan dari pada Sultan Iskandar Muda dalam memerintah Kerajaan Aceh. Peranan Sultan (pimpinan pemerintahan) merupakan salah satu faktor penentu bagi perkembangan kerajaan. Pada masanya ialah yang mengatur, menyusun kebijaksanaan dan yang bertindak sesuai dengan situasi pada satu-satunya faktor yang menentukan bagi kejayaan Aceh pada waktu itu. Karena setiap peristiwa atau kejadian pada dasarnya disebabkan bukan oleh satu faktor saja, akan tetapi oleh beberapa faktor, cuma tekanan serta komposisi dari faktor-faktor itu adalah tidak sama pada setiap peristiwa.⁵ Dan dalam hal ini faktor pimpinan ini (Sultan Iskandar Muda) merupakan hal yang paling menonjol dan faktor-faktor lainnya. Sehubungan dengan hal di atas, Edwin R.A. Seligman dalam karyanya *The Economics Interpretation of History*, menyebutkan bahwa ada beberapa faktor atau kondisi yang menyebabkan perkembangan dan kemerosotan dari kehidupan sosial umat manusia. Sebagian disebabkan oleh tindakan di dalam hukum ekonomi (faktor ekonomi), sebagian lagi disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor ekonomi.⁶ Tentunya demikian jugalah

dengan kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ada beberapa faktor atau kondisi yang menjadi kerajaan Aceh berkembang, mencapai kejayaan dan kemudian merosot kembali pada waktu itu.

1.2 Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan utama penelitian dan penulisan biografi pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda ini dimaksudkan agar dengan membaca dan mengetahui tentang biografi Sultan ini, dapat memupuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan kebanggaan Nasional. Selain itu dengan mengetahui biografi Pahlawan Nasional tersebut akan dapat diungkapkan nilai-nilai budaya bangsa serta timbul hasrat-hasrat melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

1.3 Metode Penelitian dan Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan biografi Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda ialah Metode Sejarah Kritis. Metode ini terperinci dalam empat tahap yaitu:

(1) Tahap Pengumpulan Sumber :

Untuk memperoleh sumber-sumber yang berkenaan dengan judul penelitian dan penulisan di atas, penulis menggunakan teknik kepustakaan dan arsip. Sumber-sumber yang berhasil penulis kumpulkan dan kemudian penulis gunakan dalam penyusunan ini, sebagian besar ialah sumber sekunder, yang terdiri dari buku-buku sejarah khususnya yang berhubungan dengan sejarah Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Buku-buku ini ada yang ditulis oleh orang-orang asing dan juga oleh orang-orang Indonesia sendiri. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber-sumber lokal asal Aceh, seperti naskah-naskah lama, manuskrip, mata uang dan juga sumber asing, berupa laporan-laporan perjalanan, yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai sumber primair.

(2) Tahap Kritik Sumber

Pada tahap ini sumber-sumber yang berhubungan dengan pokok bahasan yang telah terkumpul, dilakukan kritik dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran. Dengan demikian keabsahan dan autentisitas dari sumber yang didapatkan itu dapat dipercayai; sehingga dapat digunakan untuk penyusunan/penulisan biografi ini.

(3) Tahap Interpretasi Terhadap Fakta-fakta

Setelah dilakukan kritik sumber, penulis selanjutnya menginterpretasi terhadap fakta-fakta yang didapatkan dari sumber-sumber itu.

(4) Tahap penulisan.

Pada tahap ini fakta-fakta yang telah diinterpretasikan itu dirangkaikan sesuai dengan keperluan penulisan/historiografi.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dilaporkan dengan sistematika penulisan-nya diperinci dalam VI bab. Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini diutarakan tentang latar belakang masalah; Tujuan Penelitian dan Penulisan; Metode Penelitian dan Penulisan yang digunakan dan Sistematika Penulisan atau Organisasi Laporan.

Bab II, Latar Belakang Masalah sosial - Kultural, berisi tentang latar belakang munculnya kerajaan Aceh dan perkembangannya serta situasi Kerajaan Aceh menjelang pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Bab III, Asal usul Sultan Iskandar Muda. Dalam bab ini diutarakan tentang kelahiran Sultan Iskandar Muda, latar belakang keturunannya, perkembangan hingga dengan masa remaja Sultan Iskandar Muda, serta gambaran umum Kerajaan Aceh waktu Sultan Iskandar Muda naik tahta. Bab IV. Aktivitas dan Perjuangan Sultan Iskandar Muda dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan agama. Bab V, Akhir kehidupan Sultan Iskandar Muda, di sini dipaparkan tentang penyebab kemangkatannya Sultan Iskandar Muda serta penggantian.

Bab VI. Kesimpulan. Pada bagian ini diberikan beberapa konklusi tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan Sultan Iskandar Muda.

CATATAN

- 1) Karya-karya yang relatif baik membicarakan tentang kehebatan Sultan Iskandar Muda, dapat dilihat misalnya, laporan Perjalanan Augustin de Beaulieu dalam Julius Jacobs; *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh*. (Leiden, E. J. Brill, 1894) hal. R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critich Overzicht van de het Soeltanaat van Atjeh," *Bijdragen tot de taal, land-en volkenkunde van Nerderlandsch-Indie* (Selanjutnya disingkat *BKI* 65 (1911), hal. 135-265; T. Iskandar, "De Hikajat Atjeh", *Verhandelingen van Het koninklijk Institut*. Selanjutnya disingkat *VKI*, 26 (1958); Nuruddin Ar-Raniry, *Bustanus Salatin*, disusun T. Iskandar, (Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1966), Arun Kumar Das Gupta, "Atjeh in Indonesian Trade and Politics; 1600-1641, "Unpublished Ph. D. Thesis, Cornell University 1962. Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) Terjemahan Winarsih Arifin. Mohammad Said, *Atjeh Sepandang Abad*. (Medan: Pengarang sendiri, 1961). T. Braddel, "On the History of Acheen," *The Journal of Indian Archifelago and Eastern Asia*, selanjutnya disingkat *YIAEA*, vol. V. Singapore, (1851).
- 2) Lihat T. Braddel, "*On the History of Acheen*" *YIAEA* vol. V, Singapore: 1857) hal. 19.
- 3) P. J. Veth, *Atchin en Zjine Betrekkingen tot Nederland*. (Leiden: Gerath Kolff, 1887), hal. 73.

- 4) T. Iskandar, "*De Hikajat Atjeh*," VKI 26, (1958), hal. 49.
- 5) Taufik Abdullah, *Sejarawan dan Kesadaran Sejarah*, (Djakarta: LEKNAS, LIPI, 1974, hal. 22.
- 6) Edwin R.A. Seligman, *The Economic Interpretation of History*, (New York and London): Columbia University Press, (1961), hal. 156.

BAB II

LATAR SOSIO KULTURAL KERAJAAN ACEH

2.1 Munculnya Kerajaan Aceh dan Perkembangannya

Yang disebut Aceh ialah daerah yang sekarang dinamakan Daerah Istimewa Aceh. Pada masa Aceh masih sebagai kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh ialah yang sekarang dikenal dengan yang namanya Kabupaten Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Untuk nama *Aceh Rayeuk*, ada juga orang yang menyebutnya dengan nama *Aceh lhee sago* (Aceh tiga sagi). Selain itu ada juga yang menyebutkan dengan nama *Aceh Inti*¹ (*Aceh proper*), atau Aceh sebenarnya. Menurut G.P. Tolson, *Aceh Rayeuk* disebut Aceh sebenarnya, karena daerah itulah para mulanya yang menjadi inti kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibukota kerajaan.² Nama Aceh juga sering digunakan oleh orang-orang Aceh untuk menyebutkan ibukota Kerajaannya, yakni yang bernama Bandar Aceh atau secara lengkapnya *Bandar Aceh Dar As-Salam*.³

Tentang nama Aceh belum ada kepastian dari mana asalnya dan kapan istilah Aceh itu mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutkannya dengan nama yang berbeda-beda. Orang-orang Portugis menyebut Achen atau Achen, orang Arab menyebut Asyi, orang Belanda menyebutnya Acheen atau Acin, orang Inggris menyebutnya Achin, orang Perancis mengatakan Achen atau Acheh, sedang orang-orang Aceh sendiri

menyebutnya Aceh. Di dalam tulisan-tulisan Melayu pada salah satu jenis mata uang Aceh lama yang disebut *keuh* (mata uang yang dibuat dari timah) juga menyebut dengan istilah Aceh.

Aceh terletak di ujung sebelah utara pulau Sumatera, merupakan bahagian yang paling utara dan paling barat dari kepulauan Indonesia. Di sebelah baratnya terbentang lautan Hindia, sedang di sebelah utara dan timurnya terletak Selat Malaka. Sudah semenjak zaman kuno Selat Malaka merupakan jalan perniagaan yang ramai, yang banyak dilalui kapal dagang dari berbagai negeri di Asia, terutama dari India, Indonesia dan dari Tiongkok.⁴ Tempat-tempat di sepanjang perairan Selat Mala, silih berganti-ganti menempati kedudukan sebagai pelabuhan tempat mengambil perbekalan bagi kapal-kapal yang lewat di sana. Salah satu yang terkenal ialah Malaka.

Selama beberapa abad Malaka telah terkenal sebagai pusat perdagangan tiga jurusan antara negeri India, Cina dan negeri-negeri Asia Tenggara. Pelabuhannya banyak disinggahi kapal-kapal dari berbagai negeri yang membawa barang-barang dagangan dari India, Timur Tengah, Eropa, Cina, dan negeri-negeri di Asia Tenggara. Selain itu Malaka pada waktu itu juga berfungsi sebagai pusat penyebarang Agama Islam yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam yang berasal dari negeri-negeri di Timur Tengah dan dari Gujarat. Pada tahun 1511 Malaka direbut oleh bangsa Portugis dari Sultan Malaka.⁵ Pada mula-mulanya orang-orang Portugis ingin menghancurkan perdagangan saudagar-saudagar Islam yang biasa berdagang di sana sehingga menimbulkan kegoncangan dalam jaringan perdagangan di Selat Malaka, terutama di kalangan pedagang-pedagang Islam. Salah satu akibatnya ialah pedagang Islam yang biasa berdagang di Malaka menyingkir dari sana ke tempat-tempat lain. Kebanyakan dari mereka datang ke Aceh.

Dengan berdatangannya pedagang-pedagang Islam ke Aceh, maka Aceh menjadi ramai dan mulai berkembang sebagai tempat berdagang. Sebelumnya, atau pada saat orang-orang Portugis mula-mula muncul di perairan sekitar Selat Malaka dan kemudian berhasil menduduki Malaka, Aceh masih merupakan sebuah kerajaan kecil yang tunduk kepada kerajaan tetangganya Pedir.⁶ Menurut catatan

R.A. Hoesien Djajadiningrat, pendiri kesultanan Aceh pertama kali ialah Sultan Ali Mughayat Syah pada sekitar tahun 1514.⁷ Seperti yang telah disinggung di atas dengan didudukinya Malaka oleh bangsa Portugis yang menyebabkan banyak saudagar Islam datang ke Aceh, maka kerajaan Aceh mulai berkembang sebagai tempat perdagangan. Oleh saudagar-saudagar Islam, Aceh digunakan sebagai pengganti Malaka untuk tempat berdagang dan tempat untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini tidak disia-siakan oleh Sultan Aceh untuk memanfaatkan kesempatan guna membina kerajaan agar benar-benar dapat menjadi pusat perdagangan sebagai pengganti Malaka yang telah diduduki oleh Portugis.

Tindakan pertama Sultan Ali Mughayat Syah ialah membebaskan diri dari kekuasaan Pedir dan kemudian menyatukan kerajaan-kerajaan pelabuhan sekitarnya di bawah kekuasaan Aceh. Berturut-turut ditaklukkannya kerajaan Daya, Pedir dan kerajaan Pase (Samudera). Dengan demikian di bawah Sultan ini kekuasaan Aceh mulai tumbuh menjadi besar.⁸ Ketika menaklukan kerajaan Pedir, untuk pertama kali Aceh telah terlibat dalam peperangan melawan orang-orang Portugis, yang rupa-rupanya sengaja datang ke sana untuk membantu Pedir dari serangan Aceh. Pedir dan orang-orang Portugis ini tidak berdaya menahan serangan pihak Aceh. Orang-orang Portugis yang selamat dari peperangan itu terpaksa mengundurkan diri kembali ke Malaka dan kerajaan Pedir tunduk kepada Aceh.

Sesudah dapat mempersatukan kerajaan-kerajaan pelabuhan sekitarnya, yakni Daya, Pedir dan Pane, maka kerajaan Aceh dapatlah meningkatkan kegiatan perdagangan dengan memusatkannya di pelabuhan Aceh, yang sebelumnya telah terbagi-bagi atas kerajaan-kerajaan pelabuhan di sekitarnya.⁹ Dengan tindakan-tindakan itu J. Kreemer menyebutkan bahwa di bawah Sultannya yang pertama (Ali Mughayat Syah), kerajaan Aceh benar-benar telah mendapatkan seorang pimpinan tangguh yang berhasil meletakkan dasar bagi perkembangan kerajaan Aceh untuk pertama kali.¹⁰

Sultan lain yang besar jasanya dalam membina kerajaan Aceh ialah Sultan Alaudin Riayat Syah atau lebih terkenal setelah beliau wafat dengan panggilan al-Kahhar. Ia memerintah sejak tahun

1537-1571. Sultan ini bercita-cita untuk menguasai perdagangan di kawasan perairan Selat Malaka dan ingin memperluas pengaruhnya atas daerah-daerah yang menghasilkan lada, kapur barus, emas kemenyan dan barang-barang dagangan lainnya di pesisir pantai barat dan pantai timur pulau Sumatera. Tujuannya agar dapat memonopoli perdagangan di sana, terutama perdagangan lada.

Di bawah Sultan Al Kahhar kerajaan Aceh mulai melakukan ekspansi teretorial, terutama ke daerah pesisir pantai barat Sumatera. Di sana Aceh berhasil menguasai beberapa kota pelabuhan penyalur lada dan hasil-hasil bumi berharga lainnya. Di antara kota-kota itu ialah Singkel, Barus, Passaman, Tiku, Pariaman dan Padang. Di kota-kota itu Sultan al Kahhar menempatkan wakil-wakilnya dalam rangka untuk memudahkan pengawasan atau perdagangan di sana. Dengan dikuasainya kota-kota pelabuhan penting di pesisir barat Sumatera, maka kapal-kapal dagang Aceh banyak yang berlayar ke sana dan ada juga yang meneruskan ke pelayarannya ke pulau Jawa. Kapal-kapal Aceh ini sengaja melewati pesisir pantai barat Sumatera dan tidak melalui pesisir timur Sumatera (Selat Malaka), karena mereka berusaha menghindari orang-orang Portugis yang berada di sana.¹¹

Ketika melakukan ekspansi ke pantai bagian timur Sumatera (kerajaan Aru/Deli), kerajaan Aceh berhadapan lagi dengan pihak Portugis yang rupa-rupanya juga menginginkan hal yang serupa dengan Aceh, yakni ingin mendapatkan monopoli perdagangan di sana.¹² Dalam hal ini Sultan Al Kahhar maklum, bahwa kedudukan Portugis di Malaka dianggap sebagai penghalang untuk mencapai cita-citanya. Maka Sultan Aceh ini juga berhasrat untuk mengusir Portugis dari Malaka. Untuk merealisasikan maksudnya Sultan Al Kahhar memperkuat angkatan perang Aceh, terutama armada lautnya. Salah satu cara ialah mengadakan hubungan dengan kerajaan Islam yang terbesar pada waktu itu, yaitu kerajaan Turki. Tujuannya ialah untuk mendapatkan bantuan militer.

Pada tahun 1563, Sultan Aceh mengirimkan suatu utusan ke kerajaan Turki. Utusan tersebut membawa serta hadiah-hadiah berharga dari Sultan Al Kahhar untuk dipersembahkan kepada penguasa kerajaan Turki. Hadiah-hadiah itu ialah berupa emas,

rempah-rempah dan lada.¹³ Selain Pemberian hadiah para utusan Aceh juga telah meyakinkan pihak Turki mengenai suatu keuntungan yang akan didapat pihak Turki dari perdagangan rempah-rempah dan lada Indonesia, bilamana orang-orang Portugis telah dapat diusir dari Malaka oleh Aceh dengan bantuan Turki.¹⁴ Perutusan Aceh ini dapat dikatakan berhasil, karena pihak Turki telah bersedia mengirimkan bantuan kepada Aceh, berupa dua kapal dan 500 orang tenaga berbangsa Turki. Di antara ke 500 orang Turki itu juga ahli-ahli militer yang dapat membuat kapal perang dan meriam-meriam besar. Selain itu pihak Turki juga memberikan sejumlah meriam berat beserta perlengkapan-perengkapan militer lainnya kepada Aceh. Semuanya itu tiba di pelabuhan Aceh pada tahun 1566/1567.¹⁵

Di samping bantuan militer yang diperoleh dari Turki Sultan Kahhar juga berusaha untuk mendapatkan bantuan dari beberapa pemimpin kerajaan di Indonesia dan India, tetapi dia hanya mendapat sekedar bantuan yang terbatas dari pimpinan Kalikut dan Jepara.¹⁶ Selain itu Sultan Al Kahhar juga menggunakan tentara-tentara sewaan, yang terdiri dari selain orang Turki juga dari orang-orang Gujarat, Malabar dan Abbessinia.¹⁷ Serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka, berulang kali dilakukan oleh Sultan Kahhar. Yang pertama pada tahun 1537 dan yang terakhir pada tahun 1568. Pada penyerangan yang terakhir itu, Aceh telah menggunakan kekuatan yang terdiri dari 15.000 orang Aceh, 400 orang tentara Turki, disertai pula dengan 200 buah meriam besar dan kecil.¹⁸ Meskipun demikian serangan-serangan yang dilakukan Aceh tersebut tidak berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Malaka.

Seperti telah disinggung di atas, selain melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Portugis, Sultan al Kahhar juga melakukan ekspansi ke daerah pantai timur dan pantai barat pulau Sumatera. Pada tahun 1539, kerajaan Aru yang sering berhubungan dengan Portugis di pantai timur pulau Sumatera ditaklukkannya. Anak al Kahhar yang beranam Abdullah didudukkan sebagai Sultan di sana.¹⁹ Ekspansi ke pantai bagian barat Sumatera, terutama ditujukan ke pantai bagian barat Sumatera, terutama ditujukan ke

daerah-daerah atau pelabuhan yang menghasilkan lada dan hasil-hasil bumi lainnya yang menarik pedagang-pedagang asing. Semenanjung tanah Melayu juga menjadi sasaran penaklukannya. Kerajaan Johor sebagai salah satu kerajaan yang berpengaruh di sana sampai seberapa kali menjadi serangan pihak Aceh. Alasannya karena Johor sering memberikan bantuan atau bekerjasama dengan pihak Portugis. Hal inilah yang menjadikan salah satu sebab mengapa kerajaan Aceh bermusuhan terus menerus dengan kerajaan Johor.²⁰

Suatu kemajuan pula yang perlu disebut di sini ialah bahwa pada masa Sultan al Kahhar kerajaan Aceh telah dapat mengeluarkan susunan mata uang sendiri. Mata uang itu dibuat dari emas dan dari timah. Yang dari emas disebut *Derham* dan yang dari timah disebut *Keuh*. Nama *Derham* ini ditiru oleh orang-orang Aceh dari nama susunan mata uang orang-orang Arab.²¹ Menurut D.H. Burger, kerajaan yang dapat mengeluarkan mata uang dari emas sendiri pada waktu itu, merupakan tanda adanya kemakmuran dan adanya perdagangan penting dalam kerajaan itu.²² Menurut cerita-cerita lama di Aceh, salah satu peninggalan pula yang berasal dari zaman Sultan Alaudin Riayat Syah al Kahhar ialah penggolongan rakyat Aceh dalam Suke-suke (suku-suku) yang di Aceh disebut pula dengan nama *Kawom*.²³

Antara Sultan Alaudin Riayat Syah al Kahhar (1537-1571) sampai pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah al Mukammil (1588-1604), ada beberapa Sultan yang memerintah di Aceh. Pembinaan mengenai Sultan-Sultan yang memerintah pada periode itu dilewatkan saja, mengingat tindakan-tindakan mereka tidak begitu berpengaruh bagi perkembangan kerajaan Aceh. Sultan yang selanjutnya yang terkenal ialah Sultan Alaudin Riayat Syah atau sesudah meninggalnya lebih terkenal dengan nama Marhum Sayid al Mukammil. Usaha yang dilakukan pertama kali oleh Sultan ini ialah menciptakan suatu suasana aman di kerajaan Aceh. Hal ini disebabkan karena adanya pertikaian-pertikaian dan kekalutan di kerajaan Aceh sebagai akibat perebutan kekuasaan semenjak meninggalnya sultan al Kahhar.

Namun ketika Aceh di bawah Sultan al Mukammil berbeda dengan sikap sultan-sultan Aceh sebelumnya khususnya sikap

terhadap orang-orang Portugis di Malaka. Sultan ini telah mencoba mengadakan suatu kontak untuk berdamai dengan pihak Portugis di Malaka. Rupa-rupanya usaha Sultan al Mukamil ini mendapat sambutan baik dari pihak Portugis di Malaka, sehingga terjadi situasi damai antara pihak Aceh dan pihak Portugis, yang belum pernah terjadi dengan Sultan-Sultan Aceh lain sebelumnya. Mengenai sebab-sebab mengapa Aceh dan Portugis mau menjalin suatu hubungan yang baik, C.R. Boxer menyebutkan bahwa perubahan sikap dari kedua belah pihak yang saling bertentangan itu, sebenarnya adalah disebabkan karena kejemuan pada kedua belah pihak, yang terus menerus telah melibatkan diri dalam perselisihan-perselisihan dan peperangan-peperangan.²⁴ Portugis ingin memanfaatkan masa damai tersebut untuk beristirahat dan untuk menyiapkan suatu serangan secara besar-besaran terhadap Aceh. Tetapi dari perkembangan situasi selanjutnya pihak Portugis telah merubah maksudnya itu. Mereka rupa-rupanya tetap ingin memelihara suatu persahabatan dengan kerajaan Aceh.²⁵ Hal ini disebabkan karena ada maksud lain dari pihak Portugis, yakni keinginan mereka untuk mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan Aceh, agar daripadanya dapat diperoleh keuntungan bagi pihaknya.

Mula hubungan baik antara kerajaan Aceh dengan Portugis di Malaka dirintis ketika Sultan Aceh (Sayid Mukammil) mengirimkan seorang utusan ke Malaka. Utusan Aceh itu membawa serta hadiah-hadiah berharga untuk dipersembahkan kepada penguasa Malaka yang pada waktu itu dipegang oleh D. Paulo de Lima.²⁶ Tujuan utusan Aceh tersebut ialah untuk mengucapkan selamat kepada Portugis yang telah berhasil mengadakan penghancuran atas kerajaan Johor, yang rupa-rupanya juga bermusuhan dengan Kerajaan Aceh. Selain itu Aceh juga meminta kepada Portugis agar seorang Wanita Aceh yang berpangkat, yang sedang ditahan oleh Portugis pada salah satu perahu yang sedang menuju Malaka, supaya dibebaskan. D. Paulo de Lima mengabulkan permintaan Aceh dan juga mengadakan suatu perjanjian damai dengan utusan Aceh tersebut.²⁷ Sejak adanya perdamaian tersebut maka pihak Aceh tidak lagi menyerang kapal-kapal Portugis yang lewat di perairan Aceh dan Selat Malaka, yang sebelumnya sering mereka lakukan. Kemudian kepada orang-orang Portugis oleh Sultan Aceh juga diberi

kebebasan untuk datang dan berdagang di ibukota kerajaan Aceh. Dan ini merupakan suatu keuntungan pula bagi kerajaan Aceh, karena perdagangan hasil-hasil buminya, terutama lada menjadi bertambah ramai.

2.2 Situasi Umum Kerajaan Aceh Menjelang Pemerintahan Sultan Iskandar Muda

Pada tanggal 21 Juni 1599 dua kapal bangsa Belanda di bawah pimpinan Cornelis De Houtman untuk pertama kali tiba di pelabuhan ibukota kerajaan Aceh. Pada mulanya kedatangan mereka ini mendapat sambutan baik dari Sultan Aceh (Sultan Alaudin Riayat al Mukammil), karena dengan adanya pedagang-pedagang Belanda di Aceh, pasaran hasil-hasil bumi Aceh khususnya lada menjadi bertambah ramai.

Pedagang-pedagang Belanda oleh Sultan Aceh diberi kesempatan untuk membeli sejumlah lada.²⁸ Pedagang-pedagang Portugis yang pada waktu itu telah berada di Aceh, tidak senang melihat kehadiran pedagang-pedagang Belanda untuk ikut berdagang di sana. Mereka yang dekat dengan kalangan Istana Aceh mengadakan hasutan kepada Sultan Aceh. Akibatnya pedagang-pedagang Belanda yang berada dalam kapal-kapalnya di pelabuhan mendapat serangan dengan tiba-tiba dari tentara Aceh. Cornelis de Houtman yang memimpin mereka,, mati terbunuh dan saudaranya yang bernama Frederick de Haoutman dapat ditawan oleh tentara Aceh.²⁹ Ia berada di dalam penjara kerajaan Aceh selama 2 tahun. Selama dalam masa itu ia telah sempat menyusun sebuah kamus Melayu-Belanda.³⁰

Sebelum menguraikan kelanjutan hubungan antara pedagang-pedagang Belanda dan kemudian pedagang-pedagang Inggris dengan kerajaan Aceh, terlebih dahulu akan diuraikan sebatas mengenai situasi umum kerajaan Aceh pada masa menjelang pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Semenjak membaiknya hubungan antara kerajaan Aceh dengan orang-orang Portugis seperti telah disinggung di atas, maka kerajaan Aceh dapat dengan leluasa meningkatkan perdagangan ladanya. Pada waktu itu menurut tak-

siran orang-orang Portugis yang berada disana, kerajaan Aceh telah mengekspor lada sebanyak 1500 *Bares* tiap tahunnya.³¹

Hasil-hasil kerajaan Aceh yang utama ialah beras, daging, ikan dan buah-buahan dan binatang ternak, tetapi hasil-hasil ini sama sekali tidak menarik perhatian pedagang-pedagang asing yang datang ke sana. Yang menarik mereka ialah lada, timah, emas, sutera, minyak, kapur barus, kemenyan, gading, pinang dan gajah. Selain itu di Aceh juga didapatkan barang-barang yang didatangkan dari luar seperti rempah-rempah, pakian dari India dan porselin dari Cina. Dari segala hasil seperti yang telah disebutkan di atas adalah yang merupakan barang dagangan utama kerajaan Aceh. Pohon-pohon lada di Aceh tumbuh sedemikian banyaknya, sehingga tiap tahunnya kerajaan Aceh mampu untuk memuat hasil lada ini pada 20 buah kapal dagang menurut ukuran pada masa itu. Mungkin hal ini akan menjadi lebih banyak lagi bilamana kerajaan Aceh dapat merawat perkebunan ladanya secara lebih baik.³²

Seperti telah disebutkan, ibukota kerajaan Aceh bernama *Bandar Aceh dar as Salam*, yang juga merupakan pelabuhan utama dari kerajaannya. Di sini terdapat sejumlah besar pedagang-pedagang yang terdiri dari bermacam-macam bangsa. Di antaranya terdapat pedagang-pedagang Cina, Portugis, Gujarat, Arab, Benggala dan Pegu.³³ Pedagang-pedagang ini mendiami tempat-tempat tertentu yang letaknya terpisah-pisah di dalam kota. Mereka tinggal berkelompok-kelompok sesuai dengan negeri asal mereka. Para pedagang ini mendapat sambutan baik di Aceh baik dari Sultan sendiri maupun dari pejabat-pejabat kerajaan Aceh lainnya. Mereka pada umumnya senang berdagang di ibukota kerajaan Aceh, karena pajak-pajak atau bea-bea yang harus mereka bayar, mereka anggap masih terlalu murah dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang pernah mereka datangi pada waktu itu.³⁴

Pelabuhan-pelabuhan di kerajaan Aceh ramai didatangi oleh Pedagang dari luar, antara lain dari Cina, Benggala, Pegu, Jawa, Gujarat, Arab dan dari Rumos. Pedagang-pedagang ini merupakan pedagang keliling. Mereka berdagang dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya di Asia Tenggara, dengan membawa barang-barang dagangan dari daerahnya atau mereka ambil dari daerah lain dan kemudian

memperdagangkannya ke pelabuhan-pelabuhan lain pula. Pada saat rombongan pedagang dari Inggris di bawah pimpinan James Lancaster tiba di pelabuhan Aceh untuk pertama kali, mereka menjumpai 16 sampai 18 buah kapal dari bermacam-macam negeri yang berada di sana. Beberapa dari Benggala, yang lainnya dari Kalikut, Malabar, Gujarat, Pegu dan Patani.³⁵

Semua kegiatan di kerajaan Aceh dipusatkan di ibukota kerajaan, sehingga kota *Bandar Aceh Dar as Salam* menjadi ramai melebihi semua kota pelabuhan lainnya di pantai bagian timur dan barat pulau Sumatera. Di bagian timur pantai Sumatera terdapat pelabuhan-pelabuhan Pedir, Pase dan Aru (Deli). Di sebelah barat terdapat pelabuhan-pelabuhan Daya, Singkel, Barus, Passaman, Tiku, Parimaman dan Selebar. Semua pelabuhan ini tunduk kepada kerajaan Aceh, khususnya dalam bidang perdagangan, kecuali kerajaan Aru yang telah berhasil melepaskan diri dari pengawasan Aceh dengan bantuan kerajaan Johor. Hal ini disebabkan karena kerajaan Aceh pada waktu itu berada dalam keadaan lemah.³⁶ Kerajaan-kerajaan takluk ini memberi upeti kepada Sultan Aceh. Pada kota-kota pelabuhan, lada milik kerajaan dijual oleh Sultan Aceh atau oleh para pejabatnya, seperti orang kaya dan Syahbandar. Selain itu juga ada lada yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang asing seperti pedagang dari Gujarat, Arab dan Cina. Rakyat biasa ada juga yang ikut ambil bagian dalam perdagangan lada ini, tetapi lada-lada yang mereka perdagangkan adalah kepunyaan majikan mereka.³⁷

Kerajaan Aceh ketika datangnya pedagang-pedagang Belanda dan Inggris, diperintah oleh seorang Sultan dengan bantuan 5 orang pembesar yang terkemuka, yaitu Bendahara dan empat orang Syahbandar.³⁸ Bendahara ini berfungsi sebagai penulis atau sekretaris kerajaan. John Davis dalam laporan perjalanannya menyebutkan Bendahara ini sebagai "penulis rahasia" dari kerajaan Aceh.³⁹ Para Syahbandar di kerajaan Aceh berfungsi sebagai pembantu Sultan dalam mengurus dan mengepalai perdagangan di kota-kota pelabuhan. Sultan merupakan penguasa mutlak dan sebagai majikan atas barang-barang milik bawahan-bawahannya.⁴⁰ John Davis juga menyebutkan bahwa Sultan Aceh mempunyai hak menghukum

orang-orang yang bersalah dengan macam-macam bentuk hukuman, antara lain ialah hukuman memotong tangan dan kaki seseorang, menghukum membuang seseorang ke sebuah pulau yang bernama pulau Weh, menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang dengan menyuruh menginjakkannya oleh seekor gajah dan menjatuhkan hukuman penjara.⁴¹ Kerajaan Aceh pada masa itu mempunyai perlengkapan armada laut yang terdiri dari 100 buah kapal perang. Tiap kapal dapat memuat 400-500 orang penumpang. Salah seorang yang memimpin armada laut adalah laksamananya adalah seorang wanita.⁴² Sultan Aceh juga mempunyai banyak meriam besar yang dibuat dari baja dan sepasukan angkatan laut yang terdiri dari barisan-barisan gajah.⁴³

Sebagian besar mata pencaharian rakyat Aceh pada waktu itu adalah berdagang dan bercocok tanam. Hasil pertanian utama adalah beras dan lada. Beras digunakan untuk konsumsi sendiri sebagai bahan makanan pokok, sedangkan lada untuk diperdagangkan kepada pedagang-pedagang asing. Ada juga rakyat yang bekerja sebagai ahli-ahli pertukangan, seperti emas, tukang periok, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang tenun dan pembuat berbagai rupa minuman keras dan beras.⁴⁴

Dalam hal mata uang, kerajaan Aceh pada waktu itu telah mengalami beberapa mata uang. Di antara mata uang yang beredar di kerajaan Aceh adalah *Derham*, *Keuh*, *Kupang*, *Pardu* dan *Tahil*. John Davis dalam laporan perjalanan ke Aceh menyebutkan ada 2 jenis mata uang utama yang beredar di kerajaan Aceh, yaitu mata uang emas yang bentuknya sebesar uang sen di Inggris dan mata uang dari timah yang disebut *Cashes* (*keuh*). Nilai 1600 *Cashes* sama dengan 1 uang emas. 400 *Cashes* adalah 1 *Kupang*, 4 *Kupang* 1 uang emas. 5 buah emas sama dengan 4 Schelling/SIC/Inggris, 1 uang emas sama dengan 1 *Pardu* sama dengan 1 *Tahil*.⁴⁵ Jual beli di kerajaan Aceh di daerah-daerah takluknya dilakukan dengan suatu takaran yang disebut *bahar*. Satu *bahar* bertanya sama dengan 360 *Pound* di Inggris, atau $\pm$ 170 kg. Harga lada per *bahar* pada waktu itu adalah 35 *Gulden* Belanda, atau 8 *tahil* mata uang Aceh. *Paound* Inggris di Aceh dinamakan *Kati* dan ini beratnya sama dengan 21 ons Inggris.⁴⁶

Tidak berapa lama sejak peristiwa de Haoutman di Aceh, seperti telah disinggung di atas, pedagang Belanda lainnya yaitu Paulus Van Caerden dengan memimpin dua buah kapal, setelah menyusuri pelabuhan-pelabuhan di pantai Barat Sumatera, tiba dipantai Aceh pada 21 Nopember 1600.⁴⁷ Di sana ia dan anak buah kapalnya telah bertindak ceroboh, yakni telah menenggelamkan sebuah kapal dagang Aceh dengan terlebih dahulu memindahkan segala muatan lada dari kapal itu ke dalam kapalnya dan kemudian pergi begitu saja meninggalkan pantai Aceh. Tidak lama sesudah peristiwa di atas, datang lagi rombongan kapal Belanda lainnya di bawah pimpinan Laksamana Jacob van Neck ke Aceh. Mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Paulus van Caerden sebelumnya terhadap sebuah kapal Aceh, bahwa mereka adalah pedagang bangsa Belanda datang ke Aceh untuk mengadakan perdagangan dan membeli lada. Ketika Sultan mengetahui bahwa mereka adalah pedagang-pedagang Belanda, maka mereka ditawan dan diperlakukan secara tidak baik. Kepada mereka diberitahukan bahwa dua buah kapal dari bangsa mereka sebelumnya telah datang ke Aceh dan telah melarikan diri setelah menenggelamkan sebuah kapal dagang Aceh dan membawa serta sejumlah lada tanpa dibayarnya. Menurut Sultan sebagai ganti rugi, Sultan telah memutuskan untuk menawan setiap orang Belanda yang datang dan yang berada di Aceh.⁴⁸

Menjelang tahun 1602, pedagang-pedagang bangsa Belanda di bawah pimpinan Gerard de Roy dan Laurens Bicker dengan beberapa kapal tiba di pelabuhan Aceh. Mereka sengaja datang ke Aceh atas perintah Pangeran Maurits dari negeri Belanda dengan tujuan untuk menjalin suatu persahabatan dengan kerajaan Aceh. Bersama mereka kirimkan pula hadiah-hadiah dan sepucuk surat untuk dipersembahkan kepada Sultan Aceh. Isi surat tersebut secara garis besarnya adalah, bahwa pangeran Maurits mengakui betapa baik sambutan yang telah diberikan Sultan Aceh kepada para pedagang bangsa Belanda ketika mereka pertama kali tiba di pelabuhan Aceh. Adanya hasutan-hasutan pihak Portugis tentang pada pedagang Belanda di Aceh, dan memohon agar Sultan membebaskan kembali orang-orang Belanda yang sedang ditawan di Aceh.⁴⁹

Laurens Bicker sebagai salah seorang pimpinan rombongan telah mengemukakan pula rasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Paulus van Caesar dan kawan-kawannya atas kapal dagang Aceh. Dia menjanjikan kepada Sultan Aceh akan menuntut kompeni dagang Van Caender karena tindakan-tindakannya itu, sesudah dia sampai kembali ke negeri Belanda. Janji Laurens Bicker rupa-rupanya benar-benar ditepati sesudah ia sampai di negerinya. Karena kemudian sebuah mahkamah di Amsterdam telah menjatuhkan hukuman denda atas kongsi dagang van Caerden, dengan mengharuskan kongsi dagang tersebut membayar denda 50.000 rupiah Belanda kepada Aceh dan uang sejumlah itu benar-benar telah dibayarkan kepada kerajaan Aceh.⁵⁰ Rupa-rupanya pihak Belanda yang dipimpin oleh Laurens Bicker itu telah berhasil meyakinkan Sultan Aceh, karena kemudian Sultan telah bersedia menerima mereka dengan baik di Aceh. Kepada mereka diberikan izin untuk dapat berdagang di Aceh. Frerick de Houtman yang ditawan bersama dengan pedagang-pedagang Belanda lainnya diberi kebebasan kembali.

Suatu peristiwa yang penting pula dikemukakan di sini ialah pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah al Mukammil. Bersama dengan kembalinya kapal Laurens Bicker dan Gerard de roy ke Negeri Belanda telah dikirim tiga orang utusan Sultan Aceh untuk menghadap Pangeran Maurits dan Majelis wakil rakyat negeri Belanda.⁵¹ Mereka ini merupakan wakil resmi yang pertama kali sebuah kerajaan di Asia yang mengunjungi negeri Belanda. Salah seorang dari utusan tersebut yakni yang bernama Hamid meninggal di sana tidak lama setelah mereka tiba di Middelburg. Atas biaya dari penguasa "Kompeni India Timur" ia dimakamkan di sana.⁵² Utusan lainnya yakni yang bernama Sri Mohammad dan Amir Hasan dapat bertemu dengan pangeran Maurits dan kemudian selamat kembali pulang ke Aceh.

Pada 6 Juni 1602, James Lancaster seorang dari angkatan laut Inggris beserta rombongannya dengan membawa sepucuk surat dari rajanya untuk dipersembahkan kepada Sultan Alaudin Riayat Syah al Mukammil, tiba di pelabuhan Aceh.⁵³ Mereka mendapat sambutan dengan penuh ramah tamah dari Sultan Aceh dan diterima di

kraton Aceh dalam sebuah resepsi yang khusus diadakan untuk menyambut dan menghormati rombongan James Lancaster secara besar-besaran. Sebelum melakukan suatu perundingan resmi dengan Sultan, terlebih dulu James Lancaster mengadakan suatu perundingan pendahuluan dengan bawahan Sultan Aceh. Pembicaraan dalam Perundingan itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Lancaster dapat mengerti karena ia membawa serta seorang Jahudi dari Inggris sebagai penterjemah yang dapat berbahasa Arab dan Berbahasa Inggris secara baik.⁵⁴ Dalam perundingan itu Lancaster mengemukakan betapa pentingnya perdagangan antara kedua kerajaan itu, yakni kerajaan Inggris dan kerajaan Aceh. Ia menyinggung pula tentang keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan dan mengatakan bahwa Sultan Aceh tentu sudah maklum bahwa banyak negeri yang maju sebagai akibat dari perdagangan dan perdagangan itu adalah sumber penghasilan bagi rajanya. Kekayaan rakyatnya dan makin ramah penerimaan dan perlakuan terhadap pedagang-pedagang asing maka makin baik bagi perkembangan perdagangannya.⁵⁵

Selanjutnya James Lancaster memohon, sebaiknya Sultan Aceh melarang perdagangan orang-orang Portugis di Aceh dan juga agar Sultan mengeluarkan peraturan supaya tidak akan mengancam atau memperlakukan hal yang tidak baik terhadap orang-orang Aceh hendaknya mau membantu urusan-urusan mereka di Aceh. Setelah perundingan selesai wakil sultan Aceh meminta kepada Lancaster agar semua alasan dan keinginan yang dimintakan atas nama Raja Inggris, supaya dibuat secara tertulis untuk disampaikan kepada Sultannya. Setelah surat permohonan itu selesai dibuat. James Lancaster menghadap Sultan Aceh dan Sultan bersedia berunding langsung dengannya sebagai wakil raja Inggris. Hasil dari perundingan itu dituangkan dalam beberapa ketetapan. (1) Orang-orang Inggris diperkenankan masuk ke Aceh dan dapat berdagang di sana (2) Barang-barang yang mereka perdagangkan di Aceh dibebaskan dari bea masuk dan bea keluar. (3) jika kapal, barang dan orang-orang Inggris mendapat kecelakaan di laut Aceh, mereka akan mendapat pertolongan dari orang Aceh. (4) Kepada orang-orang Inggris diberi kebebasan untuk menentukan dan menyerahkan barang-barang mereka kepada orang yang menjadi pilihannya. (5)

Segala perjanjian jual beli yang telah ditutup harus diselesaikan pembayarannya. (6) Mereka berhak mengadili siapa saja yang memberi malu mereka. (8) Barang-barang mereka tidak boleh ditahan, maupun disita dengan paksaan. (9) Mereka diperbolehkan bebas bergerak (pergi) ke segala tempat di Aceh.⁵⁶

Setelah perjanjian antara Sultan Aceh dan James Lancaster ditetapkan, maka para pedagang Inggris yang berada di Aceh, nampak selalu sibuk mencari lada buat muatan kapal-kapalnya. Mereka berhasil mendapatkan lada di Aceh, tetapi masih dalam jumlah yang kecil. Hal ini disebabkan karena panen lada pada waktu itu tidak begitu memuaskan. Kemudian beberapa pedagang Inggris ada yang bermaksud untuk pergi langsung ke daerah takluk kerajaan Aceh di pantai barat Sumatera, yakni di Pariaman, dimana lada banyak terdapat. James Lancaster meminta kepada Sultan Aceh agar mereka diberi lisensi dagang untuk dibawa oleh anak buahnya yang bernama Harry Maiddelton dan beberapa pedagang lainnya dengan kapal yang bernama "Susanne" ke Pariaman.⁵⁷ Isi surat yang diberikan Sultan Aceh kepada Hiddleton itu antara lain adalah sebagai berikut (di atas sekali terdapat cap stempel kerajaan Aceh dengan menggunakan huruf Arab), yang berbunyi :

Assultan Alaudin Syah bin Firman :

"Dengan anugerah Tuhan serwa Alam sekalian! Sabda dan maha mulia, datang kepada segala panglima negeri dan kepala² segala negeri yang takluk ke Aceh. Adapun barang (dike) tahu (oileh) kamu sekalian, bahwa kapal orang Inggitir ini kapitannya bernama Harry Middleton. Asalnya kapal ini berlabuh di (pe) labuhan negeri Aceh. Beberapa lamanya ia disana, maka mohon dirinya ia berlayar ke Jawa. Jika ia membeli lada atau barang sesuatu. Yang orang Ingelitir ini adalah sahabat kita raja Ingelitir: Maka kepitenya dan segala saudagarnya itu serasa orang kitalah. Jika ia (ber)-beli berjual dengan kamu yang dalam teluk rantau Aceh itu, dengan sebenar-benarnya juga dia telah diberi izin"⁵⁸

Pada tanggal 26 November 1602 kapal "Susanne" yang telah berada di pantai barat Sumatera, telah mendapatkan lada sebanyak 600 *bahar* dan cengkeh 66 *bahar*. Rupa-rupanya dalam perjalanan ke Aceh ini, James Lancaster merasa tidak beruntung karena katanya

ia telah dibohongi oleh John Davis semasa mereka masih di London, John Davis mengatakan kepada Lancaster, bahwa harga lada hanya 4 *real* per kwintal, tetapi sebetulnya menurut Lancaster harganya 20 *real* sekwintal.⁵⁹ Kemudian setelah rombongan yang dipimpin Middleton yang berada di pantai barat Sumatera bergabung kembali pada rombongan James Lancaster di salah satu pelabuhan di pantai barat Sumatera, mereka pulang menuju Inggris.

Sementara pedagang-pedagang Belanda dan Inggris datang ke Aceh, orang-orang Portugis yang berada di sana makin lama makin menunjukkan berpengaruhnya di istana Aceh. Sultan Aceh mulai menjadi curiga lagi kepada orang Portugis. Ketika mereka pada tahun 1602 mengajukan suatu permohonan kepada Sultan, agar mereka diberi suatu tempat, yakni salah satu di antara pulau-pulau yang terletak di depan pantai Aceh. Tujuan mereka adalah untuk mendirikan di tempat itu, dengan alasan untuk menjamin keselamatan perdagangan mereka di Aceh.⁶⁰ Sultan Aceh tidak hanya menolak permintaan tersebut, tetapi juga amat merasa tersinggung karena diajukan dengan amat angkuh oleh orang-orang Portugis.⁶¹ Sejak saat itulah Sultan Aceh mulai berprasangka kepada orang-orang Portugis yang berada di Aceh dan sekaligus ia mulai merubah kembali sikapnya terhadap mereka.⁶² Maka mulai saat itu pula terjadi lagi hubungan yang tidak baik antara kerajaan Aceh dengan pihak Portugis.

Dalam tahun 1603, Sultan Alaudin Riayat Syah Al Mukammil yang telah mencapai usia amat lanjut, menempatkan anak laki-lakinya yang tertua di antara yang masih hidup untuk mendampingi dia di atas tahta kerajaan Aceh. Rupa-rupanya puteranya ini berambisi hendak menjadi Sultan penuh. Maka ia menyingkirkan ayahnya dari kedudukan Sultan dan kemudian dia sendiri naik tahta memerintah sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ali Riayat Syah (1604-1607). Tahun-tahun pertama dari pemerintahan Sultan yang baru ini, ditandai dengan adanya bencana-bencana besar yang menimpa kerajaan Aceh, yaitu adanya suatu musim kemarau yang luar biasa yang telah menimbulkan bahaya kelaparan dan berjangkitnya suatu wabah penyakit yang menimbulkan banyak kematian di kalangan penduduknya.⁶³ Sultan ini tidak mampu mengatasi

kesulitan-kesulitan tersebut dan ini masih ditambah lagi dengan adanya suatu pertikaian berdarah dengan saudaranya yang menjabat sebagai Sultan di Pedir.⁶⁴ Meskipun untuk beberapa lama Sultan Ali Riayat Syah masih menduduki jabatan Sultan, tetapi kerajaannya pada waktu itu merupakan kancah perampokkan, pembunuhan dan ketidak aturan yang sangat menyedihkan.⁶⁵

Mengenai pedagang-pedagang Belanda yang telah berhasil mengadakan suatu perdamaian dengan Aceh, mereka bebas berdagang di Aceh. Kapal-kapal mereka yang memasuki kepulauan Indonesia maupun yang meneruskan pelayarannya ke Indo-Cina, Tiongkok dan Jepang dapat singgah secara leluasa di pelabuhan Aceh. Di antaranya ialah kapal yang dipimpin oleh De Meert, van Waerwijk, van Heemskerk, van Splibergen dan van der Hagen. Yang tersebut terakhir adalah yang memimpin kapal yang membawa pulang kembali utusan Aceh dari negeri Belanda, mereka tiba di pelabuhan Aceh tahun 1604,⁶⁶

Pada tanggal 17 Januari 1607, suatu perjanjian mengenai perdagangan dan hal-hal lain telah ditanda tangani antara Kompeni Belanda yang diwakili oleh Laksanaka Muda Oliver van de Vivere dengan Sultan Aceh, yakni Sultan Ali Riayat Syah.⁶⁷ Ada sebelas ketentuan yang telah dirumuskan dalam perjanjian itu.⁶⁸ Isi perjanjian tersebut secara garis besar yaitu, Sultan Aceh membebaskan pajak-pajak yang seharusnya kepada pedagang-pedagang Belanda selama mereka berada di Aceh. Selain itu juga Sultan Aceh bersedia memberikan izin untuk membangun sendiri suatu tempat tinggal yang tetap bagi orang-orang Belanda yang tinggal di Aceh. Di tempat itu bila perlu orang-orang Belanda diperkenankan pula membawa pula ahli-ahli dan para keluarga mereka dari negerinya. Orang-orang berbangsa Eropa lainnya, tanpa izin dari pihak Belanda tidak diperbolehkan berada di tempat itu.⁶⁹

Menurut J.K.J. De Jonge, perjanjian 17 Januari 1607 antara pihak Kompeni Belanda dengan Sultan Aceh merupakan suatu perjanjian yang sangat menguntungkan pihak Kompeni Belanda. Perjanjian seperti itu tidak pernah dijumpai di tempat-tempat lain di Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya De Jonge menyebutkan bahwa, seandainya perjanjian tersebut benar-benar terlaksana, maka

pusat kedudukan Belanda di India Timur (Indonesia) mungkin tidak pernah didirikan di Batavia.⁷⁰ Sultan Ali Riayat Syah bersedia mengadakan perjanjian yang sangat menguntungkan pihak Kompeni Belanda itu mungkin karena kerajaan Aceh pada waktu itu dalam keadaan terjepit, yaitu dengan adanya ancaman dari pihak Portugis yang hendak menyerang Aceh, dan juga karena janji Kompeni Belanda kepada Sultan Aceh akan membantunya untuk menghadapi ancaman Portugis dan ancaman dari kerajaan Johor yang pada saat itu juga sedang bermusuhan dengan kerajaan Aceh. Meskipun demikian perjanjian itu tidak jadi terlaksana karena Sultan yang menggantikannya Sultan Ali Riayat Syah membatalkan kembali perjanjian tersebut.

CATATAN

- 1) Istilah ini dikemukakan oleh T. Ibrahim Alfian dalam karyanya "Emas, Kafir dan Maut", *Nusantara* No. 2 (Kuala Lumpur: Juli 1972), hal 270.
- 2) G.P. Tolson, "Achen Commonly Called Acheen", *Journal of the Royal Asiatic Society Straits Branch*, selanjutnya disingkat JSBRAS V, (Singapore: 1880), hal. 12.
- 3) Teuku Iskandar, "De Hikajat Atjeh", VKI 26, (S'Gravenhage: Martinus nijhoff, 1958), hal. 28
- 4) D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, Vol. I, (Djakarta: P.N. Pradnya Paramita, 1960), hal. 15. (Saturan Prajudi Atmosudirdjo).
- 5) Mengenai faktor apa yang mendorong bangsa Portugis untuk datang ke Indonesia dan kemudian merebut Malaka, lihat misalnya, Sartono Kartodirdjo, "Religius and Economic Aspects of Portuguese-Indonesian Relations", *Separata de STUDIA-Revista Quadrimestral* No. 29 (Lisboa: April 1970). Lihat juga Dharmono Hardjowidjono, "Benarkah orang-orang Portugis Melancarkan Perang Agama Terhadap Umat Islam Selama Kehadiran Mereka di Indonesia", *Seminar Sejarah Nasional II*, p. III/34, (Yogyakarta: 26-29 Agustus 1970).
- 6) J. Kreemer, *Aceh I*, (Leiden: N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen, E.J. Brill, 1923), hal. 4
- 7) R. A. Hoesein Djajadiningrat, "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat Aceh", *BKI* 65 (1911), hal. 213.

- 8) Lihat B Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Vol I, (Bandung Sumur Bandung, 1960, hal. 42.
- 9) T. Braddel, "on the History of Achen", *JIEAE*, Vol V (Singapore: 1951), hal. 16.
- 10) J. Kmeer, *loc.cit.*,
- 11) D.H. Burger, *op.cit.*, hal. 50
- 12) B. Scribeke, *op.cit.*, hal. 43
- 13) Mengenai utusan Aceh yang dikirim oleh sultan al Kahhar ke Turki, di Aceh terkenal dengan kisah Lada Sicupak. Dalam kisah ini Turki disebut negeri Rum. Inti kisah ini ialah mengenai perutusan Aceh yang dikirim ke Turki. Di antara hadiah yang dipersembahkan kepada penguasa Turki ialah lada. Pada waktu berangkat mautan lada memenuhi kapal yang membawa perutusan itu, tetapi karena lama dalam perjalanan yang banyak rintangan yang dialami di laut menyebabkan muatan lada tinggal sedikit atau hanya tinggal *sicupak* (lebih kurang 1/2 liter) yang dapat dipersembahkan kepada penguasa Turki. Sewaktu utusan itu kembali, selain membawa surat dari Sultan Turki untuk Sultan Aceh, dibawa pula alat-alat perlengkapan perang. Salah satu ialah sebuah meriam yang dinamai *Meriam lada Sicupak*.
- 14) C.R. Boxer, "A Note On Portuguese Reactions To The Revival of The Red Sea Spice Trade And The Rice Of Acheh, 1540-1600", *International Conference On Asia History*, paper No. 2 (Kuala Lumpur: Departement of History, University of Malaya, 5th-10th August, 1968), hal. 9.
- 15) *Ibid.*,
- 16) *Ibid.*
- 17) R.O. Winstedt, *A History of Malaya*, (Kuala Lumpur, Singapore: Marican & Sons, 1968), hal. 79.
- 18) R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op.cit.*, hal. 153.
- 19) Tengku Luckman Sinar, *Sari Sejarah Serdang*. (Medan: tanpa penerbit dan angka tahun), hal. 22.

- 20) R.O. Richard Winstedt, "Note on The History of Kedah" *Journal of The Royal Asiatic Society. Malayan Branch* (JMBRAS) Vol. XIV, Part III, (Singapore, December 1936), hal. 157.
- 21) K.F. H. Van Langen, "De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat", *BKI* 37 (1888) hal. 429.
- 22) D.H. Burger, *op. cit.*, hal. 61.
- 23) K.F. H. Langen, *op.cit.*, hal. 387.
- 24) C.R. Boxer, *op.cit.*, hal. 17-18.
- 25) *Ibid.*,
- 26) P.A. Tiele, "De Europeers in de Maleische Archipel", *BKI* 37, (1888), hal. 177.
- 27). *Ibid.*,
- 28) Lihat Moh. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Diterbitkan oleh pengarang sendiri, 1961), hal. 118.
- 29) Lihat C. Lekkerkerker, *Land en Volk van Sumatra*, (Leiden: N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen, E.J.Brill, 1916), hal. 314.
- 30) Lihat P.A. Tiele, "Frederick de Houtman in Aceh", *Indische Gids*, I (1881), hal. 146-152.
- 31) Tiap *Bares* sama dengan 3 1/2 kwintal atau 350 kg lihat C.R. Boxer, *op.cit.*, hal. 18.
- 32) Lihat laporan perjalanan dari John Davis sebagai nakhoda pada sebuah kapal Belanda ke "India Timur" pada tahun 1598, dalam Julius Jacobs, *Het Familie en Kampong-leven op groot Aceh (II)*, (Leiden: E.J. Brill 1894), hal. 1823.
- 33) *Ibid.*, hal. 180.
- 34) P. J. Veth, *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland*, (Leiden: Geraalth Kolf, 1887), hal. 69.
- 35) Lihat kisah perjalanan James Lancaster ke Aceh pada tahun 1601, dalam J. Jacobs, *op.cit.*, hal. 198.
- 36) Teungku Luckman Sinar, *op.cit.*, hal. 26.
- 37) Das Gupta. A.K., "Acheh in Indonesian Trade and Politics

1600-1641", Ph. D. Thesis (Unpublished, Cornell University: 1960), hal. 103.

- 38) Lihat laporan perjalanan John Davis, dalam J. Jacobs, *op.cit.*, hal. 185.
- 39) *ibid.*,
- 40) *ibid.*,
- 41) *ibid.*,
- 42) Menurut cerita-cerita lama di Aceh, nama Laksamana wanita ini Malahayati (Laksamana Malahayati).
- 43) Laporan perjalanan John Davis, *Loc. cit.*,
- 44) *Ibid.*, hal. 186
- 45) *Ibid.*, hal. 187.
- 46) *Ibid.*, sekarang 1 kati di Aceh beratnya + 6 ons Inggris.
- 47) F. Valentijn, *Oud en Nieuw Oost Indie I*, (Amsterdam: Wed. J.C. Kesteren & Zoon, 1963), hal. 87.
- 48) Kisah mengenai peristiwa ini, lihat laporan perjalanan Jacob van Neck ke Aceh pada tahun 1600, dalam J. Jacobs, *op.cit.*, hal. 189-198.
- 49) Surat Pangeran Maurits untuk Sultan Aceh ditulis dalam bahasa Spanyol. Teks lengkap surat tersebut lihat lampiran No. 2 dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, lampiran No. 3.
- 50) J. K.J. de Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost Indie II*, (s' Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1864), hal. 234.
- 51) Mengenai utusan Aceh ke negeri Belanda ini, lihat misalnya Wap, *Het Gezantschap van den Sultan van Achin A", 1602 aan Prins Maurits van Nassau en de oud Nederlandsche Republiek*, (Rotterdam: H. Nijgh, 1862), hal. 10-31.
- 52) Pieter van Dam, *Beschrijvinge van de Oost Indische Compagnie Deel I*, (s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931), hal. 260.

- 53) C.A. Gibson Hill, Raffles, Aceh and The order of the Golden Sword", *JMBRAS*, Vol XXIX, part I (May 1956) hal. 6
- 54) Lihat laporan perjalanan James Lancaster ke Aceh, dalam J. Jacobs, *op.cit.*, hal. 202.
- 55) *Ibid.*, hal. 204.
- 56) *Ibid.*, hal. 204.
- 57) *Ibid.*, hal. 205.
- 58) Aslinya surat ini kini tersimpan di dalam Bodleian Library Oxford, (bernomor MS Douce or C.4). Lihat Moh. Said, *op.cit.*, hal. 138.
- 59) Lihat laporan perjalanan James Lancaster ke Aceh, *loc. cit.*,
- 60) J. Langhout, *Economische Staatskunde in Atjeh*, (Den Haag : N.V. Boekhandel W.P. Stockum & Zoon, 1923, hlm. 12.
- 61) P.J. Veth, *op.cit.*, hlm. 71.
- 62) Iskandar, hlm. 42.
- 63) Translation of the Annal of Acheen". *JIAEA*, vol. V, (1851), hlm. 603.
- 64) P.J. Veth, *loc.cit.*,
- 65) *Ibid.*, hlm. 72.
- 66) Moh. Said, *op.cit.*, hlm. 140.
- 67) Pieter van dam, *loc. cit.*,
- 68) Isi perjanjian ini selengkapnya, lihat J.K.j. De Jonge, III (1865), *op.cit.*, hlm. 223-225.
- 69) P.A. Tiele, "De Europeers in de Maleishce Archipel, *BKI* 32, (1884), hlm. 66.
- 70) J.K.J. De Jonge, *op.cit.*, hlm. 51.

BAB III

ASAL-USUL SULTAN ISKANDAR MUDA: MASA KANAK-KANAK HINGGA REMAJA

Kapan tanggal dan tahun kelahiran Sultan Iskandar Muda, belum diketahui secara pasti. Beberapa sumber yang memberi informasi berkenaan dengan kelahiran Sultan tersebut berbeda-beda. Menurut sebuah manuskrip (MS)¹ Sultan Iskandar Muda lahir pada hari Senin Rabiul Awal 999 Hijrah yang bila dicocokkan dengan tahun Masehi jatuh pada hari Selasa (bukan Senin) tanggal 27 Januari 1591. Adapun transkripsi dari pada MS tersebut adalah sebagai berikut:

"Bismillah alrahman alrahim. Bahwasannya pada tarikh tahun Hijrah sembilan ratus sembilan puluh sembilan, 999, pada dua belas Rabi'lawal, hari Isnin, pada waktu dhuha, telah dilahirkan Allah ta'al seorang hamba yang kuat lagi perkasa bernama Abdullah Sulaiman ibn Mansur yaitu dalam Dar al Dunia Madinat al Salatin al-Asyih al-Kubra, Bandar al-Ma'mur Aceh Daral-Salam, yaitu pada zaman kerajaan Paduka Sri Sultan Ala Ad-Din Mansur Syah ibn Ahmad, raja Perak. Maka pada hari itu disembelih kambing satu. Dan pada waktu itu dicecap dengan khorma, air zamzam, delima, pisang, buah zahib. Maka pada hari tujuh disembelih lembu 'akikah dan dicukur rambut dan ditimbang dengan emas. Maka diberi sedekah pada fakir miskin serta khanduri. Hadir alim ulama membaca do'a selamat.

Maka pada hari itulah dinamakan oleh Sultan Ala ad-Din Mansur Syah, Raja Perak Pocut Abdullah Sulaiman Mansur, yang akan memegang kerajaan Aceh. Kemudian maka berkata al-Syaikh Abd' l-Khair: Inilah Iskandar Muda mansur al-Asyi. Kemudian maka berkata

al-Syekh Muhammad Yamin: Inilah Mahkota alam Mansur. Kemudian tuan kita yang mengimani, mengempu? negeri bahwa angin, Mahkota Alam Iskandar Muda Perkasa Alam Syah al-kuat, Intiha.

Dengan Mukhtasar Tadzkirat tabaqat Mahkota Alam oleh Wazir al-sabil al-Mijahid Amir al-Mijahidal-Ulama, Teungku di-Mele, Sayid Abdulah ibn Ahmad ibn Ali ibn Abdul Rahman ibn Usman ibn Hasan ibn Wandu Mule Sayidi Laila al-Habib Syarif Abdullah ibn Said Abdullah al-Habib Syarif Ibrahim Sultan Jamal al-alam Badr. al-Munir al-Jamal Lail".

Menurut catatan R.A. Hoesein Djajadiningrat dalam karyanya² menyebutkan bahwa Sultan Alaudin Riayat Syah al Mukammil (1588-1604) mempunyai enam orang anak, empat laki-laki dan dua perempuan. Yang laki-laki bernama Maharaja Di Raja, Sultan Muda, Sultan Husen dan Sultan Abangta Merah Upak. Anak yang pertama meninggal pada saat ia masih hidup, anak yang kedua diangkat menjadi pembantunya dalam memerintah kerajaan Aceh, yang ketiga ditetapkan sebagai Sultan di Pedir dan yang keempat juga meninggal di kerajaan Johor. Anak yang perempuan bernama Putri Raja Indra Bangsa dan Raja Putri. yang tersebut pertama merupakan putri kesayangan Sultan Alaudin Syah al Mukammil. Ia dinikahkan dengan Sultan Manshur, cucu Sultan Alaudin Riayat Syah al Kahhar (yang memerintah Kerajaan Aceh tahun 1537-1571). Dari perkawinan ini pada tahun 1590 lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Darma Wangsa Tun pangkat, yang kemudian bergelar Sultan Iskandar Muda.³ Jadi kalau kita bandingkan antara keterangan dari MS di atas dengan yang dikemukakan oleh R.A. Hoesein Djajadiningrat tentang tahun kelahiran Sultan tersebut terdapat satu tahun perbedaan.

Selain itu menurut keterangan *Hikayat Aceh*, perkawinan Mansur Syah dengan Putri Indra Bangsa diadakan pada masa pemerintahan Sultan Alaudin, anak Sultan Ahmad dari Perak, yang menurut sumber lain memerintah dari tahun 1579 hingga 1558. Hikayat tersebut menegaskan pula bahwa Putri Raja Indra Bangsa Hamil beberapa waktu sesudah pernikahannya. Penjelasan ini cocok dengan cerita Thomas Best yang mengunjungi kerajaan Aceh pada tahun 1613. Dia mengatakan bahwa Sang Raja (Sultan Iskandar Muda) pada saat itu berumur 32 tahun. Oleh karena tahun itu pasti

menurut perhitungan Islam, ada alasan untuk menganggap Iskandar Muda lahir kira-kira tahun 1583. Hal ini berarti bahwa umurnya kira-kira 24 tahun waktu naik tahta.⁴ Dalam hal ini mungkin karena keterbatasan sumber dan ketidak pastian informasi dari sumber yang ada, maka umumnya para penulis sejarah belum menunjukkan suatu kesepakatan tentang angka yang kongkrit sehubungan dengan kelahiran Sultan Iskandar Muda.

Naskah Hikayat Aceh mengkisahkan tentang pertumbuhannya Sultan Iskandar Muda. Disebutkan bahwa ketika umurnya 4 tahun, kakeknya yang menyayangnya secara khusus, memberinya "gajah emas dan kuda untuk permainannya". Selain itu juga sebuah mainan otomatis berupa dua ekor domba yang dapat berlaga, lalu gasing dan kelereng dari emas atau dari suasa.⁵ Ketika ia berumur 5 tahun, kakeknya memberikan seekor anak gajah bernama Indra Jaya sebagai teman bermain. Pada umur 6 tahun, anak itu sudah berburu gajah liar, pada umur 8 tahun ia suka bermain perahu di sungai mengatur perang. Peperangan dengan meriam-meriaman kecil. Pada umur 9 tahun ia membagi perang-perangan sambil membangun benteng-benteng pertanahan kecil, pada umur 12 tahun ia berburu kerbau liar waktu mencapai umur 13 tahun ia mulai bekerja dengan bimbingan Fakih Raja Indra. Si kakek menyuruh membuatkan 30 batu tulis dari logam mulai bagi cucunya dan teman-temannya. Ia juga belajar membaca Al-Qur'an. Lalu seorang guru pedang ditugaskan mengajarkan kepandaian main pedang.⁶

Di atas telah disinggung bahwa yang membantu atau yang melindungi Sultan Alauddin Riayat Syah al Mukammil (karena ia telah berusia lanjut) dalam memerintah kerajaan Aceh adalah Sultan Muda. Rupa-rupanya puteranya ini berambisi hendak menjadi Sultan penuh. Maka untuk ini ia menyingkirkan ayahnya dari kedudukan Sultan dan dia sendiri naik tahta memerintah sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ali Riayat Syah (1604-1607). Tahun-tahun pertama dari pemerintahan Sultan yang baru ini, ditandai dengan adanya bencana-bencana besar yang menimpa kerajaan Aceh, yaitu adanya musim kemarau yang luar biasa yang telah menimbulkan bahaya kelaparan dan berjangkitnya suatu penyakit yang menimbulkan banyak korban di kalangan penduduknya.⁷ Sultan ini tidak mampu

mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dan ini masih ditambah lagi dengan adanya suatu pertikaian berdarah dengan saudaranya yang menjabat sebagai Sultan di Pedir.⁸ Meskipun untuk beberapa lama Sultan Ali Riayat Syah masih menduduki jabatan Sultan, tetapi kerajaannya pada waktu itu merupakan kancah perampokan, pembunuhan dan ketidak aturan yang sangat menyedihkan.⁹ Oleh karenanya pemerintahannya berjalan dengan tidak memuaskan rakyatnya. Hal ini disebabkan juga karena ia menduduki jabatan Sultan dengan menyingkirkan ayahnya sendiri, dan ia tidak memperhatikan bahaya yang mengancam kerajaannya. Rasa tidak puas terhadap kepemimpinannya diperlihatkan pula oleh kemenakannya Darma Wangsa Tun Pangkat. Hal ini menyebabkan Sultan tidak senang kepadanya, sehingga dia ditangkap dan dijatuhi hukuman. Darma Wangsa Tun Pangkat kemudian dapat melarikan diri dari tahanan dan mencari perlindungan pamannya yang bernama Sultan Husen di Pedir. Di sana dia diterima secara baik. Tetapi Sultan Aceh menghendaki agar Darma Wangsa Tun Pangkat diserahkan kembali kepadanya oleh Sultan Pedir. Namun Sultan Pedir tidak bersedia, mengingat Darma Wangsa Tun Pangkat adalah cucu dari anak kesayangan ayah mereka. Perkara ini menimbulkan ketegangan antara Aceh dengan Pedir. Setelah terjadi beberapa pertempuran antara kedua kerajaan ini yang menimbulkan banyak korban jiwa, akhirnya rakyat Pedir tidak mampu lagi menghadapi pihak Aceh dan Sultan Pedir (Sultan Husen) terpaksa menyerahkan kemenakannya kepada saudaranya Sultan Aceh.¹⁰

Pada saat orang-orang Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Castro pada bulan Juni 1606 menyerang Aceh, Darma Wangsa Tun Pangkat masih ditahan sebagai tawanan. Ketika dia mendengar adanya penyerangan itu, maka ia mohon kepada Sultan agar dia diperkenankan ikut berperang melawan orang-orang Portugis. Dan permohonan ini rupa-rupanya dikabulkan oleh Sultan Aceh. Kemudian dia bersama-sama dengan tentara Aceh lainnya melakukan penyerangan terhadap orang-orang Portugis di sebuah benteng Aceh yang telah direbutnya. Sesudah beberapa lama bertempur, tentara Aceh berhasil mengusir kembali orang-orang Portugis dari Aceh. Oleh karenanya Darma Wangsa Tun Pangkat yang telah berjasa

karena keberaniannya dalam pertempuran itu, menjadi terkenal dan menarik perhatian orang-orang di kalangan istana Aceh.¹¹

Meninggalnya Sultan Ali Riayat Syah menurut kitab Bustanus Salatin, pada hari Rabu, 4 April 1607.¹² Sebagai penggantinya adalah kemenakannya sendiri, yakni Maharaja Darma Wangsa Tun Pangkat, dengan gelar Sultan Iskandar Muda.¹³ Pada mulanya sebahagian pejabat-pejabat di istana, berkeberatan untuk menobatkan Darma Wangsa Tun Pangkat sebagai Sultan, karena mereka menganggap masih ada saudara Sultan Ali Riayat Syah yang lebih berhak untuk memangku jabatan tersebut, yakni Sultan Husen dari Pedir. Menurut laporan Agustin de Beaulieu, Darma Wangsa Tun Pangkat dapat diangkat sebagai Sultan karena ibunya (Putri Raja Indra bangsa) yang berhasil mempengaruhi orang-orang di kalangan istana, sebelum Sultan Husen datang dari Pedir. Setelah Sultan Husen mengetahui tentang kematian saudaranya Sultan Aceh, ia datang ke Aceh untuk menerima warisan dari saudaranya itu. Ketika sampai ke Aceh, ia tidak mendapatkan penyambutan yang selayaknya. Dan tatkala memasuki istana Aceh, Sultan Aceh yang baru yakni Sultan Iskandar Muda menangkapnya dan memasukkan ke dalam penjara.¹⁴

CATATAN

- 1) MS ini disimpan di University Kebangsaan Malaysia.
- 2) R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de Geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh", *BKI* 65 (1911).
- 3) *Ibid* hal., 169 Lihat juga dalam T.J. Veltman, "Nota over de Geschiedenis van het landschap Pidie:, Tijdschrift voor Indische Tall Land-en Volkenkunde, selanjutnya disingkat TBG, 58 (1919), hal. 51.
- 4) R.A. Hoesein Djajadiningrat.".....
- 5) *Ibid.*, hal. 169 lihat juga dalam T.J. Veltman, ...
- 6) *Ibid.*,
- 7) "Translation of the Annal of Achen", JIEAE, Vol. V. (1981), hal. 608.
- 8) P.J. Veth, *Athchin en Zijne betrekkingen tot Nederland*. (Leiden: Geralth Kolff, 1887, hal. 73.
- 9) *Ibid.* hal. 72.
- 10) T.J. Veltman, *op.cit.*, hal. 54.
- 11) Lihat Laporan perjalanan Augustin de Beaulieu ke Aceh dalam J. Jacobs, *Het Familie en Kamponglevens op Groot Atjeh*, (Leiden: E. J. Brill 1894), hal. 260. Lihat juga A.J. A. Gerlach, *Atjih en De Atjinezen*, (Arnhem Thieme DA, 1873), hal. 37.

- 12) Nuruddin ar Raniri, *Bustanus Salatin*, disusun oleh T. Iskandar, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), hal. 34.
- 13) R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op.cit.*, hal. 175.
- 14) Laporan perjalanan Augustin de Beaulieu, *loc.cit.*

BAB IV

AKTIVITAS SULTAN ISKANDAR MUDA DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA

Pada saat Sultan Iskandar Muda memerintah, bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah *Gampong* atau kampung. Sebuah *Gampong* terdiri atas kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Yang mengepalai *Gampong* disebut *Geucik* dan wakilnya dinamakan *Waki*. Selain *Waki* pada sebuah *Gampong* terdapat pula pembantu-pembantu *Geucik* yang disebut *Teungku Meunasah* dan *Ureung Tuha*. Mereka termasuk golongan orang-orang tua dan yang berpengalaman dalam kampungnya¹. Oleh Sultan Iskandar Muda ditentukan bahwa kampung-kampung yang berdekatan penduduknya melakukan sembahyang bersama pada setiap hari Jum'at di sebuah mesjid hendaknya merupakan suatu kesatuan wilayah kekuasaan yang diberi nama *Mukim*². Kepala *Mukim* disebut *Imam Mukim*. Perkataan *Imum* ini berasal dari bahasa Arab artinya Imam (orang yang harus diikuti). Ialah yang bertindak sebagai pemimpin sembahyang pada setiap hari Jum'at pada sebuah mesjid.³ Tiap-tiap *Mukim* pada mulanya oleh Sultan Iskandar Muda ditetapkan harus berpenduduk 1000 orang laki-laki yang dapat memegang senjata⁴. Ini tentunya akan untuk kepentingan politis, yaitu untuk memudahkan menghimpun tenaga-tenaga tempur bila ia mengadakan suatu peperangan. Dalam perkembangannya fungsi dari *Imum Mukim* berubah menjadi kepala

pemerintahan dari sebuah Mukim, jadi yang mengkoordinir kepala-kepala kampung atau *Geucik-Geucik*. Dengan berubahnya fungsi *Imum Mukmin*, berubah pula nama panggilannya, yakni menjadi *Kepala Mukim*. Untuk pengganti sebagai imam sembahyang pada hari Jum'at di sebuah mesjid diserahkan kepada orang lain yang disebut *Imum Mesjid*.

Bentuk wilayah kekuasaan yang lebih besar daripada *Mukim* adalah yang disebut *Nanggroe* atau Negeri. Di *Aceh Inti* (*Aceh Proper*) atau daerah yang sekarang disebut Aceh Besar, *Nanggroe* adalah gabungan dari beberapa buah *Mukim* yang dikepalai oleh seorang yang disebut *Uleebalang*.⁵ Di luar daerah *Aceh Inti*, yaitu di daerah-daerah yang termasuk dalam kekuasaan kerajaan Aceh. Statusnya juga disamakan dengan *Nanggroe* seperti di *Aceh Inti*. Gelar penguasa di daerah itu juga disebut *Uleebalang*, tetapi ada juga yang memakai gelar Sultan, Syahbandar dan lain sebagainya menurut kebiasaan di daerah itu. *Uleebalang* menerima kekuasaan dari Sultan Aceh dan di daerah kekuasaannya mereka memerintah secara turun-temurun. Namun sewaktu mereka akan memangku jabatan sebagai pimpinan di daerahnya, mereka harus disyahkan pengangkatannya oleh Sultan (Sultan Iskandar Muda).⁶ Di dalam surat pengangkatan itu harus tanda atau cap stempel kerajaan Aceh, yakni yang disebut dengan *Cap Sikureung* atau cap sembilan.⁷ Tugas *Uleebalang* adalah memimpin *Nanggroe*-nya dan mengkoordinasi tenaga-tenaga tempur dari daerah kekuasaannya bila ada peperangan.⁸ Selain itu juga menjalankan perintah-perintah atau instruksi dari Sultan, menyediakan tentara atau perbekalan perang bila dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan membayar upeti kepada Sultan Aceh. Meskipun demikian mereka masih merupakan pemimpin-pemimpin yang sangat berkuasa di daerah mereka sendiri. Mereka memonopoli kekuasaan bagi dirinya sendiri di wilayah kekuasaannya.⁹ Mereka masih tetap sebagai pemimpin yang merdeka di daerahnya dan bebas apa saja terhadap rakyat di daerahnya. Misalnya dalam hal pengadilan atau melaksanakan hukuman. Dalam hal ini pada masa Sultan Iskandar Muda dibuat suatu ketentuan tentang hukuman-hukuman tertentu yang hanya dia seorang berhak melakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesewenang-wenangan para *Uleebalang* dalam menjatuhkan hukuman kepada rakyatnya.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa para *Uleebalang* masih tetap bebas melanjutkan peranan tradisional mereka, meskipun dalam hal-hal tertentu mereka tunduk kepada Sultan Iskandar Muda. Pada masa awal pemerintahannya dengan ketetapan dan kewibawaannya Sultan Iskandar Muda dapat menguasai para *Uleebalang*.¹⁰ Nanggroe-Nanggroe atau negeri-negeri yang berada di bawah Uléebalang dapat dikoordinir sebagai suatu kekuatan politis maupun ekonomis. Mereka mau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan kerajaan, seperti bila kerajaan melakukan peperangan atau ekspansi, mereka menyediakan tentara serta perbekalan-perbekalan perang lainnya. Mereka mau disuruh mengawasi monopoli perdagangan atas barang-barang dagangan tertentu yang dimonopoli oleh Sultan di daerahnya, berdasarkan ketentuan atau ketetapan dari Sultan Iskandar Muda. Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Aceh adalah Pemerintahan Pusat, yang berkedudukan di ibukota kerajaan, yaitu di Banda Aceh Dar as Salam. Kepala Pemerintahan pusat adalah Sultan, yang bergelar Sultan Iskandar Muda. Dalam mengendalikan pemerintahan Iskandar Muda dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing. Berdasarkan sebuah MS,¹¹ susunan pemerintahan pusat kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda terdiri dari 24 lembaga atau jabatan. Nama masing-masing lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Keurukan Katibul Muluk atau Sekretaris Raja
- (2) Rais waizrat Addaullah atau Perdana Menteri
- (3) Wazirat Addaulah atau Menteri Negara
- (4) Wazirat al Akdham atau Menteri Agung
- (5) Wazirat al Garbiyyah atau Menteri Peperangan
- (6) Wazirat al Haqqamiyah atau Menteri Kehakiman
- (7) Wazirat ad daraham atau Menteri Keuangan
- (8) Wazirat ad mizan atau Menteri Keadilan
- (9) Wazirat ad maarif atau Menteri Luar Negeri
- (10) Wazirat al Kharijjiyah atau Menteri Dalam Negeri
- (11) Wazirat al Addakhiliyyah atau Menteri Dalam Negeri
- (12) Wazirat al Auqaf atau Menteri Urusan Wakaf

- (13) Wazirat al Azziraah atau Menteri Pertanian
- (14) Wazirat al Maliyyah atau Menteri Urusan Harta
- (15) Wazirat al Muwashalat atau Menteri Perhubungan
- (16) Wazirat Asighal atau Menteri Urusan Kerja
- (17) As Syaikh al Islam Mufti empat syeikh Kaabah
- (18) Qadli al Malik Adil atau Kadli raja yang Adil
- (19) Wazir Tahakkum Muharrijlailan atau Ketua Pengurus Korps Kesenian
- (20) Qadli Muadhlam atau Kadhi/Jaksa Agung
- (21) Imam Bandar Darul Makmur Darussalam
- (22) Keucik Muluk atau Keucik Raja
- (23) Imam Muluk atau Imam Raja
- (24) Panglima Khaduri Muluk atau Ketua penyelenggaraan Kenduri Raja.¹²

Dalam "Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda", disebutkan bahwa dalam memerintah kerajaan, Sultan tunduk kepada Kanun.¹³ Sedangkan *Kadli Malikul Adil*, *Mufti Besar*, *Keurukun Katibul Muluk* dan Perdana Menteri serta sekalian menteri Kerajaan Aceh, tunduk kepada Sultan dan juga kepada *Kanun*.¹⁴

Kedua puluh empat lembaga atau jabatan yang ada di kerajaan Aceh seperti telah disebutkan di atas, dipegang oleh orang-orang tertentu yang diangkat oleh Sultan Iskandar Muda. Di antara kedua puluh empat juta orang, ada lima orang yang membawahi lembaga masing-masing yang amat dekat dan amat besarnya pengaruhnya kepada Sultan Iskandar Muda. Yang pertama Perdana Menteri yang bergelar *Orang Kaya Maharaja Seri Maharaja*, dialah orang yang membawahi wasir-wasir atau menteri-menteri di Kerajaan Aceh. Orang kedua ialah *Kadli Malikul Adil*, ialah orang yang mengurus pengadilan agama di kerajaan Aceh. Jabatan Kadli ini diadakan pertama di kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda,¹⁵ sehingga pada mulanya dalam menjalankan tugasnya *Kadli Malikul Adil* ini banyak dipengaruhi oleh kebijaksanaan Sultan Iskandar Muda. Dan boleh dikatakan pada masa itu *Kadli* ini lebih merupakan sebagai ketua pengadilan milik Sultan Iskandar Muda.¹⁶

Pada waktu itu oleh Sultan Iskandar Muda telah pula diadakan suatu pemisahan antara pelaksanaan pengadilan yang mengenai agama dan yang mengenai adat. Jadi pengaturan mengenai hukum agama dipisahkan dengan pengaturan dalam bidang adat.¹⁷ *Kadli* yang pertama di kerajaan Aceh namanya *Tjut Sandang* atau disebut juga dengan *Dja Bangka* dinamakan demikian karena dia berasal dari *Kawon Dja Sandang*.¹⁸ Dalam pengadilan sehari-hari Kadi di kerajaan Aceh dipanggil sesuai dengan gelarnya seperti tersebut di atas, yaitu *Kadli Malikul Adil*.

Selanjutnya pembantu ketiga yang dekat dengan Iskandar Muda dalam memerintah di pusat kerajaan Aceh adalah Menteri Peperangan atau wazir al Harbiyyah. Dia lebih terkenal dengan sebutan Laksamana atau *Orang Kaya Laksamana*.¹⁹ Laksamana dipercayakan untuk memegang atau memimpin angkatan perang Aceh, baik angkatan darat maupun armada lautnya. Dia banyak berjasa bagi kerajaan Aceh pada masa itu. Dialah yang selalu memimpin penaklukan kerajaan Aceh ke seberang lautan dan berkat kemenangan-kemenangan yang diperolehnya membuat kekuasaan Sultan Iskandar Muda menjadi besar.²⁰ Oleh H.K.J. Cowan, Laksamana Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda diidentikkan dengan tokoh Malem Dagang dalam epos *De Hikajat Malem Dagang*.²¹ Epos ini menceritakan kehebatan Sultan Iskandar Muda dan panglima-panglimanya dalam melakukan ekspansi ke salah sebuah kerajaan di Semenanjung Melayu. H.K.J. Cowan menandai inti epos tersebut, sewaktu armada Aceh mengadakan penaklukan ke kerajaan Johor dalam tahun 1615. Dalam penyerangan ini tokoh Malem Dagang digambarkan sebagai seorang pimpinan yang gagah berani. Adapun mengenai kehebatan Laksamana Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda, P.J. Veth dalam karyanya mengenai sejarah Aceh memberikan pujian dengan menyebutkan bahwa Laksamana Aceh itu mungkin merupakan pimpinan perang yang terbesar yang pernah memimpin suatu ketentaraan di Indonesia pada masa itu.²²

Orang penting lainnya yang berada di istana Aceh yang membantu Sultan Iskandar Muda ialah Syamsuddin as Samatrani atau lebih terkenal dengan nama Syamsuddin Pasai. Ia orang yang berpengaruh kepada Iskandar Muda. Jabatannya di kerajaan Aceh

ungkinan yang disebut *Imam Muluk* (Imam Raja). Syamsuddin Pasai ini merupakan seorang guru agama yang terkenal dengan ajaran *tasawuf* yang beraliran *Wujudiyah* yang sebelumnya telah diajarkan oleh Hamzah Fansuri di Aceh.²³ Iskandar Muda sendiri menjadi salah satu pengikut ajaran ini. Mengingat adanya suatu hubungan yang erat antara Syamsuddin Pasai dengan Sultan Iskandar Muda, maka boleh dikatakan dia adalah sebagai penasihat Sultan Iskandar Muda,²⁴ khususnya dalam bidang agama. Tokoh lain yang merupakan pembantu dekat Sultan Iskandar Muda ialah yang disebut *Keurukun Katibul Muluk* atau dengan logat Aceh Keureukon Katibul Mulok.²⁵ Dia berkedudukan sebagai juru tulis Sultan Iskandar Muda. Dialah yang menulis surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan kerajaan, seperti surat menyurat dengan negara lain, surat lisensi dan surat-surat pengangkatan Uleébalang.²⁶

Selain kedua puluh empat jabatan yang ada di kerajaan Aceh, terdapat pula tiga buah badan atau lembaga yang fungsinya hampir dapat disamakan dengan lembaga legislatif sekarang ini. Lembaga ini turut mendampingi Sultan Iskandar Muda dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga lembaga itu adalah, (1) Balairungsari, yaitu tempat bermufakat empat orang *Uleebalang* (hulubalang empat) dan tujuh orang alim ulama, serta menteri-menteri kerajaan Aceh, (2) *Balai Gadeng*, yaitu tempat mufakat dari delapan orang *Uleebalang* dan tujuh orang alim ulama serta menteri-menteri kerajaan Aceh. (3) *Balai Majelis Mahkamah Rakyat*, yaitu suatu tempat mufakat wakil rakyat sebanyak tujuh puluh tiga orang yang datang dari tujuh puluh tiga mukim.²⁷ Dalam lembaga hakim ini, setiap mukim diwakili oleh satu orang. Selain ketiga balai ini dalam "Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda", disebut pula adanya Balai Laksamana, yaitu semacam markas angkatan perang yang dikepalai oleh seorang yang disebut Laksamana. Laksamana inilah yang bertindak sebagai panglima tentara laut dan darat. Namun demikian ia tetap tunduk atau berada di bawah Sultan.²⁸ Selanjutnya ada pula yang disebut *Balai Fardah* yang tugasnya memungut atau mengumpulkan *wasir* (bea cukai) pelabuhan. Tokoh ini mungkin yang lazim dikenal dengan nama Syahbandar. Balai tunduk di bawah Perdana Menteri dan menteri-menteri.²⁹

Dalam memerintah kerajaan Sultan Iskandar Muda membuat ketetapan yang sesuai dengan situasi pada zamannya. Dia menciptakan beberapa hak istimewa pada dirinya. Misalnya hak-hak dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang bersalah di kerajaannya. Iskandar Muda mempunyai hak memotong tangan pencuri yang dapat ditangkap. Hak menusuk orang-orang yang bersalah dengan sebuah galah, hak mempertontonkan seseorang yang dihukum mati dengan dijepit di antara dua buah batang kayu yang dibelah; hak menyayat daging seseorang yang kena hukuman an hak menumbuk kepala seseorang yang bersalah dengan sebuah alu (sroh). Selain hak-hak istimewa lainnya, yaitu hak membunyikan meriam pada saat matahari terbenam, hak untuk dipanggil dengan nama *daulat* dan hak untuk membuat mata uang.³⁰ Dengan adanya hak-hak istimewa ini, khususnya hak menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang bersalah, maka keamanan dalam negeri dapat terjamin. Selain itu juga sifat kesewenang-wenangan para *Uleebalang* dalam menjatuhkan hukuman terhadap rakyat di daerah kekuasaannya dapat dikurangi.

Mengenai sifat Sultan Iskandar Muda banyak berita yang bertentangan satu sama lain. Misalnya sumber-sumber Aceh seperti *Bustanul Salatin*, memberikan pujian-pujian sifat Sultan ini. Antara lain menyebutkan: "Ialah yang Johan pahlawan lagi perkasa, dan kebijaksanaan pada segala barang perkataannya, dan pada segala kelakuannya, dan telah elok sikapnya".³¹ Sebaliknya sumber-sumber Barat seperti laporan perjalanan Augustin de Beaulieu yang datang ke Aceh pada tahun 1621, menyebutkan sifat-sifat kekejaman Sultan Iskandar Muda.³² Dalam hal perlu diingat bahwa berita dari sumber Barat tersebut berasal dari sudut pandangan keuntungan perdagangan mereka, sehingga simpati antipati mereka timbul menurut apakah harapan mereka dapat terpenuhi atau tidak. T. Iskandar dalam karyanya "De Hikajat Atjeh" menyebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda mempunyai sifat yang keras, yang tidak mau menerima bantahan, dan kehendaknya merupakan undang-undang. Bilamana kepentingan-kepentingan tidak sesuai dengan kepentingan pada pedagang asing dia akan tetap pada pendiriannya. Dan tentu sikapnya ini tidak menyenangkan para pedagang asing,³³ yang

datang ke Aceh khususnya pedagang-pedagang bangsa Barat.

Menurut catatan di dalam Bustanus Salatin, Sultan Iskandar Muda sangat giat mengembangkan agama Islam di Kerajaan Aceh. Di mana-mana ia memerintahkan mendirikan mesjid tempat ibadah umat Islam. Di antaranya yang terbesar ialah yang diberi nama Baitul Rahman.³⁴ Selanjutnya Bustanus Salatin juga memberi gambaran yang bagus tentang Sultan yang oleh rakyat Aceh setelah wafatnya dimuliakan dengan nama *Marhum Mahkota Alam*. Iskandar Muda digambarkan sebagai seorang yang sangat saleh dan taat menganut Agama Islam. Ia selalu menganjurkan kepada rakyatnya supaya memeluk Agama Islam dengan sempurna. Berbagai macam peraturan dikeluarkan untuk melarang orang melanggar ajaran Agama, seperti melarang orang berjudi dan meminum minuman keras. Selain itu Iskandar Muda juga disebut sebagai Sultan yang sangat pemurah. Setiap kali apabila pergi sembahyang Jum'at ke Mesjid, ia tidak lupa membawa bermacam-macam hadiah dan sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin.³⁵

Dalam bidang Agama Islam kerajaan Aceh pada masa Iskandar Muda sangat terkenal. Banyak ulama maupun pujangga seperti Hamzah Famsuri, Syamsudin Pasai, Nuruddin ar-Raniry, Syeh Adur Rauf Singkel (Tengku Syiah Kuala) datang atau berada di Aceh pada masa itu. Mereka ahli dalam pengetahuan Agama (Theologi Islam), dan mereka banyak menulis tentang itu. Fahaman Sufi atau disebut *Tasawuf* telah disebarkan oleh Hamzah Fansuri dan kemudian dilanjutkan oleh salah seorang pengikutnya Syamsudin Pasai mendapat bantuan dari Sultan Iskandar Muda sendiri. Dan dalam perkembangannya fahaman sufi atau *Tasawuf* ditentang oleh para ulama lainnya Nuruddin ar-Raniri dan Syeh Abdur Rauf Singkel.³⁶

Dibawah Sultan Iskandar Muda kerajaan Aceh mempunyai suatu angkatan perang yang kuat menurut ukuran masa itu. Kekuatan terpenting berupa kapal-kapal *galley* yang dipunyai oleh armada lautnya dan pasukan gajah yang dimiliki oleh pasukan daratnya. Iskandar Muda memiliki lebih dari 500 buah kapal layar dan 100 buah kapal *galley* yang besar, yang ditempatkan di pelabuhan-

pelabuhan besar seperti di Aceh sendiri, Daya dan Pedir. Seratus kapal yang disebut terakhir adalah kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 hingga 800 orang penumpang. Dan di antara kapal-kapal itu ada yang besarnya melebihi dari kapal-kapal yang dibangun di Eropa pada masa itu.³⁷ Selain besarnya, kapal-kapal itu juga mempunyai suatu kepingan-kepingan emas murni.³⁸ Gajah-gajah milik Sultan Iskandar Muda merupakan kekuatan inti angkatan daratnya. Jumlah ini sekitar 900 ekor. Binatang telah dilatih sedemikian rupa, sehingga tidak takut kepada api ataupun suara-suara tembakan.³⁹ Sultan Iskandar Muda juga mempunyai tentara khusus sebagai pengawal istananya, yang langsung berada di bawah perintahnya. Mereka terdiri atas 200 orang pasukan berkuda yang mengadakan patroli keliling istana dan dalam kota.

Dalam melakukan peperangan dan ekspansi sultan Iskandar Muda tidak membutuhkan biaya yang banyak. Hal ini disebabkan karena tentara yang diperintahkan untuk maju ke medan perang atau dalam ekspansi-ekspansi ke seberang lautan telah menyediakan sendiri makanan atau perbekalan bagi dirinya selama 3 bulan.⁴⁰ Yang mereka terima dari Sultan hanya senjata-senjata, tetapi bila mana suatu ekspansi melebihi jangka waktu yang ditetapkan yaitu tiga bulan, maka barulah Sultan yang menyediakan makanan tentaranya. Setelah mereka kembali dari suatu ekspansi, senjata-senjata yang diberikan oleh Sultan dikembalikan ke gudang persenjataan. Bealieu menaksirkan Iskandar Muda mempunyai sekitar 2.00 pucuk meriam dan senjata-senjata ringan yang masih sederhana seperti alat-alat batu, alat pembakar, jaring-jaring yang banyak jumlahnya; yang pasti Iskandar Muda memiliki 800 buah meriam besar dan 1200 buah meriam biasa yang baik.⁴¹ Satu hal yang sangat menguntungkan angkatan perang Aceh pada masa itu adalah didapatkannya sedemikian banyak belerang di Pulau Weh yang terletak beberapa km sebelah Utara pantai Aceh dan pada sebuah gunung dekat Pedir. Dengan adanya belerang ini tentara Aceh mudah membuat bahan-bahan peledak atau mesiu-mesiu bagi meriam-meriamnya.⁴² Selain itu juga ditemukan sumber-sumber minyak tanah di dekat Deli yang minyaknya digunakan oleh tentara Aceh untuk membakar kapal-kapal musuhnya.⁴³

Sultan Iskandar Muda luar biasa kayanya. Sumber kekayaan yang utama adalah hasil yang didapatkan di pelabuhan-pelabuhan

Aceh dan daerah-daerah taklukkan. Selain itu juga dari bea cukai yang dikenakan bagi kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Aceh. Setiap kapal asing yang memasukan barang-barang dari luar ke kerajaan Aceh dipungut pajak pemasukan sebesar 5% dari harga barang-barang itu.⁴⁴ Sumber pemasukan lainnya bagi Sultan Iskandar Muda adalah berupa hadiah-hadiah berharga yang diberikan kepadanya oleh semua tamu-tamu dari negeri asing yang berkunjung ke istananya. Para pedagang asing hampir tidak dapat melakukan urusannya di kerajaan Aceh tanpa memberikan hadiah-hadiah kepada Sultan Iskandar Muda. Misalnya adalah hal pemberian lisensi, tidak akan ada lisensi atau izin bagaimanapun jenisnya yang sahnyanya oleg Iskandar Muda kalau tidak disertai dengan suatu hadiah untuknya. Pemberian hadiah-hadiah ini berlaku bagi setiap pedagang asing yang berdagang di Aceh. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam sebuah ketentuan yang telah dituangkan dalam Adat Meukuta Sultan Iskandar Muda Yakni :

Adapun orang loewarang jang Islam lain dai bangsa orang Aceh seperti orang arab, Benggali, Keling, Melajoe dan Djawa atoe Seoempamanja masoek ke dalam negeri Atjeh Bandar dar as-Salam pekerdjannya berniaga tetapi koetika dia beroe datang ada menghantarkan persembahan kepada radja soepaja boleh kenal dengan radja.⁴⁵

Selain hadiah-hadiah yang diberikan oleh pedagang-pedagang asing, Iskandar Muda juga menerima kebutuhan-kebutuhan istana seperti beras, daging, ikan, burung-burung, minyak, gula dan sayur-sayuran.⁴⁶ Orang-orang yang mengabdikan kepadanya dari "hamba"-nya yang mengerjakan tanah miliknya. Iskandar Muda juga menerima warisan-warisan dari pada "hamba"-nya yang meninggal, bila si "hamba" ini tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris dari harta bendanya.⁴⁷ Harta benda orang-orang asing yang meninggal di Aceh juga hanya Sultan Iskandar Muda yang berhak untuk memilikinya.⁴⁸ Menurut kebiasaan yang turun-menurun, Iskandar Muda mempunyai hak pula untuk menyita segala-segalanya bilamana sebuah kapal asing terkandas di pantai kerajaannya. Di antara beberapa kapal yang kandas selama Beaulieu berada di Aceh, didapatkan sebuah kapal layar besar yang pada saat hendak berlabuh menjadi bocor dan kemudian terkandas di pantai Aceh.

Barang-barang dari kapal itu "didiamkan" oleh orang-orang Aceh untuk dipersembahkan kepada Sultan mereka, Iskandar Muda, sementara para opsir dan 120 orang awak kapal ditawan. Orang-orang termuka dari kapal-kapal itu kemudian membebaskan diri dengan membayar tebusan kepada Iskandar Muda melalui perantara pedagang-pedagang bangsa Moor.⁴⁹

Daerah-daerah takluk kerajaan Aceh di Pulau Sumatera sebagian besar terdiri dari kota-kota pelabuhan. Tiap kota pelabuhan terkenal dengan hasil-hasil buminya. Di sana banyak ditanam padi, sehingga Pedir pada waktu itu terkenal sebagai lumbung beras dari kerajaan Aceh.⁵⁰ Selain hasil padi, Pedir terkenal pula dengan ulat-ulat sutera yang memberikan hasil sutera bagi kerajaan Aceh. Di daerah Pasai sampai ke Deli juga didapatkan daerah yang amat subur dan sangat cocok untuk pertanian. Deli terkenal dengan hasil minyaknya. Daerah Daya juga amat subur, di sini terdapat banyak beras dan amat kaya dengan binatang ternak. Kota pelabuhan Singkel menghasilkan banyak kapur barus. Barus adalah sebuah kota yang amat indah. Di kota ini banyak didapatkan kapur barus dan kemenyan yang banyak menghasilkan banyak uang bagi penduduknya. Pasaman terletak di kaki sebuah gunung yang tinggi, di sini banyak menghasilkan lada. Tikus yang letaknya kira-kira 11 km dari Pasaman menghasilkan lebih banyak lada dari pada Pasaman. Pariman berpenduduk cukup banyak. Kota pelabuhan ini terletak lebih dari pada Tikus dan hawa udaranya yang lebih sehat. Di sana didapatkan cukup bahan makanan, tetapi pohon-pohon lada di sini tidak begitu subur. Kota Padang juga menghasilkan lada, tetapi hasil lada ini tidak begitu terkenal bila dibandingkan dengan hasil emasnya yang diperdagangkan secara besar-besaran.⁵¹ Emas ini banyak dibawa ke ibukota kerajaan Aceh dan merupakan daya tarik pula bagi pedagang-pedagang asing untuk datang ke sana. Pada awal abad ke XVII, menurut berita-berita dari Barat, tidak ada tempat lain di Asia kecuali Jepang yang dapat menghasilkan begitu banyak emas dari pada yang dimiliki kerajaan Aceh.⁵² John Davis menyebutkan mengenai emas yang bertumpuk-tumpuk yang diletakkan pada bagian ujung kaki dan kepala di tempat pemakaman raja-raja Aceh.⁵³ Di dalam kisah perjalanannya Beau-lieu juga menyebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda di istananya mempunyai

300 orang tukang emas dan sejumlah tukang-tukang jenis logam lainnya.⁵⁴

Dari penggambaran di atas dapat diketahui bahwa daerah takluk kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, di pulau Sumatera meluas sepanjang jalur pantai pada kota-kota pelabuhan, baik pada bagian Timur maupun pada sebelah Barat, dan pusat-pusat kegiatan ekonominya berada di kota-kota pelabuhan itu. Perdagangan yang berlangsung di kota-kota itu berada di bawah pengawasan Sultan Iskandar Muda, yang diwakili oleh pembantu-pembantunya seperti Syahbandar dan *Panglima*. Di negeri atau kota-kota pelabuhan itu, Aceh hanya berusaha menguasai perdagangannya saja, sedangkan penguasaan dalam arti politik tetap dipegang oleh penguasa-penguasa tradisional setempat.

Sultan Iskandar Muda melarang pedagang-pedagang asing membeli lada langsung ke daerah-daerah produksi lada yang berada di bawah kekuasaannya. Maka pedagang-pedagang yang ingin mendapatkannya lada harus datang ke ibukota kerajaan Aceh (Banda Aceh Dar as-Salam). Dengan sendirinya ibukota kerajaan menjadi ramai dengan berbagai pedagang asing, misalnya pedagang India, Arab, Turki, Siam, Pegu, Cina dan pedagang-pedagang suku-suku Melayu yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia dan Semenanjung Tanah Melayu. Pedagang-pedagang ini di ibukota kerajaan Aceh tinggal dalam kampung-kampung sendiri yang sesuai dengan negeri asal mereka. Misalnya pedagang-pedagang dari Jawa, tinggal sesama pedagang Jawa di sebuah kampung untuk masa-masa tertentu. Begitu pula pedagang-pedagang lainnya, sehingga besar kemungkinan nama-nama kampung yang sekarang masih misalnya kampung Jawa, kampung Kedah dan kampung Keling.

Di kota-kota kerajaan Aceh mengalir sebuah sungai yang bernama *Krueng Aceh* (sungai Aceh). Sungai ini menghubungkan antara ibukota dengan pelabuhan yang terletak di muara itu sejauh lebih kurang 3 km. Di depan muara sungai terdapat beberapa pulau, sehingga antara muara sungai dengan pula-pulau itu membentuk sebuah teluk luas yang dapat digunakan untuk tempat berlabuh beratus-ratus kapal pada saat yang bersamaan. Kapal-kapal dengan ukuran 60-70 ton dan dapat berlayar melalui muara sungai Aceh menuju ke ibukotanya.⁵⁵

Untuk sekedar gambaran mengenai situasi pelabuhan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda, yakni pada tahun 1636, van Leur dalam bukunya *Indonesian Trade and Society*, antara lain menulis sebagai berikut :

.... various vesses were come ti Achin, and more than heve been seen in many yers, namely:

3 there from the Coromandel Coast thar Brought more then 50 packs of cloth on the market.

1 one from Pegu

1 one from Surat) All laden with cloth, cotton

1 one from Dabhol) rou-cou dyed, etc., and the

1 one from the Ma) Dabhol ship brouht two fine labar Cost) horses as a gift for th King.

7 seven ships

In that way, as has been said, Achin being filled with mercahan-disses so that they have dropped in price by almost the helft.⁵⁶

Di samping kapal-kapal asing, kapal-kapal Kerajaan Aceh sendiri banyak berlabuh di pelabuhan Aceh. Kapal-kapal ini berlayar ke seluruh bahagian kerajaan Aceh untuk mengambil barang-barang yang akan dibawa untuk diperdagangkan di ibukota kerajaan Aceh. Situasi pelabuhan Aceh yang digambarkan Van Leur seperti di atas adalah situasi pada tahun 1636, saat mana merupakan tahun akhir dari pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan bertepatan dengan adanya blokade pihak Belanda terhadap perdagangan Portugis di Malaka. Dengan adanya blokade ini maka banyak pedagang yang seharusnya datang ke Malaka, kemudian mencari tempat-tempat lain, di antaranya ada datang ke Aceh.⁵⁷ Pada waktu itu kerajaan Aceh sedang mengalami kemunduran sebagai akibat melemahnya kekuatan armada laut; juga pengaruh Aceh di daerah taklukannya sudah melemah. Kapal-kapal asing seperti kapal Belanda sudah mulai datang langsung ke pelabuhan di daerah-daerah takluk kerajaan Aceh.

Setelah diuraikan sekilas tentang situasi umum kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda, selanjutnya akan diuraikan pula beberapa tindakan Sultan tersebut khususnya tindakan-tindakan dalam bidang ekonomi dan politik. Menjelang Iskandar Muda menduduki jabatan Sultan Aceh, pada 17 Januari 1607 Sultan Ali Riayat Syah (1604-1607) menandatangani suatu perjanjian dengan pihak Kompeni Belanda (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*), yang diwakili oleh Laksamana Muda Oliver van de Vivere.⁵⁸ Ada sebelas ketentuan yang telah dirumuskan dalam perjanjian itu, yang secara garis besarnya sangat menguntungkan pihak Kompeni Belanda.⁵⁹ Menurut J. K. J. De Jonge, perjanjian ini tidak pernah dilakukakan di tempat-tempat lain di Indonesia pada waktu itu, dan seandainya perjanjian tersebut benar-benar terlaksana, maka pusat kedudukan Belanda di Hindia Timur (Indonesia), mungkin tidak pernah didirikan di Batavia.⁶⁰ Ketika Iskandar Muda menjadi Sultan, perjanjian tersebut tidak diakuinya lagi, sehingga semua ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian itu tidak jadi terlaksana. Dalam hal ini Sultan Iskandar Muda berbeda dengan tindakan Sultan sebelumnya. Iskandar Muda menyadari adanya keuntungan-keuntungan yang akan didapat dengan kehadiran pedagang-pedagang bangsa Belanda atau pedagang-pedagang asing lainnya ke Aceh sebagai pembeli lada dan barang-barang dagangan lainnya. Iskandar Muda ingin mendapatkan keuntungan dengan hadirnya mereka ke Aceh. Itulah salah satu sebab mengapa ia tidak mau mengesahkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Sultan sebelumnya dengan pihak Kompeni Belanda.

Tindakan Sultan Iskandar Muda selanjutnya adalah mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada yang sebelumnya terpecah sebagai akibat adanya pertengkaran antar saudara di kerajaan Aceh. Sesudahnya ia mulai melanjutkan lagi ekspansi-ekspansi yang pernah dilakukan oleh Sultan Alauddin al Kahhar, ke daerah-daerah tetangga sekitarnya. Dari tahun 1612-1621, Sultan Iskandar Muda telah berhasil menaklukkan sejumlah kerajaan di sekitar Selat Malaka dan pantai bahagian Timur dan Barat pulau Sumatera. Dalam hal ini Nuruddin ar-Raniry telah memberikan daftar nama-nama daerah/negeri yang telah berhasil ditaklukan oleh Sultan Iskandar Muda.⁶¹ Dalam tahun 1612 kerajaan Deli (Aru) yang telah

melepaskan diri dari pengaruh Aceh (sejak Sultan alaudin Riayat Syah Al Mukammil memerintah) oleh Iskandar Muda dimasukkan kembali ke dalam pengaruh Aceh. Kerajaan Johor di Semenanjung tanah Melayu ditaklukkan kerajaan Pahang pada tahun 1618, Kedah dalam tahun 1619, Perak dalam tahun 1602 dan Nias dalam tahun 1624. Augusti de Beaulieu juga telah menyebutkan sejumlah daerah di Pantai bahagian Barat pulau Sumatera yang berada di bawah pengaruh Sultan Iskandar Muda.⁶² Daerah-daerah itu ialah Labo, Singkel, Barus, Batanghari, Passaman, Tiku, Pariaman. Padang dan Sileda. Sesuai dengan nama kerajaan-kerajaan yang berhasil ditaklukkannya, Iskandar Muda menggelar dirinya sebagai raja Aceh, raja Deli, raja Johor, raja Pahang, raja Kedah, raja Perak, raja Barus, raja Passaman, raja Tiku, raja Sileda dan raja Pariaman.⁶³ Selain gelar-gelar tersebut di atas, Iskandar Muda di Aceh dikenal dengan gelar *Meukuia Alam* atau Mahkota Alam. Gelar ini didapatkan setelah ia berhasil menaklukkan beberapa kerajaan atau negeri di sekitarnya seperti tersebut di atas.

Di daerah-daerah takluk, khususnya di bagian Barat pantai Sumatera, Iskandar Muda menjalankan suatu sistem monopoli dalam bidang perdagangan atas hasil-hasil bumi berharga dari daerah itu. Hal ini dilakukan oleh Iskandar Muda sesuai dengan tujuan ekspansi yang dilakukannya, yakni untuk kepentingan ekonomi. Hasil-hasil bumi yang berharga dari daerah-daerah itu seperti lada, timah, minyak tanah, emas, sutera, kemenyan dan kapur barus hanya dia dan wakil-wakilnya yang telah ditetapkan yang berhak memperdagangkannya kepada pedagang-pedagang asing. Dari semua barang dagangan ini ladalah yang merupakan barang dagangan utama kerajaan Aceh. Pedagang-pedagang asing yang ingin berdagang di daerah takluk Aceh, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Sultan Iskandar Muda. Khusus di pelabuhan-pelabuhan pantai Barat Sumatera yang berada di bawah kuasa kerajaan Aceh, Iskandar Muda menggunakan kekuasaannya untuk membeli sejumlah lada dengan harga yang murah. Setelah lada ini dibawa ke ibukota kerajaan Aceh, di sana dijual kepada pedagang-pedagang asing, khusus pedagang-pedagang bangsa Barat dengan harga yang tinggi. Pengangkutan-pengangkutan lada dari pantai Barat Sumatera ke ibukota kerajaan Aceh dilakukan di bawah pengawasan Sultan

Iskandar Muda atau para wakilnya. Aceh sendiri pada masa itu menghasilkan sedikit lada, artinya tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan saudagar asing yang makin lama semakin banyak datang berdagang ke Aceh.⁶⁴

Pedagang-pedagang asing yang datang berdagang ke Aceh disambut oleh Iskandar Muda secara baik. Ia sangat menginginkan agar mereka datang dan berdagang di Aceh, tetapi ia sama sekali tidak mau memberikan konsepsi-konsepsi khusus kepada mereka, tapa menguntungkan pihaknya. Kepada para pedagang asing, khususnya pedagang-pedagang Barat, diizinkan berdagang di Aceh hanya dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda, misalnya kepada pedagang asing yang membayar pajak. Dan bagi mereka yang ingin berdagang langsung ke daerah-daerah takluk Aceh terlebih dahulu harus ada lisensi dari Iskandar Muda. Setiap lisensi yang diberikan, mempunyai batas waktu tertentu. Bila waktunya telah habis dan pedagang-pedagang itu ingin memperpanjangnya lagi, maka mereka harus datang kembali kepada Sultan di ibukota kerajaan Aceh. Mereka yang menginginkan lisensi harus memberikan hadiah-hadiah kepada Sultan Iskandar Muda. Mereka tidak akan diberi lisensi atau izin bagaimanapun jenisnya tanpa suatu hadiah tertentu yang dipersembahkan untuknya.⁶⁵ Bila pedagang-pedagang asing datang ke Aceh dengan mempersembahkan hadiah-hadiah dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan, maka mereka akan disambut baik oleh Sultan Iskandar Muda. Dan kepada mereka yang menginginkan lisensi dagang pada umumnya akan diberi, agar dapat digunakan di daerah takluk Aceh.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh sikap Sultan Iskandar Muda ketika didatangi oleh pedagang-pedagang asing, khususnya pedagang-pedagang dari Eropa. Dalam bulan April 1613, beberapa pedagang berbangsa Inggris dibawah pimpinan Thomas Best dengan dua buah Kapal yang bernama "Dragon" dan "Hosiander" datang di pelabuhan Aceh.⁶⁶ Thomas Best membawa serta hadiah-hadiah dan sebuah surat dari Raja James I (Inggris) untuk Iskandar Muda mau memberi izin kepada pedagang-pedagang Inggris untuk dapat berdagang di pelabuhan Aceh yang khusus

disediakan untuk orang-orang asing. Iskandar Muda dalam menyambut Thomas Best mengadakan suatu resepsi, seperti yang pernah diberikan oleh kakeknya Sultan Alaudin Riayat Syah Al Mukammil kepada Sir James Lancaster pedagang berbangsa Inggris yang pertama datang berdagang ke Aceh.⁶⁷ Kepada Thomas Best oleh Iskandar Muda diberikan lisensi dagang untuk digunakan di Pariaman dan Tiku. Lisensi ini digunakannya supaya para wakil Sultan Aceh di sana dapat menerima pedagang-pedagang ini untuk mendapatkan atau membeli lada.⁶⁸ Maksudnya mereka dapat dengan bebas membeli lada di daerah itu. Selain itu Iskandar Muda juga memperkenalkan pedagang-pedagang Inggris ini untuk mendirikan sebuah kantor dagang mereka di ibukota kerajaan Aceh.⁶⁹ Kepada Thomas Best pribadi diberikan pula suatu kehormatan dari kerajaan Aceh, yaitu dia telah diangkat menjadi bangsawan Aceh dengan gelar "Orang kaya Puteh". Ini merupakan suatu anugerah yang di kemudian hari masih dilanjutkan oleh Sultan-Sultan Aceh kepada orang-orang asing berkulit putih lainnya.⁷⁰ Pemberian gelar kepada Thomas Best ini didasarkan atas jasanya yang telah merebut sebuah kapal Portugis di perairan Aceh dan kapal yang direbut itu oleh Thomas Best diberikan kepada Sultan Iskandar Muda.⁷¹ Setelah beberapa lama berada di ibukota kerajaan Aceh, rombongan Thomas Best melanjutkan pelayaran mereka ke pantai bagian Barat Sumatera. Pada bulan Agustus 1613 rombongan ini dengan kapal-kapalnya tiba di pelabuhan Tiku. Mereka ini merupakan rombongan pedagang bangsa Inggris pertama yang datang ke sana dengan membawa lisensi dari Sultan Iskandar Muda. Penguasa Tiku menyambut kedatangan Thomas Best dan kawan-kawannya dengan suatu upacara resmi. Lisensi yang diberikan Iskandar Muda dibacakan di hadapan khalayak ramai dan para pedagang setempat yang telah berkumpul di sana.⁷² Hingga tahun 1614 pedagang-pedagang Inggris ini telah dapat mengangkut lada dari pantai Barat Sumatera hampir mencapai 1500 bahar⁷³, atau 255.000 kg.

Dengan pedagang-pedagang bangsa Belanda hubungan Iskandar Muda pada mulanya tetap baik, meskipun Iskandar Muda pernah membatalkan sebuah perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Sultan Aceh sebelumnya dengan pihak Kompeni Belanda. Iskandar Muda masih mengizinkan mereka mempunyai sebuah kantor dagang

di ibukota kerajaan Aceh, tetapi mereka harus membayar pajak kepada Sultan Aceh. Oleh karena peraturan yang tegas dari Iskandar Muda menyebabkan pedagang-pedagang Belanda kurang menampakkan keaktifan mereka dalam melakukan perdagangan dengan Aceh. Begitu pula kapal-kapal mereka lama tidak muncul berlabuh di ibukota kerajaan Aceh. Pihak Belanda hampir memutuskan hubungan dagangnya dengan kerajaan Aceh itu bila mereka tidak mempertimbangkan bahwa untuk merebut Malaka dari Portugis mereka tidak dapat meninggalkan Aceh begitu saja.⁷⁴ Hal ini membuat Iskandar Muda kurang menaruh perhatian kepada para pedagang Belanda. Iskandar Muda mulai menaruh perhatian lagi tatkala sebuah kapal dagang mereka pada bulan Oktober 1614 muncul di pelabuhan Aceh.⁷⁵ Kapal dagang Belanda ini dipimpin oleh Hans de Hase. Tujuan mereka datang ke Aceh untuk berdagang dan untuk memeriksa kantor dagang mereka yang sudah lama mereka tinggalkan di Aceh. Kepada Sultan Iskandar Muda pribadi Hans de Hase mempersembahkan hadiah-hadiah berharga, begitu pula kepada pembesar-pembesar kerajaan Aceh lainnya.⁷⁶

Dalam suatu pertemuan dengan para pedagang Belanda yang dipimpin oleh Hans de Hase, Sultan Iskandar Muda meminta agar pihak Belanda bersedia membantu Aceh dengan sebuah kapal dalam rangka penyerangan Aceh terhadap Malaka-Portugis. Pada mulanya Belanda menyatakan kesediaannya memenuhi permintaan Iskandar Muda, tetapi setelah sampai pada waktunya Aceh menyerang Malaka, Belanda ingkar akan janjinya, padahal untuk rencana penyerangan tersebut Iskandar Muda benar-benar telah menyiapkan sebuah armada yang cukup besar ukuran masa itu (tahun 1615). Karenanya Sultan Iskandar Muda menjadi marah kepada pedagang-pedagang Belanda lainnya dalam bulan Agustus 1615 datang ke Aceh, Iskandar Muda menangkap seorang dari mereka, yakni yang bernama Simon Rijser, kemudian memerintahkan agar diinjak oleh seekor gajah.⁷⁷ Selanjutnya karena merasa tidak menguntungkan berdagang di Aceh, ditambah lagi dengan kekerasan sikap Sultan Iskandar Muda terhadap mereka, maka pada bulan Maret 1616, Belanda terpaksa menutup kantor dagang mereka di Aceh.⁷⁸

Meskipun dengan kasus di atas, sebenarnya Sultan Iskandar Muda masih menginginkan pedagang-pedagang Belanda berdagang

di Aceh. Hal ini dapat dilihat ketika pada akhir tahun 1616, Cornelis Mommans pedagang bangsa Belanda lainnya datang ke Aceh, ia diterima oleh bawahan Sultan Iskandar Muda secara baik. Iskandar Muda sendiri pada saat itu dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat menerima sendiri kedatangan pedagang bangsa Belanda tersebut. Tetapi setahun kemudian ketika Cornelis Commans kembali datang ke Aceh dengan membawa hadiah-hadiah kepada Sultan Iskandar Musa, ia diterima secara baik oleh Sultan Iskandar Muda dan kemudian ia diperkenankan untuk berdagang di daerah takluk Aceh, yakni di Tiku selama 2 tahun.⁷⁹

Pedagang berbangsa Barat lainnya yang datang ke Aceh untuk berdagang yang diterima dengan baik pula oleh Iskandar Muda ialah Augustin de Beaulieu. Ia datang ke Aceh bersama rombongannya dengan menggunakan tiga buah kapal, masing-masing bernama "de Montmorence", de Esperance" dan "Hermitage. 80 Pada tahun 1621 mereka tiba di pelabuhan ibukota kerajaan Aceh. Augustin de Beaulieu membawa serta hadiah-hadiah yang menarik serta sebuah surat yang katanya berasal dari Raja Perancis untuk Sultan Iskandar Muda.⁸¹

Kepada Augustin de Beaulieu oleh Iskandar Muda diberikan penghormatan yang semestinya dan izin-izin istimewa untuk dapat dengan bebas melihat-lihat situasi ibukota kerajaan Aceh dan di istana Sultan khususnya. Beaulieu mengharap agar ia diberi lisensi supaya dapat bebas berdagang di Aceh dan di daerah taklukan Sultan tersebut. Tetapi sampai beberapa lama ia berada di Aceh, Iskandar Muda belum memberikan izin tersebut kepadanya. Rupa-rupanya Iskandar Muda sangat berhati-hati untuk mengizinkan Augustin de Beaulieu berdagang secara bebas di Aceh dan di daerah-daerah takluknya. Hal ini disebabkan karena pedagang-pedagang berbangsa Belanda banyak mengangkut lada secara diam-diam dari pantai Barat Sumatera, sehingga lada yang sampai di Aceh yang diperdagangkan oleh Iskandar Muda menjadi semakin berkurang. Maka datangnya pedagang-pedagang Perancis ke Aceh, memberi kesempatan kepada Iskandar Muda untuk meningkatkan atau menaikkan harga lada setinggi mungkin.⁸² Setelah enam bulan lebih Augustus de Beaulieu dan rombongan berada di ibukota kerajaan Aceh, ia

berhasil mendapatkan sejumlah lada di sana. Oleh karena Augustin de Beaulieu sudah cukup lama berada di Aceh, lagi pula ia telah membeli sejumlah lada, maka akhirnya Iskandar Muda memberikan juga lisensi dagang kepadanya untuk dipergunakan di pealbuhan lada di pantai Barat Sumatera. Di sana ia membeli lagi sebanyak sisa muatan kapal-kapalnya.⁸³ Dalam hal ini Iskandar Muda pada mulanya sengaja memberikan Augustin de Beaulieu lama tinggal di Aceh supaya ia banyak membeli lada di sana, karena harga lada di ibukota kerajaan Aceh lebih tinggi dari pada di pantai Barat Sumatera. Dengan penjualan lada di ibukota kerajaan lebih banyak dari pada di pantai Barat Sumatera.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Sultan Iskandar Muda ikut aktif dalam perdagangan, khusus perdagangan lada. Dengan bertambahnya permintaan akan lada maka harganya makin menjadi naik. Jika sebelum kedatangan bangsa Barat ke Aceh, harga lada sekitar 8 rial per bahar (1 bahar $\pm$ 375 lbs. Inggris), maka setelah kedatangan bangsa Belanda dan Inggris harganya naik menjadi 20 rial per bahar. Dengan datangnya pedagang-pedagang bangsa Perancis ke Aceh pada tahun 1621, harga lada naik lagi sampai mencapai 48 rial per bahar; ini baru harga di pantai Barat Sumatera,⁸⁴ sedang di ibukota kerajaan Aceh pada saat yang sama, harga lada bisa mencapai 64 rial per bahar.⁸⁵

Guna mengumpulkan lada sebanyak mungkin di ibukota kerajaan Aceh, Iskandar Muda memerintahkan kepada para wakilnya yang berada di pantai Barat Sumatera untuk mengumpulkan lada di sana. Dan kemudian mengangkutnya ke Aceh, melalui jalan laut. Jumlah lada yang dihasilkan tiap-tiap tahun di pantai Barat Sumatera diperkirakan sebanyak 50.000 karung.⁸⁶ Dan menurut perkiraan, Sultan Iskandar Muda mengangkutnya ke ibukota kerajaan Aceh sebanyak 16.000 karung, tiap karung beratnya 60 lbs), jadi jumlah total 690.000 lbs,⁸⁷ atau 43.584 lbs kg.

Di ibukota kerajaan Aceh lada dijual oleh Sultan Iskandar Muda dan para wakilnya kepada pedagang-pedagang asing. Yang menetapkan harga lada adalah Sultan Iskandar Muda sendiri. Seperti telah disebutkan di atas bahwa harga lada di ibukota kerajaan Aceh lebih mahal dari pada harga di pantai Barat Sumatera. Pada

umumnya harga lada yang ditetapkan Sultan Iskandar Muda ini tidak sama. Untuk setiap pedagang-pedagang India, Arab, dan Melayu, harga lada ditetapkan jauh lebih murah daripada kepada para pedagang berbangsa Eropah. Selisihnya sangat menyolok, kadang-kadang sampai 200%.⁸⁸ Selain itu juga ditetapkan agar pedagang dari Gujarat dan Arab diberi kesempatan untuk dapat membeli lada terlebih dahulu.⁸⁹ Hal-hal ini di atas sebenarnya sangat membuat iri pedagang-pedagang Eropa, tetapi karena mereka sangat membutuhkan lada untuk dibawa ke Eropa maka terpaksa membeli juga. Mengenai adanya perbedaan harga ini mungkin Sultan Iskandar Muda memandang pedagang-pedagang India, Gujarat, Arab dan Melayu, sebagai pedagang-pedagang yang telah lama berhubungan dengan kerajaan Aceh, dan tentunya mereka lebih akrab hubungannya dengan Sultan Iskandar Muda.

Untuk menghadapi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Iskandar Muda yang kurang menguntungkan mereka, pedagang-pedagang Belanda dan Inggris pada tahun 1619 mengadakan suatu perjanjian. Dalam perjanjian itu diputuskan agar mereka bersamasama memaksa Sultan Iskandar Muda, supaya memberi izin kepada mereka untuk melakukan perdagangan secara bebas dan langsung pelabuhan-pelabuhan dengan pelabuhan di pantai Barat Sumatera.⁹⁰ Kabar mengenai maksud pedagang-pedagang Inggris dan Belanda itu tidak menyenangkan Iskandar Muda karena jika hal tersebut dipenuhi tentu pedagang-pedagang itu tidak akan berusaha lagi untuk saling bersaing dan pemberian-pemberian hadiah untuknya juga akan terhenti. Maka Iskandar Muda menolak permintaan pedagang-pedagang Belanda dan Inggris tersebut. Ia bahkan memperlihatkan keberaniannya dengan menyebut mereka "pengemis" yanga tidak tahu malu.⁹¹ Bila mereka kurang senang dengan aturan-aturan yang ditetapkan olehnya, atau kalau mereka sedang mencari-cari alasan untuk berperang dengan Aceh, Iskandar Muda telah siap untuk menghadapi mereka.⁹² Dari peristiwa di atas dapat diketahui bagaimana sikap Sultan Iskandar Muda dalam menghadapi pedagang-pedagang Belanda dan Inggris yang datang ke kerajaan Aceh.

Iskandar Muda berusaha memonopoli seluruh perdagangan lada di pantai Barat Sumatera yang termasuk daerah takluknya.

Tetapi sistem monopolinya yang dijalankan di sana tidak seluruhnya berhasil. Hal ini disebabkan karena banyak penyelewengan yang dilakukan oleh penduduk setempat dan oleh para wakilnya disana.

Caranya dengan menjual lada secara sembunyi-sembunyi kepada para pedagang asing dan keuntungannya diambil untuk mereka sendiri.⁹³ Yang mendorong penduduk setempat melakukan perdagangan lada secara sembunyi-sembunyi adalah karena sistem monopoli yang dijalankan Sultan Iskandar Muda itu hanya menguntungkan pihak Aceh saja dan merugikan penduduk setempat.⁹⁴ Adanya perdagangan lada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini mengakibatkan kurangnya jumlah lada yang diangkut ke Aceh pada setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa tindakan, yaitu dengan melarang pedagang-pedagang asing mendirikan kantor dagang mereka di pelabuhan-pelabuhan pantai Barat Sumatera yang di bawah kuasa Aceh. Semua perdagangan lada hanya berlangsung atau desentralisasi di ibukota kerajaan Aceh saja.⁹⁵ Selain itu Iskandar Muda juga mengirimkan *Panglima*⁹⁶ nya, ke pantai Barat Sumatera, seperti ke Tiku, Pariaman dan tempat-tempat lain untuk menggantikan para *Panglima-Nya* yang lama di sana. Para *Panglima* yang telah kedapatan penyelewengan-penyelewengan dipindahkan atau dimutasikan ke tempat lain yang jauh terpencil dari pantai Barat Sumatera.⁹⁷ Khusus di pelabuhan Tiku yang merupakan tempat penghasilan lada terbanyak bagi kerajaan Aceh, oleh Iskandar Muda diperintahkan kepada bawahannya disana, agar mendirikan sebuah benteng, dalam rangka mengawasi perdagangan lada yang dilakukan oleh penduduk setempat.⁹⁸

Mengenai larangan pendirian kantor dagang di luar ibukota kerajaan Aceh dapat dilihat ketika dalam bulan April 1615 pedagang berbangsa Inggris yang bernama Arthur Spaight datang ke ibukota kerajaan Aceh. Ia membawa serta sebuah surat dan hadiah-hadiah dari Ratu Inggris untuk diberikan kepada Sultan Iskandar Muda. Pedagang Inggris ini meminta kepada Sultan Iskandar Muda agar dia diberi izin untuk mendirikan sebuah kantor dagang pada sebuah pelabuhan di pantai Barat Sumatera yang berada dibawah kuasa kerjaan Aceh. Permohonan serupa dilakukan oleh John Millward

pedagang berbangsa Inggris lainnya yang diibukota Aceh tiga bulan setelah kedatangan Arthur Spaight/. Iskandar Muda menolak permintaan pedagang-pedagang tersebut. Mereka diperbolehkan kerjaan Aceh saja dan harus mereka laksanakan sendiri. Oleh karena permintaan mereka ditolak, maka mereka tidak berhasil mendirikan kantor dagang di Pantai Barat Sumatera, tetapi menyuap beberapa pejabat dimana mereka masih berhasil melakukan perdagangan dengan penduduk setempat.⁹⁹ Demikian pula dengan pedagang-pedagang bangsa Belanda yang sejak 1616 telah menutup kantor dagang mereka di ibukota kerajaan Aceh. Pada tahun 1621 mereka mencoba mendirikan sebuah kantor dagang baru di Padang. Iskandar Muda mengetahui maksud pihak Belanda tersebut. Maka ia memerintahkan wakilnya yang berada di sana untuk menggagalkan rencana Belanda dan pedagang-pedagang mereka yang berada di Padang disuruh pergi meninggalkan tempat itu.¹⁰⁰ Belanda terpaksa tunduk kepada keputusan Iskandar Muda di atas. Meskipun demikian mereka masih juga mendapat lada dari pantai Barat Sumatera dengan mengadakan perdagangan secara sembunyi-sembunyi dengan penduduk setempat.¹⁰¹

Seperti telah di uraikan atas, Sultan Iskandar Muda dalam mengatur pemerintahannya suatu bentuk kesatuan daerah yang disebut dengan nama *Mukim*. Pada waktu itu agama Islam sudah kuat pengaruhnya di Aceh, maka oleh Iskandar Muda diciptakan suatu kesatuan wilayah yang sesuai dengan situasi pada waktu itu, yakni dalam bentuk Mukim-Mukim yang bersifat theokratis.¹⁰² Khusus untuk di daerah Aceh Inti atau yang disebut dengan nama Aceh Besar sekarang, oleh Sultan Iskandar Muda dibangun mesjid-mesjid untuk tempat beribadah umat Islam.¹⁰³ Sebuah Mesjid yang terkenal yang dibangun itu ialah mesjid Baitur Rahman.¹⁰⁴ Dan pembangunan mesjid-mesjid ini pada waktu berhubungan erat dengan pembagian wilayah (daerah) dalam bentuk *Mukim-mukim*.

Pembentukan *mukim* oleh Sultan Iskandar Muda dimaksudkan, selain untuk kepentingan religius juga untuk kepentingan politis. Kepentingan politis di sini maksudnya untuk memudahkan di dalam mengkoordinir tenaga-tenaga tempur bila Aceh mengadakan suatu peperangan. Selain itu tentunya pembentukan *mukim* ini juga

dimaksudkan untuk kepentingan ekonomis, yaitu untuk memudahkan para *Uleebalang* memungut *wasé-wasé* (pajak-pajak) dari rakyat. Selain Mukim Sultan Iskandar Muda juga menciptakan sebuah peraturan tata cara yang berlaku di kerajaan Aceh, yaitu yang dikenal dengan nama *Adat Meukuta Alam*.¹⁰⁵ Di dalam *Adat Meukuta Alam* ini dijumpai berbagai tata cara dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kerajaan Aceh, misalnya tata cara dalam perdagangan, tata cara yang berlaku di istana Aceh, mengenai pengaturan pemerintahan dan penggunaan cap stempel kerajaan Aceh.

Mengenai cap stempel kerajaan Aceh, oleh Iskandar Muda diciptakan dalam bentuk apa yang disebut oleh orang Aceh *Cap Siekureung*. (Cap Sembilan). Di dalam stempel ini dicantumkan nama-nama Sultan yang pernah memerintah di kerajaan Aceh sebanyak 9 orang, termasuk dirinya sendiri yang ditempatkan di tengah-tengah, sedang 8 orang lainnya ditempatkan di sekelilingnya.¹⁰⁶ Sultan-sultan yang mendampinginya dalam cap stempel itu dipilih berdasarkan kemasyhurannya ataupun hendak dijadikan sebagai kenang-kenangan.¹⁰⁷ Bentuk Stempel *cap Sikureung* ini besar kemungkinan ditiru oleh Iskandar Muda dari bentuk stempel kerajaan Moghul ketika pemerintah Sultan Djahangir Khan (1605-1627).¹⁰⁸

Iskandar Muda juga mengatur pemakaian mata uang di kerajaannya. Ia mengurangi nilai emas sebenarnya dari sebuah mata uang emas (*Derham*) yang beredar di kerajaannya, yang telah digunakan pertama kali di kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah al Kahhar.¹⁰⁹ Dari sebuah mata uang emas lama atau yang disebut *Derham*, oleh Iskandar Muda dijadikan *Derham-Derham* baru sejumlah lima buah. Meskipun emas yang sebenarnya telah dikurangi, tetapi nilai peredarannya masih tetap dapat dipertahankan seperti semula.¹¹⁰

Di atas telah disinggung bahwa Iskandar Muda melakukan ekspansi ke kerajaan sekitarnya. Dalam ekspansi-ekspansi yang dilakukan ini, meskipun di dalamnya terkandung suatu kekuatan militer yang bertujuan untuk kepentingan politik, tetapi sebenarnya menjurus untuk kepentingan ekonomis, yaitu untuk mendapatkan

monopoli perdagangan di daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan-nya. Hal ini dapat dilihat apabila suatu daerah sudah berhasil ditaklukkan. Iskandar Muda menempatkan wakilnya di sana yang ditugaskan hanya untuk mengawasi perdagangannya saja; sedangkan penguasaan bidang lainnya diserahkan kepada penguasa semula dari daerah-daerah itu.¹¹¹

Dalam ekspansi-ekspansi Iskandar Muda juga dilakukan penyerangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka dan menguasai kerajaan-kerajaan yang berpotensi ekonomi di kawasan itu. Sultan Iskandar Muda khawatir terhadap kekuatan Portugis di Malaka dan kelemahan-kelemahan Sultan Melayu dalam menghadapi pihak Portugis. Oleh karenanya Iskandar Muda berusaha mengusir Portugis dari Malaka yang dianggap sebagai penghalang dan saingannya dalam menguasai perdagangan di Selat Malaka. Apalagi pihak Portugis sering mengadakan hubungan tertentu untuk mendapatkan barang-barang dagangan dan untuk mencari pengaruh atas kerajaan-kerajaan yang lemah di Semenanjung Tanah Melayu. Kerajaan Melayu yang berhubungan dengan Portugis di Malaka dimusuhi oleh Aceh. Sedangkan kerajaan-kerajaan tersebut menginginkan agar mereka bebas memperdagangkan barang-barang mereka kepada siapa saja yang mereka anggap lebih menguntungkan. Oleh karena adanya perbedaan kepentingan ini, maka timbul persaingan yang terus-menerus antara kerajaan Aceh dengan Portugis di Malaka dan dengan Kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.

Dengan alasan kerajaan Aceh sebagai kerajaan yang telah lama memeluk Agama Islam, serta dengan melihat sikap hidup orang-orang Aceh hampir menyamai sikap hidup orang-orang Arab yang keras dan bersemangat, maka J. Jongejeans dalam karyanya *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, berpendapat bahwa tujuan peperangan dan ekspansi yang dilakukan Aceh terhadap Malaka Portugis dan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu adalah untuk kepentingan Agama atau bermotifkan Agama.¹¹² Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kebanyakan kerajaan-kerajaan Melayu yang menjadi sasaran ekspansi Aceh pada waktu itu sudah menganut Agama Islam, artinya Sultan-Sultan dari kerajaan itu sudah beragama Islam. Seandainya kerajaan Aceh melihat dari segi

kepentingan Agama, maka Aceh tidak akan menyerang kerajaan-kerajaan Melayu yang sudah Islam itu. Sebaliknya mungkin kerajaan Aceh akan bersahabat dengan kerajaan-kerajaan itu untuk bersama-sama menyerang Portugis di Malaka yang bukan beragama Islam. Sultan Iskandar Muda menerima secara baik pedagang-pedagang asing yang bukan Islam yang datang berdagang ke Aceh. Pedagang-pedagang Portugispun mungkin akan diterima secara baik bila mereka datang ke Aceh dengan maksud baik, misalnya untuk berdagang. Hal ini sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan kakek Iskandar Muda dari pihak ibunya, yakni Sultan Alaudin Riayat Syah Al Mukammil.

Dengan melihat kenyataan-kenyataan di atas, maka apa yang dikemukakan oleh J. Jongejans itu adalah masih diragukan. Dalam hubungan dengan persoalan ini, Brian Harrison, salah seorang yang banyak menulis dan menyelidiki tentang sejarah Asia Tenggara, berpendapat bahwa peperangan yang dilakukan oleh Iskandar Muda dengan pihak Portugis dan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu bukanlah peperangan karena Agama tetapi peperangan untuk mendapatkan kekuasaan perdagangan di perairan Selat Malaka dan untuk menempatkan orang-orang Melayu di bawah kekuasaannya.¹¹³ Selain itu Iskandar Muda juga bercita-cita untuk menjadikan kekuasaan perdagangan kerajaan Aceh dapat seperti yang pernah dialami oleh kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka pada masa jaya-jayanya. Maka untuk mencapai cita-citanya itu Iskandar Muda bersedia berperang baik dengan Portugis maupun dengan orang-orang Melayu.¹¹⁴

Sikap Sultan Iskandar Muda dalam melakukan ekspansi kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu, tidak menandang apakah kerajaan-kerajaan itu menganut Agama Islam atau tidak. yang penting kerajaan-kerajaan itu dapat mendatangkan keuntungan perdagangan bagi kerajaan Aceh. Selain itu karena kerajaan-kerajaan itu bersahabat dengan Portugis di Malaka, atau setidaknya-tidaknya membuka kesempatan atau membiarkan pihak Portugis di kerajaannya. Hal ini memang dilakukan oleh kerajaan Johor, Pahang, Kedah dan Patani. Mereka memberi kesempatan atau membiarkan pihak Portugis berdagang di kerajaannya. Kerajaan Johor sebagai salah

satu kerajaan yang berpengaruh di Semenanjung Tanah Melayu, malah pernah mengadakan persahabatan dengan Portugis. Maka sudah semenjak abad XVI, kerajaan ini bermusuhan dengan kerajaan Aceh. Berulang kali dalam abad itu, kerajaan Johor mendapat serangan dari pihak Aceh.¹¹⁵ Kadang-kadang terjadi juga suatu hubungan baik antara kedua kerajaan itu, tetapi kemudian terjadi permusuhan lagi. Demikianlah pada masa pemerintahan Sultan Islandar Muda terjadi lagi penyerangan terhadap bagian kerajaan Johor yang bernama Batu Sawar dihancurkan oleh tentara Aceh. Sultan Johor yang sudah berusia lanjut sempat melarikan diri ke pulau Bintan, tetapi Sultan Muda yang bergelar raja Sabrang bersama keluarganya dan 22 orang Belanda yang mencoba membantu kerajaan Johor dapat ditawan oleh tentara Aceh. Mereka diangkat ke ibukota kerajaan Aceh.¹¹⁶

Raja Sabrang selama ditawan di Aceh, rupa-rupanya telah dapat meyakinkan Sultan Iskandar Muda, bahwa dia juga merupakan orang memusuhi Portugis seperti juga orang-orang Aceh, oleh karenanya Iskandar Muda menaruh kepercayaan kepada raja Sabrang dan kemudian dia dikawinkan dengan saudara perempuannya.¹¹⁷ Setelah beberapa lama di Aceh, pada bulan September 1614 raja Sabrang bersama istrinya, dikirim kembali ke Johor diantar sekitar 2000 orang Aceh. pengantar sebanyak ini dimaksudkan untuk membangun kembali ibukota kerajaan Johor yang telah hancur oleh tentara Aceh sebelumnya.¹¹⁸ Di Johor kemudian Raja Sabrang ini menjadi Sultan dengan gelar Sultan Hammat Syah. Rupa-rupanya setelah beberapa lama berada di kerajaannya, Sultan Hammat Syah kembali mengadakan hubungan atau mengadakan suatu perjanjian kerja sama ekonomi dan politik dengan pihak Portugis di Malaka yang diwakili oleh Fernando da Costa.¹¹⁹ Hal ini menimbulkan kemarahan kembali Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1615 tentara Aceh yang sudah dipersiapkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menyerang Malaka Portugis, diperintahkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menggempur kembali kerajaan Johor. Ternyata setelah tentara Aceh tiba di sana, ibukota kerajaan Johor telah dikosongkan. Sultan Hammat Syah bersama dengan sebahagian penduduknya yang mengetahui akan adanya serangan dari pihak Aceh, telah melarikan diri ke Pulau Bintan.¹²⁰ Dalam perjalanan kembali ke

Aceh, Armada Aceh ini bertemu dengan kapal-kapal orang Portugis yang dipimpin oleh Miranda dan Mendoca, sehingga terjadi pertempuran. Orang-orang Portugis dapat dikalahkan, banyak di antara mereka yang ditawan dan diangkut ke ibukota kerajaan Aceh.¹²¹

Begitu pula nasib kerajaan-kerajaan Melayu lainnya di Semenanjung Tahun Melayu, juga menjadi sasaran penaklukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda. Dengan alasan bahwa mereka sering berhubungan dengan Portugis Malaka, maka pada awal tahun 1618, Sultan Iskandar Muda mengirimkan suatu armada dengan 17.000 tentara menuju ke Kerajaan Pahang. Kotanya dihancurkan dan Sultan Pahang bersama dengan 10.000 ditawan diangkat ke Aceh.¹²² Masih dalam tahun 1618, ketika armada Aceh di depan pelabuhan Pahang dijumpai sebuah kapal "Gayyun" Portugis yang memuat 40 buah meriam. Meriam-meriam itu dirampas dan awak kapalny, ditawan, di antaranya terdapat seorang anak laki-laki yang merupakan anak penguasa Malaka.¹²³ Kemudian tentara Aceh ini pada tahun 1619 menuju ke sebelah Utara Malaka yakni di kerajaan Kedah dan Patani. Di Kedah, tentara Aceh telah merusak atau menghancurkan tanaman-tanaman lada, oleh karena itu lada di sini sering dijual kepada orang-orang Portugis. Sultan Kedah yang telah tua, bersama 4000 rakyatnya dibawa ke Aceh.¹²⁴ Pada tahun berikutnya kerajaan Perak yang banyak menghasilkan timah mengalami gilirannya. Ibukotanya dapat dikuasai dan 5000 rakyat dibawa ke Aceh sebagai tawanan.¹²⁵ Kemudian pada tahun 1635, Sultan Iskandar Muda masih melakukan suatu serangan atas kerajaan Pahang. Kota Pahang kembali dihancurkan dan rakyatnya banyak yang ditawan. Alasan penyerangan ini mungkin karena kerajaan Pahang ikut membantu Portugis ketika Aceh menyerang Malaka pada tahun 1629. Permusuhan Aceh dan Pahang baru berhenti ketika putera kerajaan Pahang didudukan sebagai Sultan di Aceh, yakni yang bergelar Iskandar Thani, sebagai pengganti Sultan Iskandar Muda.¹²⁶ Demikianlah permusuhan yang ekstrim terjadi antara kerajaan Aceh dengan kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung Tanah Melayu yang berakibat tidak saja memberi kemungkinan kepada pihak Portugis di Malaka dapat bertahan begitu lama, tetapi juga melemahkan kerajaan Aceh sendiri.

Raja atau pembesar yang dapat ditawan di kerajaan-kerajaan Melayu oleh tentara Aceh dibawa ke ibukota kerajaan Aceh. Meskipun pada mulanya mereka diperlakukan sebagai tawanan, tetapi akhirnya di antara mereka ada juga yang dikawinkan dengan keluarga Sultan Iskandar Muda. Kemudian sebagian dari mereka ada yang dikembalikan ke negerinya, dan di sana didudukkan sebagai Sultan kembali, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Iskandar Muda misalnya mereka harus tunduk di bawah pengaruh Aceh dan dilarang mengadakan hubungan dagang atau memberi bantuan berupa apapun kepada Portugis di Malaka. Begitulah Sultan Johor (Sultan Muda) yang ditawan oleh tentara Aceh dikembali ke negerinya sesudah dikawinkan dengan saudara Sultan Iskandar Muda.¹²⁷

Berikut ini akan dibicarakan pula sedikit tentang tindakan Sultan Iskandar Muda yang berhubungan dengan penambahan penduduk di kerajaannya. Bila sebuah kerajaan telah berhasil ditaklukkan, maka banyak penduduk kerajaan itu yang diangkut ke Aceh. Hal ini merupakan strategi Sultan Iskandar Muda yang memandang perlu untuk menambah penduduk kerajaannya. Mungkin hal ini dimaksudkan oleh Iskandar Muda untuk mengganti tentara-tentara Aceh yang telah tewas dalam ekspansi-ekspansi atau peperangan-peperangan yang dilakukannya ataupun dalam rangka mempersiapkan suatu serangan secara besar-besaran terhadap Portugis di Malaka. Ketika melakukan penaklukan terhadap kerajaan Johor, Pahang, Kedah, Perak dan Deli, Sultan Iskandar Muda telah mengangkat penduduk dari kerajaan-kerajaan itu ke Aceh sekitar 22.000 orang.¹²⁸ Selain yang dibawa sebagai tawanan, ada juga orang-orang dari daerah lain yang datang sendiri ke Aceh secara sukarela sebagai perantau atau pedagang. Ketika berada di Aceh mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. Sekaligus mereka berasimilasi dengan penduduk Aceh dan akhirnya merekapun menjadi orang atau penduduk Aceh.¹²⁹ Namun usaha Sultan Iskandar Muda dalam memperbanyak penduduk Aceh yang berasal dari tawanan-tawanan itu tidak mendapat pengakuan yang semestinya, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal setelah sampai di Aceh.¹³⁰

Menurut N.J. Ryan dalam bukunya *Sejarah Semenanjung Tanah Melayu*, penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan Aceh terhadap kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu, dimaksudkan pula oleh Aceh untuk memudahkan penyerangan yang akan dilakukan secara besar-besaran terhadap Malaka Portugis.¹³¹ Hal ini dimaksudkan oleh Aceh, bila mereka melakukan serangan terhadap Malaka Portugis, kerajaan-kerajaan Melayu tidak akan dapat membantu Portugis. Namun apa yang diharapkan oleh Aceh tidak terjadi. Oleh karena ketika penyerangan betul-betul sudah dilakukan oleh Iskandar Muda pada tahun 1629, kerajaan Johor, Pahang dan Patani masih juga memberi bantuan kepada pihak Portugis. Pada tahun 1615 kerajaan Aceh pernah mencoba melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka, namun karena sebelumnya Aceh telah terlebih dahulu menyerang kerajaan Johor dengan armada yang seharusnya untuk menyerang Malaka Portugis, maka penyerangan itu telah bocor di kalangan pihak Portugis,¹³² sehingga Aceh terpaksa membatalkan maksudnya itu. Meskipun demikian, ketika armada Aceh dalam perjalanan pulang kembali ke Aceh sempat juga terlibat dalam suatu pertempuran dengan kapal-kapal Portugis di dekat Malaka.

Suatu penyerangan secara besar-besaran terhadap kedudukan Portugis di Malaka, dilakukan oleh sebuah armada Aceh yang cukup besar menurut ukuran masa itu, pada tahun 1629. Dalam pertempuran itu pihak Aceh mengalami kekalahan total. Banyak tentara Aceh yang binasa dalam pertempuran itu termasuk Perdana Menterinya, sedangkan Laksamana Aceh yang cukup terkenal dalam ekspansi-ekspansi Aceh sebelumnya ke kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu dapat ditangkap oleh pihak Portugis.

Berikutnya ini akan digambarkan secara singkat mengenai jalannya peperangan yang sangat menentukan bagi kerajaan Aceh, yaitu peperangan tahun 1629 antara kerajaan Aceh (masa Iskandar Muda) dengan Portugis dan beberapa kerajaan Melayu yang membantu Portugis di Malaka.¹³³ Pada mulanya rencana Sultan Iskandar Muda untuk melakukan penyerangan terhadap Malaka Portugis pada tahun 1629 belum disetujui oleh Laksamananya yang sudah berpengalaman dalam melakukan ekspansi-ekspansi ke kerajaan-kerajaan

Melayu. Menurut Laksamana penyerangan yang akan dilakukan itu belum tepat waktunya. Ia melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila Aceh benar-benar menyerang Malaka pada waktu itu. Perdana Menteri Aceh yang waktu itu bergelar *Maharaja Seri Maharaja* mengajukan kesediaannya kepada Sultan Iskandar Muda agar dialah yang memimpin armada Aceh dalam penyerangan yang akan dilakukan terhadap Malaka Portugis. Iskandar Muda dapat menyetujuinya. Maka Perdana Menteri diangkat sebagai pimpinan armada laut Aceh, menggantikan tempat Laksamana. Meskipun demikian Laksamana diikutkan juga dalam rombongan Aceh itu, tetapi dia hanya ditugaskan untuk memimpin sepasukan kecil dari tentara Aceh. Karena Laksamana merasa disisihkan dan sikap Perdana Menteri yang angkuh dan ingin menunjukkan bahwa ia juga dapat memimpin armada laut seperti yang pernah dipimpin oleh Laksamana pada penaklukan-penaklukan ke Semenanjung Tanah Melayu, maka diantara kedua pimpinan Aceh tersebut tidak ada satu kekompakkan. Malah sebaliknya antara kedua mereka terjadi pertentangan-pertentangan.

Dengan kekuatan 250 perahu layar ditambah 47 buah kapal yang besar menurut ukuran masa itu dan dengan sekitar 20.000 tentara berangkatlah armada Aceh ini menuju ke Malaka. Pada bulan Juli 1629 mereka tiba di perairan Malaka. Dan tidak lama sesudah armada ini telah dihadang oleh angkatan laut Portugis. Yang memimpin pertahanan Portugis di Malaka pada waktu itu adalah Diogo Lopez de Fonseca. Dalam pertempuran pendahuluan itu angkatan Laut Portugis dapat dikalahkan. Laksamana yang memegang pimpinan pasukan angkatan darat berhasil mengadakan pendaratan ke pinggir kota Malaka. Beberapa tempat di luar benteng kota Malaka dapat dikuasai oleh tentara darat Aceh, di antaranya bukit S. Joao (St. John) yang terletak sangat strategis. Di sini mereka mendirikan perkemahan-perkemahan. Dari tempat-tempat tentara Darat Aceh dapat melepaskan tembakan meriam ke arah benteng Portugis yang terkenal dengan nama "A Famosa". Namun pihak Portugis terus dapat bertahan di benteng itu. Perdana Menteri yang memegang pimpinan armada laut mencoba pula mendekati benteng kota Malaka dengan memasuki muara Sungai Pongor di sebelah selatan Malaka. Ketika mereka sudah berada di sungai itu, dengan

tidak disangka-sangka muncul armada Johor, Pahang dan Patani yang berkekuatan 2.000 orang tentara untuk membantu Portugis. Kemudian muncul lagi bantuan dari pihak Portugis sendiri sebanyak 5 buah kapal perang yang dipimpin oleh Michael Pereira Botello. Bantuan kepada pihak Portugis yang datang dari laut dengan tiba-tiba ini tidak diperhitungkan oleh Perdana Menteri Maharaja Seri Hamaraja. Dalam bulan Oktober tahun itu pula tiba lagi armada Portugis dari Goa yang dipimpin oleh Nuno Alvarez Botello. Mereka semua memblokir muara tempat berada armada Aceh. Dengan adanya pemblokiran ini pihak Portugis dapat dengan mudah melakukan penyerbuan-penyerbuan terhadap armada Aceh yang berada di sungai sehingga banyak di antaranya yang tewas.

Laksamana Aceh yang memimpin tentara darat melihat saja armada Aceh yang sedang terkepung di Sungai Pongor. Dia seolah-olah membiarkan saja armada Aceh yang dipimpin oleh Perdana Menteri itu hancur dipukul oleh tentara Portugis bersama dengan sekutu-sekutunya. Botello, meminta agar armada Aceh menyerah saja kepada mereka, tetapi permintaan ini ditolak secara tegas oleh perdana menteri setelah terkepung dan bertempur beberapa lama armada Aceh tambah terdesak perdana menteri Maharaja *Seri Maharaja* mencoba dengan berbagai cara untuk menerobos blokade itu; ia menggunakan kapal-kapal yang besar yang dimiliki armada Aceh, di antaranya kapal yang bernama *Tjakra Donja*,¹³⁴ tetapi juga tanpa hasil. Makin lama makin banyak kapal Aceh yang tenggelam dan dapat dirampas oleh tentara Portugis, begitu pula tentaranya makin banyak tewas. Laksamana yang berada di darat melihat saja armada Aceh dalam kesulitan, ia tidak dapat berbuat banyak, kecuali mencoba untuk mengadakan suatu perundingan dengan Botello. Portugis bersedia berunding asalkan tentara Aceh terlebih dahulu mau membebaskan orang penting Portugis yang bernama Pedro de Abreu yang berada dalam tawanan tentara Aceh. Permintaan ini ditolak oleh Laksamana. Pada akhir Nopember 1629 Perdana Menteri *Maharaja Seri Maharaja* tewas. Pada saat itu datang lagi tentara gabungan dari Kerajaan Melayu, yang terdiri dari Johor, Pahang dan Patani dengan sekitar 100 buah perahu layar untuk menambah bantuan kepada Portugis. Tentara Aceh tambah terdesak, Pedro de Abreu terpaksa dibebaskan oleh pihak Aceh.

Laksamana meminta kelonggaran kepada pihak Portugis untuk mengundurkan diri bersama 3 buah kapal Aceh, agar dapat membawa serta sisa-sisa tentara Aceh. Permintaan ini ditolak oleh Portugis dan mereka meminta agar Laksamana dan sisa-sisa anak buahnya menyerah saja kepada mereka. Tuntutan ini ditolak oleh Laksamana. Kemudian dengan sisa anak buahnya ia mencoba melarikan diri melalui daratan, agar dapat terhindari dari tangkapan orang-orang Portugis, tetapi di daratan mereka dihadang oleh tentara Pahang. Tatkala keadaan benar-benar tidak dipertahankan lagi, maka Laksamana menyerahkan diri kepada orang-orang Portugis.

Setelah diadakan suatu perundingan antara Sultan Pahang dan orang-orang Portugis di Malaka, maka orang-orang Pahang tidak menepati janjinya kepada Laksamana Aceh. Laksamana diserahkan kepada musuh utamanya pihak Portugis. Orang-orang Portugis yang berada di Malaka begitu gembira dan menawan Laksamana Aceh yang cukup terkenal karena penaklukan-penaklukan yang pernah dilakukannya. Mereka berniat untuk membawa Laksamana ini ke Lisabon untuk dipertontonkan kepada umum di sana. Dalam perjalanan menuju ke Lisabon, Laksamana Aceh itu meninggal dunia, sehingga maksud Portugis untuk membawa Laksamana sampai ke Lisabon tidak terlaksana. Dengan meninggalnya Laksamana Aceh tersebut boleh dikatakan hampir semua tentara Aceh yang ikut dalam peperangan itu tewas, kecuali 16 orang yang kembali tiba ke Aceh. Mereka inipun sesampai di Aceh juga dibunuh, karena menyampaikan berita yang demikian buruknya kepada Sultan Iskandar Muda.

Dari uraian singkat di atas diketahui, bahwa kegagalan Aceh dalam penyerangan ke Malaka, badan Portugis mendapat bantuan, selain dari kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung juga dari pihak Portugis sendiri yang didatangkan dari Goa. Hal ini ditambah dengan tidak ada kekompakan antara kedua pemimpin Aceh yang disertai tugas untuk memimpin peperangan/penyerangan tersebut oleh Sultan Iskandar Muda. Sehubungan dengan kekalahan armada Aceh tersebut, Nugroho Notosusanto dalam bukunya *Sejarah dan Hankam* berpendapat bahwa kegagalan pihak Aceh dalam peperangan itu disebabkan karena Aceh kurang memperhitungkan strategi

dan taktik yang tepat dari peperangan tersebut, pada hal kemampuan logistik tentara Aceh dalam peperangan itu cukup besar.¹³⁵ Mengenai pertempuran tersebut, seorang pedagang bangsa Belanda di Jambi, yakni yang bernama Jan Dasterwijck, menulis kepada Direktur Jenderal van Diemen pada 15 Maret 1639, antara lain sebagai berikut:

"Vele zinj van opinie dat bijsldien den Atchijnder met 3 a 4 van onse jachten waren gesecondeert geweest (om tontet wt Goa hear aen comptste en tsecours der Jhoristen en Pataniers te beletten) Mallacca sonder twijffel geincorperert sounde hebben".¹³⁶

Tulisan yang senada juga diberikan oleh Gubernur Jendral (J. Specx), dalam laporannya kepada para pimpinan atau dewan *O.I. Compagnie* pada 7 Maret 1631 yang antara lain menulis:

"De voorige belegeringhe heeft den Conick (van Atjeh) heel secret ende buten onse als der Engelschen kennisse aengevangen, welcke hem zonder t'ontset, naer de bocemen rapporten ende opinie eenigher van daer overgecomen, oock apparent zulcx zoude hebben geluckt dat haij Malacca soude vermeestert in zinj gewelt becomen hebben, 't welck door d'ontseth van goa, daer hun de secaoursen van Pahang en Patana bij gevoecht hadden, zoo cantrarie is gesuccdeert dat alle zijne navale machth, geschut ende volck geheed verlooren ende in Portugiesen handen gavellen zijn, van welck ogeval wij hem met onse cruysende jacten (wanneer die maer wat versterckt waren gaweest) zounden hebben connen berijden, zoo den coninck ons zijn voornemen gecommuniceert ende ds versorht hade¹³⁷

Dari kedua tulisan orang Belanda di atas dapat disimpulkan bahwa, seandainya armada laut Aceh juga mendapat bantuan dari luar misalnya dengan beberapa buah kapal saja dari pihak Belanda dan juga pihak Portugis tidak mendapat bantuan dari Johor, Pahang dan Patani, mungkin Aceh tidak akan kalah dalam peperangan itu.

Akibat kekalahan dalam perang tahun 1629 itu, armada laut Aceh menjadi lemah. Dengan sendirinya pengontrolan atas daerah-daerah takluknya seperti di kota-kota pelabuna pantai Barat Sumatra di mana Aceh menjalankan sistem monopoli lada juga menjadi lemah. Begitu pula atas kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu, Aceh tidak berpengaruh lagi, kecuali kerajaan Perak. Di sana Aceh

masih bisa menguasai perdagangan timahnya. Jadi kekalahan yang diderita Aceh dalam peperangan tahun 1629 itu betul-betul merupakan satu pukulan berat bagi Aceh. Seperti yang disebutkan oleh Bernard H.M. Vlekke bahwa kekalahan armada laut Aceh dalam peperniagan dengan pihak Portugis dan sekutu-sekutunya di Malaka pada tahun 1629, merupakan titik perubahan dalam sejarah Aceh.¹³⁸ Sementara itu berangsur-angsur kegiatan kerajaan Aceh di laut mulai berkurang, sedang sebuah kekuatan baru, yakni Kompeni Belanda mulai nampak keaktifannya, terutama keaktifan dalam mencari hubungan dengan daerah-daerah takluk Aceh yang jauh dari pengawasan Aceh seperti di Johor dan di pantai bagian Barat Sumatera.

CATATAN

- 1) C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers I* (Leiden: E. J. Brill, 1893), hal. 87.
- 2) K. F. H. Van Langen, "De Inrichting van het Atjehche Staasbestuur onder het Sultanaat", *BKI*, XXXVII, (1888), hal. 390.
- 3) Th. W. Juynbol, "Atjeh", *The Encyclopedia of Islam*, Vol. I (1960), hal. 74.
- 4) K. F. H. van Langen, *op. cit.*, hal. 391.
- 5) C. Snouck Hurgronje, *op. cit.*, hal. 4.
- 6) Mengenai contoh surat pengangkatan yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda, Lihat G. L. Tichelman, "Een Atjehsche Sarakata" (Atschifir van een besluit van Sultan Iskandar Muda), *TBG* 73, (1933), hal. 368-337.
- 7) Th. Juyboll, *loc.cit.*
- 8) K. F. H. van Langen, *lo. cit.*
- 9) Lihat A. Mukti Ali, *An Introduction to the Goverment of Acheh Sultanate*. Yogyakarta : Nida, 1970). hal. 16.
- 10) J. Kreemer, *Atjeh* deel I, (Leiden : E. J. Brill, Boekhandel en Drunkkrij, 1923), hal. 9.
- 11) MS ini terdapat di perpustakaan University Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur yang belum dikatalogkan. Ditulis dengan huruf Arab berbahasa campuran Arab/Melayau dan berangka tahun 1786.

- 12) Ditranskriarkan dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia oleh Faisal M. Hasan, Mahasiswa I.A.I.N. ar Raniry Darusalam, Banda Aceh. Seperti yang telah disebutkan bahwa penulis belum mengkaji seberapa jauh autentitas dan kredibilitas sumber ini.
- 13) Yang dimaksud dengan Kanun adalah segala peraturan yang berhubungan dengan adat, lihat R.A. Hoesein Djajadiningrat, *Atjehsch Nederlansch Wookdenboek met Nederlandsch-Atjehsch Register* door GWJ Drewes deel II, (Batavia : lansdrunkkerij, 1934). hal. 662.
- 14) Naskah "Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda", hal. 75
- 15) K.F.H. van Langen, *op. cit*, hal 420
- 16) *Ibid*
- 17) *Ibid.*, hal 422
- 18) *Ibid*
- 19) Mengenai nama ini lihat Nuruddin ar Raniry, *op. cit* hal. 35
- 20) T. Iskandar, "De Hikajat Atjeh", VKI XXVI (s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1985), hal. 46.
- 21) Lihat H.K.J. Cowan, *De Hikajat Malem Dagang* ('s-Gravenhage : uitgegeven door het Koninklijk Institut voor Taal-Land Volkenkunde van Nedherlandsch-Indie 1937).
- 22) P.J. Veth, *op. cit.*, hal. 74
- 23) Lihat Syed Muhammad Naguib Al-Attas, "Raniri And The Wujudiyah of 17th Century Aceh", *Monographs of the Malaysian Branch Royal Asiatic Society III*, (Singapore: Malaysia Printers LTD., 1966), hal. 11.
- 24) T. Iskandar, *loc. cit.*,
- 25) C. Snouck Hurgronje, *op. cit.*, hal. 130. lihat juga G.L. Tichelman *op. cit.*, hal 370.
- 26) G.L. Tichelman, *Ibid.* 268.
- 27) MS, University Kebangsaan Malaysia yang belum dikatalogkan. Lihat juga "Kaum Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda", hal. 76

- 28) *Ibid.* hal 75
- 29) *Ibid*
- 30) Mengenai hak-hak istimewa yang dipunyai Sultan Iskandar Muda, lihat misalnya R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critisch *op. cit.*, hal 77.
- 31) Nuruddin ar-Raniry, *loc.cit*
- 32) Lihat laporan perjalanan Augustin de Beaulieu. Dalam J. Jacob *op.cit.*, hal 234-245.
- 33) T. Iskandar, *op.cit.*, hal 43.
- 34) Nuruddin ar-Raniry, *op.cit.*, hal 36
- 35) *Ibid*
- 36) Syed Naguib Al-Attas, *loc.cit.*
- 37) Lihat T. Braddel, *op cit.*, hal 19.
- 38) Richard Winstedt, "Note on the History of Kedah", dalam *Journal of The Royal Asiatic Society Malayan Branch*, disingkat JMBRAS Vol. XIV Part III, (Singapore: 1936), hal. 157.
- 39) Laporan perjalanan Agustin de Beaulieu, *op.cit.*, hal. 251.
- 40) Lihat A.J.A. Gerlach, *op.cit.*, hal. 40.
- 41) Laporan perjalanan Agustin de Beaulieu, *op.cit.*, hal. 252.
- 42) A.J.A. Gerlach, *loc.cit*
- 43) *Ibid.* Ini mungkin merupakan penggunaan minyak tanah yang pertama kali di Indonesia dalam suatu peperangan.
- 44) P.J. Veth, *op.cit.*, hal. 55
- 45) Lihat Adat Meukuta Alam, dalam K.F.H. van Langen, *op cit.*, Hal 493.
- 46) Laporan perjalanan Augustin de Beaulieu. *loc.cit.*,
- 47) *Ibid.*, hal 253.
- 48) Lihat Adat Meukuta Alam, *loc.cit.*
- 49) Laporan Perjalanan Agustin de Beaulieu, *op.cit.*, hal. 254.
- 50) *Ibid.*, hal. 241.
- 51) *Ibid.*,

- 52) Lihat A.J.A. Gerlach, "Leestafel", H. Yule, "*On North Sumatra and especially Achin*", BKI, hal. 72
- 53) *Ibid*
- 54) Laporan perjalanan Agustin Beaulieu, *op.cit.* hal. 242.
- 55) Arun Kumar, Das Gupta, "Acheh in Indonesia Trade and politics : 1600-1614", unpublished Ph. D. Thesis, (Cornell University, 1962), hal. 108.
- 56) J.C. Van Leur, *Indonesian Trade And Society* (Bandung, 1960), hal. 176.
- 57) R.O. Winstedt, *A History of Malaya*, (Kuala Lumpur : Marican & Sons, 1968), hal. 86.
- 58) Peiter van Dam, *Beschrijving van de oost Indesche Compagnie*, deel I, ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1931), hal. 260.
- 59) Isi perjanjian ini selengkapnya dapat dilihat antara lain dalam J.K.J. De Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch Gezeag in Oost-Indie*, dell III, ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1865), hal. 223-225.
- 60) *Ibid.*, hal 51.
- 61) Nuruddin ar-Raniry, *op-cit.*, hal 35.
- 62) Laporan perjalanan Agustin de Beaulieu, *op.cit.*, hal. 238.
- 63) "Translation of The Annal of Acheen", JIAEA, vol. V. (1851), hal. 603.
- 64) Pieter dam, *op.cit.*
- 65) Laporan perjalanan Agustin De Beaulieu, *op.cit.*, hal. 254.
- 66) C.A. Gibson Hilla, "On the Alleged Death of Sultan Alauddin of Johor at Acheh in 1913" *JMBRAS*, vol XXIX part I, (May 1956), hal. 127.
- 67) Arun Kumar, Das Gupta, *op.cit.*, hal 130.
- 68) P.A. Tiele, "De Europeers in de Maleische Archipel", BKI XXXV, (1886), hal. 302.
- 69) "Translation of Annal of Acheen", *loc.cit.*
- 70) T. Iskandar, *op.cit.* hal. 43.

- 71) C.A. Gibson Hill, "Raffles, Aceh and Order of the Golder Sword",. *JMBRAS*, vol. XXIX part I, (May 1956), hal. 6.
- 72) A. K. Das Gupta, *op.cit.*, hal. 134.
- 73) Lihat B.J.O. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, (Bandung, 1960), hal. 53.
- 74) A.J.A Gerlach, *op.cit.*, hal 38.
- 75) P.A. Tiele, *op.cit.*, hal 304.
- 76) *Ibid*
- 77) *Ibid.*, hal 305.
- 78) P.J. Veth, *op.cit.*, hal 75.
- 79) P.A. Tiele, *op.cit.*, BKI 36 (1887), 224.
- 80) Lihat laporan perjalanan Agustin sw beaulieu ke Aceh, *op cit.*, hal 221.
- 81) Sebenarnya surat yang diberikan kepada Iskandar Muda tersebut, bukanlah surat asli dari Raja Perancis tetapi yang disusun sendiri oleh Agustin de Beaulieu, *Ibid.*, hal 223.
- 82) *Ibid.*, hal 28.
- 83) *Ibid.*, hal 236.
- 84) Pieter van Dam, *loc.cit*
- 85) A.J.A. Gerlach, *op.cit.*, hal. 39.
- 86) J.C. Van Leur, *op.cit.*, hal 171.
- 87) A.k. Das Gupta, *op.cit.*, hal 103.
- 88) J. Kroeskamp, *De Westkust en Minangkabau*, (Utrecht Scotanus & Yens, 1931), hal 13.
- 89) J.C. Van Leur, *op.cit.*, hal 110.
- 90) B.J.O. Schrieke, *op.cit.*, hal 54.
- 91) P.A. Tiele, *op.cit.*, hal 245.
- 92) *Ibid.*
- 93) *Ibid.*, BKI (1886), hal 304.
- 94) Lihat J. Langhout, *Economische Staatkunde in Atjeh*, (Den Haag : W.P. Stockkum & Zoon, 1923), hal.9.

- 95) P.A. Tiele, *loc.cit.*
- 96) Yang dimaksud dengan Panglima di sini, ialah yang mewakili kekuasaan Sultan Aceh di Daerah takluknya lihat J.C. Van Leur, *op.cit.*, hal 368.
- 97) Kroeskamp, *op.cit.*, hal 16.
- 98) B.J.O. Schrieke, *op.cit.*, hal 16.
- 99) P.A. tiele, *loc.cit.*
- 100) P.J. Veth, *loc.cit.*
- 101) P.A. Tiele, *loc.cit.*
- 102) K. F. H. Van Langen, "*DE Inriscthing van het Athehsche Staabestuur order het Sultanaat*", BKI XXXVII, 37 (1988), hal 390.
- 103) *Ibid*
- 104) T. Iskandar, *op.cit.*, hal 45.
- 105) *Adat Meukuta Alam*, lihat K.F.H. van Langen, *op.cit.*, hal. 436-442.
- 106) G. P.Raouffaer, "De Hindoestansche Oorsprong van het "Negenvoudig", Sultas Zagel van Atheh", BKI 59, (1906), hal. 350).
- 107) *Ibid*
- 108) *Ibid.*, hal. 380.
- 109) T. Iskandar, *loc.cit.*
- 110) K.F.H. Van Langen, *op.cit.*, hal 430.
- 111) Lihat M.D. Mansoer (et.al), *Sedjarah Minangkabau*, (Djakarta: Bhatara, 1970), hal 81.
- 112) J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh vroegeren Nu*, (Baarn: Holandia Drunkkerrij, tanpa angka tahun), hal 13.
- 113) Brian Harisson, *South East Asia A Short History*. (London Micmilan & Co Ltd. 1957), hal 82.
- 114) *Ibid*
- 115) Lihat. B.J.O. Schrieke, *op.cit.*, 54.
- 116) P.A. Tiele, *op.cit.*, hal 303.

- 117) C. H. Gibson Hilla, "on the Alleges Death ..., *op.cit.*, hal. 129.
- 118) P.A. Tiele, *loc.cit.*
- 119) *Ibid.*, hal. 307
- 120) R.A. Hosein Djajadiningrat, "Critische Overzieth *op.cit.*, hal. 180.
- 121) *Ibid*
- 122) W. Linehan, "History of Pahang", *JMBRAS* (Mei 1936), hal. 36.
- 123) P.A. Tiele, *op.cit.*, *BKI*, hal. 247.
- 124) *Ibid*
- 125) *Ibid*
- 126) W. Lenehen, *op.cit.*, hal 37.
- 127) P.A. Tiele, *op.cit* *BKI* (1886), hal 303.
- 128) W. Lenehan, *op.cit.*, hal. 36
- 129) Lihat Mohd. Said "Wadjah Rakjat Atjeh Dalam Lintasan Rangka Sedjarah", Prasaran pada *Seminar Kebudayaan Dalam Rangka P.K.A. II Dan Dies ke XVI Universitas Syiah Kuala*, (Banda Atjeh : Panitia Pusat Pekan kebudayaan Atjeh ke li, 1972, hal. 16.
- 130) W. Linehan. *loc.cit.*
- 131) N.J. Ryan, *Sejarah Semenanjung Tanah Melayu*, (Kuala Lumpur :Oxford University Press, 1966, 1966), hal 45 55.
- 132) P.A. tiele, *op.cit.*, hal 3060-307
- 133) Uraian tentang jalannya pertempuran atau peperangan ini, menulis mendasarkan antara lain pada T. Iskandar, *op.cit.*, hal 47-48, R.A. Hoesien Djajadiningrat, *op.cit.*, hal 180-181. Nuruddin ar-Raniry, *loc.cit.*, P.J. Veth, *op.cit.*, hal 74. Mohd. Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, (Medan diterbitkan oleh pengarang sendiri 1961). hal 169-173. R.O. Winstedt, *A. History of Malaya* (Kuala Lumpur : Singapore Maricall & Sons, 1968), hal 86.

- 134) Mengenai asal-usul nama *Tjakra Donja* lihat dalam G. L. Yicheman. "Tjakra Donja", *De Indesche Gids* 61, (amsterdam : 1939), hal. 23-27.
- 135) Nugroho Notosusanto, *Sedjarah Dan Hankam*, (Djakarta : Departemen Pertahanan Kemanan, Lembaga Sedjarah Hankam, 1968), hal .52.
- 136) T. Iskandar, *op.cit.*, hal. 49.
- 137) *ibid.*
- 138) Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara a History of Indonesia* ('s-Gravenhage: N.V. Uitgeverij W.P. van Hoeve, 1959). hal. 122

BAB V

AKHIR PEMERINTAHAN SULTAN ISKANDAR MUDA

Penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda terhadap kerajaan Pahang pada tahun 1618 oleh Nuruddin ar Raniry dalam karyanya *Bustanus Salatin* disebutkan sebagai suatu hikmah Allah untuk menganugerahkan kerajaan Aceh kepada Sultan Iskandar Thani Alaudin Mughayat Syah.¹ Iskandar Thani adalah Putra Sultan Pahang yang dilahirkan pada tahun 1611. Ia dibawa ke Aceh bersama-sama dengan sebageian rakyat Pahang yang ditawan oleh tentara Aceh dalam rangka memperbanyak penduduk kerajaan Aceh oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1618.² Jadi ketika itu ia berumur 7 tahun. Dengan ilmu firasat yang dipunyainya, Iskandar Muda melihat tanda-tanda kebahagiaan pada wajah anak Sultan Pahang itu.³ Maka Iskandar Muda mengangkatnya sebagai anak dengan diberi gelar Raja Bungsu. Di Aceh ia diasuh oleh seorang kerabat istana Aceh yang bernama Nenda Tun Kemala Setia.⁴ Ketika berumur 9 tahun Raja Bungsu dinikahkan dengan anak perempuan Sultan Iskandar Muda yang bernama Seri Alam Permaisuri. Kepada menantunya ini Iskandar Muda memberikan gelar baru Sultan Husein Syah. Kemudian dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Syamsuddin Pasai, Kadli Mallikul Adil dan para pembesar kerajaan Aceh lainnya. Sultan Iskandar Muda menunjuk Sultan Husein Syah sebagai calon penggantinya untuk memangku jabatan Sultan Aceh dengan diberi gelar Sultan Moghol.⁵ Ketika Sultan Iskandar Muda mangkat dan Sultan Moghol telah resmi menduduki tahta kerajaan

Aceh, maka ia bergelar sebagai Sultan Iskandar Thani Aludin Mughayat Syah.

Sultan Iskandar Muda mangkat dengan tiba-tiba pada tanggal 27 Desember 1636. Mungkin kematiannya ini disebabkan karena kena racun yang diberikan oleh para wanita Makasar kepadanya atas perintah orang-orang Portugis. Hal ini dapat diketahui dari laporan Gubernur Jendral Kompeni Belanda di Batavia, yakni Antonio van Diemen, yang ditujukan kepada para penguasa Kompeni India Timur di negeri Belanda pada tanggal 9 Desember 1636. Dalam laporannya yang berhubungan dengan meninggalnya Sultan Iskandar Muda ia menulis antara lain:

*.... Niet buyten suspitie van vergift bij beleijt de (geseyde) Portugesen door vrouwen den Macasaersen Coninck en den Athinder tot vereenigh gesonden ...*⁶

Beberapa hari sebelum meninggal, Sultan Iskandar Muda telah memerintahkan kepada bawahannya menyingkirkan anak laki-laki yang merupakan putra satu-satunya, karena tindakan-tindakan si anak itu tidak disenangnya.⁷ R.A. Hoesien Djajadiningrat menyebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda menghukum puteranya, karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya dan juga baginda takut kalau-kalau terjadi pertumpuhan darah di Aceh bila ia meninggal.⁸ Mungkin hal ini ada hubungannya dengan penunjukkan Iskandar Thani sebagai pengganti Sultan Iskandar Muda.

Pada saat-saat terakhir Sultan Iskandar Muda berkuasa ia telah memerintahkan untuk membunuh orang-orang Portugis yang berada di kerajaannya.⁹ Hal ini dilakukan Sultan Iskandar Muda, mungkin karena rasa dongkolnya kepada orang-orang Portugis yang telah membuyarkan cita-citanya, ataupun sebagai balas dendam atas kekalahan angkatan perang Aceh di kota Malaka pada tahun 1629. Akibat dari peperangan itu angkatan perang Aceh menjadi lemah, terutama armada lautnya. Seperti telah disebutkan bahwa sebelum melakukan serangan secara besar-besaran terhadap Malaka Portugis, Aceh terlebih dahulu telah melakukan penaklukan-penaklukan kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung Melayu. Dalam hal ini meskipun angkatan perang Aceh secara gemilang dapat ditaklukan kerajaan-kerajaan itu, tetapi banyak juga tentara Aceh yang binasa.

Seperti disebutkan oleh P.J. Veth dalam bukunya *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland*, bahwa pada akhir masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh menjadi lemah dan kekurangan penduduk. Hal ini disebabkan karena banyak ekspansi dan peperangan yang dilakukannya,¹⁰ baik terhadap Portugis maupun terhadap kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung tanah Melayu.

CATATAN

- 1) Nuruddin ar-Raniry, *Bustanus Salatin*, disusun oleh T. Iskandar (Kuala Lumpur; Dewan bahasa dan Pustaka, 1966) hal. 36.
- 2) W. Linehan, "*History of Pahang*" JMBRAS, (Mei 1936) hal. 36.
- 3) Nuruddin ar Raniry, *loc.cit.*
- 4) R.H. Hoesein Djajadiningrat, "*Critisc Overzicht van de in Malaesche werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat Atjeh*", BKI 65, (1911), hal. 183.
- 5) *Ibid*
- 6) Lihat G.L. Tichelman "*Een Atjehsche Sarakata*", (Afschrift van een besluit van Sultan Iskandar Muda), TBG 73, (1933), hal. 368.
- 7) T. Iskandar, "*De Hikajat Atjeh*", VKI, 26, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1958), hal. 49.
- 8) R.A. Hoesein Djajadiningrat, *loc.cit.*
- 9) A.J.A. Gerlach, *Athin en De Athinezen*, (Thieme Arnhem D.A., 1873), hal. 41.
- 10) P.J. Veth, *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland*, (Leiden: Geraalth Kolff, 1887), hal 75.

BAB VI

SIMPULAN

Ada beberapa faktor yang memungkinkan kerajaan Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dapat mencapai puncak kejayaannya baik politik maupun ekonomis. Letak geografisnya yang strategis yakni di jalan lalu lintas perdagangan yang ramai pada waktu itu merupakan salah satu faktor. Banyaknya pedagang yang datang ke Aceh semenjak direbutnya kota Malaka dari Sultan Iskandar Muda oleh orang-orang Portugis pada tahun 1511, juga merupakan salah satu faktor. Adanya suatu aliansi antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Islam terkemuka pada waktu itu yakni kerajaan Turki, membawa pengaruh pula bagi perkembangan kerajaan Aceh. Sebagai sebuah kerajaan pantai, Aceh mempunyai armada laut yang kuat untuk dapat mengawasi perdagangan di daerah kekuasaannya. Dengan mendapat bantuan dari kerajaan Turki pada sekitar pertengahan abad 16, maka Aceh dapat membangun sebuah armada laut yang cukup kuat menurut ukuran masa itu.

Faktor-faktor yang penulis sebutkan diatas tentunya hanya sebagian saja dari sekian banyak faktor. Salah satu faktor lagi yang menurut penulis paling penting dan paling menentukan bagi perkembangan dan kejayaan Aceh pada waktu itu ialah, peranan pemimpin kerajaan Aceh, yakni Sultannya, yang penulis maksudkan ialah tindakan-tindakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh Sultan yang memerintah di kerajaan Aceh.

Sejak Aceh pertama kali muncul sebagai sebuah kerajaan, maka peranan dari pada Sultan yang pertama kali memerintahkan, sudah menentukan bagi perkembangan kerajaan. Begitu pulalah peranan dari pada Sultan-sultan yang memerintahkan di Aceh selanjutnya sampai kepada Sultan Iskandar Muda. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda dengan tindakan-tindakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankannya, mampu membawa Aceh ke puncak kejayaan. Dia berhasil memperluas daerah kekuasaannya, sehingga melanjutkan pekerjaan memperluas daerah kekuasaannya, sehingga melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis oleh Sultan-Sultan Aceh sebelumnya. Olehnya, semua kerajaan kecil di Sumatera bagian utara dan beberapa kota pelabuhan lada di pantai barat Sumatera dapat ditundukkan dibawah kekuasaannya, meskipun yang dikuasanya di sana hanya perdagangan saja. Begitu pula beberapa kerajaan di Semenanjung tanah Melayu berhasil ditaklukkannya. Tujuannya adalah agar kerajaan-kerajaan itu tidak dikuasai oleh bangsa asing yaitu Portugis.

Kegiatan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda tidak hanya penakluk-penaklukan, tetapi ia juga melakukan tindakan-tindakan dan menciptakan peraturan-peraturan bagi kerajaan Aceh. Sebagian besar tindakan dan peraturan ini, berhubungan dengan kepentingan ekonomi. Tindakannya pertama kali yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi ialah menolak untuk mensyahkan berlakunya suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh Sultan Aceh sebelumnya dengan pihak Belanda. Dalam hal ini Sultan Iskandar Muda menyadari akan adanya ketentuan-ketentuan yang akan didapat dengan datangnya pedagang-pedagang Eropa dan pedagang-pedagang asing lainnya sebagai pembeli lada Aceh. Perjanjian yang tidak disetujuinya itu isinya sangat menguntungkan pihak Belanda dan merugikan pihak Aceh. Itulah salah satu pihak Belanda dia menolak mensyahkan berlakunya perjanjian itu.

Dalam mengadakan hubungan dengan pedagang-pedagang asing, Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikap ramah kepada mereka. Sikap ini banyak menarik pedagang asing untuk datang berdagang ke Aceh. Olehnya ditetapkan para pedagang Eropa dapat berdagang di Aceh. Olehnya. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu

yang ditetapkannya. Misalnya kepada mereka diharuskan membayar pajak tempat tinggal dan bagi mereka yang ingin dagang langsung di daerah-daerah takluk Aceh harus mempunyai lisensi dagang yang dikeluarkan olehnya. Untuk mendapatkan lisensi dagang ini, para pedagang asing setiap lisensi yang dikeluarkan mereka harus memberikan hadiah-hadiah kepadanya. Selain itu kepada pedagang Eropa dilarang mendirikan kantor dagang di daerah-daerah takluk Aceh. Ini dimaksudkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan dalam pembelian lada disana dan juga supaya segala kegiatan perdagangan hanya berpusat di ibukota kerajaan Aceh saja.

Baik di Aceh sendiri, maupun di daerah-daerah takluknya Sultan Iskandar Muda mengadakan monopoli dalam perdagangan lada, kerana lada pada masa itu merupakan barang dagangan utama kerjaan Aceh. Kalau di Aceh dialah yang pertama kali membeli atau menawarkan lada dan dia menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan lada dengan membelinya dengan harga yang murah untuk kemudian dijual dengan harga yang tinggi kepada pedagang-pedagang asing, khususnya yang datang dari Eropa.

Untuk kepentingan ekonominya Sultan Iskandar Muda mengulangi kembali politik ekspansi seperti yang pernah dilakukan oleh Sultan Alaudin Riayat Syah al Kahhar pada sekitar pertengahan abad ke 16. Tujuan ekspansi yang ditujukan terhadap kota-kota pelabuhan di pantai perdagangan di sana, sedangkan ekspansi yang ditujukan atas kerajaan-kerajaan di semenanjung Melayu dimaksudkan untuk menghalang-halangi pihak Portugis mendapatkan lada dan menanam pengaruhnya di sana. Selain itu Sultan Iskandar Muda juga bermaksud untuk menambah penduduk kerajaan dengan mengangkut atau memindahkan sebagian penduduk dari kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu yang berhasil ditaklukkannya.

Dalam bidang pemerintahan Sultan Iskandar Muda menciptakan suatu bentuk kesatuan wilayah yang disebut Mukim. Pada mulanya tujuan pembentukan Mukim ini untuk kepentingan keagamaan, tetapi kemudian pula untuk kepentingan politik dan ekonomis. Politis untuk memudahkan ia dalam mengkoordinir tenaga-tenaga tempur bila terjadi peperangan, sedangkan ekonomis

untuk memudahkan pengutipan wasil-wasil (pajak-pajak) dari rakyat.

Tindakan Sultan Iskandar Muda lainnya yang juga bermotif ekonomi ialah melakukan peperangan terhadap orang-orang Portugis di Malaka. Tindakan ini sebenarnya pernah dilakukan oleh beberapa Sultan Aceh sebelumnya. Iskandar Muda, seperti juga Sultan-sultan Aceh sebelumnya, menganggap kedudukan Portugis di Malaka sebagai penghalang atau saingannya untuk menguasai hegemoni perdagangan di kawasan Selat Malaka. Maka berusaha mengusir Portugis dari Malaka dengan melakukan peperangan terhadap mereka.

Selain melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan ekonomi, Sultan Iskandar Muda juga membuat ketetapan-ketetapan tentang tata cara yang berlaku di Kerajaan Aceh. Kumpulan ketetapan ini kemudian disebut dengan nama *Adat Meukuta Alam*. Di antaranya terdapat berbagai tata cara yang berlaku di istana Aceh, peraturan-peraturan mengenai pemerintahan dan mengenai penggunaan cap stempel kerajaan Aceh yang disebut *cap siekureung* (cap sembilan).

Dengan tindakan-tindakan ini Sultan Iskandar Muda berhasil membawa kerajaan Aceh ke puncak kejayaannya. Dengan demikian tepatlah bila pemerintahan dan rakyat Indonesia telah menetapkan dalam deretan pahlawan-pahlawan Nasional.

DAFTAR BACAAN

- Al-Attas, Syed Muhammad Naguib. "Raniri And The Wujjudiyyah of 17th Century Aceh", *Monographs of the Blanch Royal Asiatic Society*, III, Singapore : Printed For The MBRAS by Malaysia Printers Limited, 1966.
- Braddell, T. "On the History of Acheen", JIAEA, vol. V Singapore, 1851.
- Cowan, H.K.J. *De Hikajat Malem Dagang*. 's-Gravenhage: Uitgegeven Door het Koninklijk Institut voor de Taal Landen Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, 1937.
- Dam, Peter van. *Beschrijvingen van de Oost Indische Compagnie* I. 's Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1931.
- Das Guta, Arun Kumar. "Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1614". Undpublished Ph. D. Thesis, Cornell University, 1962.
- Djajadiningrat. R.A. Hoesein. *Athehsch - Nederlandsch Woordboek Met Nederland - Atjehsch Register* door G.W.J. Drewes, I-II. Batavia Lansdrukkerij, 1934.
- "Crictisch Overicht van Geshiedenis van het Soeltanaat van Atheh", *BKI* 65 (1911), hal. 135-265.
- "De Sticthing van het "Goenoengan" gehetan Monument te Kutaradja", *TBG* 57 (1916), hal. 561-567.
- Gerlach, A.J.A. *Atjih en de Athenezen*. Armhem : Thieme D. A. 1873.

- "Leestafel" H. Yule, "On Northern Sumatera and Especially Acheen", *BKI* VIII (1873), hal. 69-78.
- Gibson Hilla, C.A. "On The Alleged death of Sultan Alaudin of Djohor at Atjeh in 1913", *JMBRAS*, vol. XXIX. Part. 1956.
- "Raffles, Acheh and the Order of The Golden Sword" *JMBRAS*, vol Part I. 1956.
- Harrison, Brian *South-East Asia A Short History*. London: Macmillan & Co. Ltd. 1957.
- Iskandar, Teuku. (ed) *Bustanus Salatin*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1966.
- Iskandar, Teuku. : "De Hikajat Atjeh", *VKI* 26. 1958.
- Jacobs, Julius. *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh* Leiden: E. I. Brill., 1894.
- Jonge, J.K. *De Opkomst van het Nederlandsh Gezag in Oost Indie* II-III, Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1864.
- Jogejans. J. *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*. Bearn: Holandia Drukkerij, tanpa angka tahun.
- Juynboll Th. Wl "Atjeh. *The Encyclopedia of Islam*, Vola. I, 1960.
- Kreemer, J. *Atjeh* I. Leiden: E.J. Brill. 1923.
- Kroeskamp, H. *De Weskust en Minangkabau*. Utrecht: Schotanus & Jens, 1931.
- Langen, K.F.H. van. "De Inriching van Het Athesche Staatsberstuur Order het Sultanaat", *BIK* 37, (888), hal. 381-470.
- Langhout, J. *Economische Staatkunde in Atjeh*. Den Haag: W . P. van Stockum & Zoom, 1923.
- Leur, J. C. van. *Indonesian Trade and Society*. Bandung: Sumur Bandung, 1951.
- Lenehan. W. "History of Pahang", *JMBRAS* (1936), hal. 1-256.
- Lombard, Danys, *Kerajaan Aceh*, Jakarta Balai Pustaka, 1986. terjemahan Winarsih Arifin.
- Mansur. M.D. et.al. *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bharata, 1970.

- Mohammad Said, *Atjeh Spenjang Abad*. Medan : Diterbitkan oleh Pengarang sendiri, 1961.
- "Wadjah Rakyat Atjeh Dalam Lintasan Sedjarah", paper pada *Seminar Kebudayaan Dalam Rangka PKA II dan dies Natalis ke XI Universitas Syiah Kuala*. Banda Aceh: Panitia Pusat Pkean Kebudayaan Atjeh ke II, 1972.
- Mukti Ali, A *An Introduction to The Goverment of Acheh's Sultanate*. Yogyakarta: Nida, 1970.
- Nugroho Susanto. *Sedjarah Dan Hankam* Djakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Sedjarah Hankam, 1968.
- Rouffaer, G.P. "De Hindoestansche Oorprong van het "Negenvoudig Sultan Zegel van Atjeh", *BKI* 59, (1990), hal. 349-384.
- Ryan, N.J. *Sedjarah Semenanjung Tanah Melayu*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.
- Schrike, B.J.O. *Indonesia Sociological Studies*. I. Bandung: Sumur Bandung; 1960.
- Seligman, R.A. Edwin. *The Economic Interpretation of History*. New York an London: Columbia University Press, 1961.
- Snouck Hurgrnje, C. *De Atjers* I. Leiden: E.J. Brill, 1993.
- Taufik Abdullah, *Sejarawan Dan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1974.
- Tolson, G.P. "Acheh Commonly Called Acheen", *JSBRAS* V. Singapore: 19880, hal 37-50.
- Tichelman, G.L. "Een Atjehsche Sarakata". Afshriff van een besluit van Sultan Iskandar Muda), *TBG* 73 (1933), hal. 368-373.
- "Tjakara Donja". *De Indische Gids* 61, (1938), hal. 23-27.
- Tiele, P.A. "De Europeers in de Malaecsche Arhipel", *BKI* 29 (1881), 35. (1886), 36 (1887), 37 (1888).
- "Tanslation of The Annal of Acheen", *JIAEA*, vol V. (1851).
- Veltman, T.J. "Nota Over de Geshiedenis van het Lanschap Pidie", *TBG* 58 (1919), hal. 15-157.

- Veth, P.J. *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland* Leiden: Geraeth Kolff, 18887.
- Vlekke, H. H. M. Bernard. *Nusantara A Histori of Indonesia* 's-Gravenhage N.V. Uitverij W. Hoeve, 1959.
- Winsted, R.O. *A History of Malaya*. Kuala Lumpur, Singapore: Masican & Sons, 1968.
- "Notes on The History of Kedah", *JMBRAS*, vol XIV part III, Singapore: Desember, 1936, hal, 155-189.

Sumber-sumber Aceh

- Adat Meukuta Alam* Sultan Iskandar Muda, telah diterbitkan oleh K.F.H. van Langen, *BKI* 37, (1888), hal. 436-442.
- Dua buah manuskrip yang masing-masing memuat tentang susunan pemerintahan kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Dan tentang kelahiran Sultan Iskandar Muda, Manuskrip ini disimpan di University Kebangsaan Malaysia dan belum dikatalogkan.
- Naskah, "Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda:, karya Di Mulek, Naskah dini dimiliki oleh Teuku Muhammad Junus Jamil Kampung Alui, Banda Aceh. Disimpan di Musium Ali Hasjimy.



خدايه انچه را به عاقله عليه كه مكرمين و اخيه و داناين توجه بلس هاردين و الا اول يوم الحج
بعد من كره و خدا زمان قدر كه سر سلطنت اسكندر روي اجوهن بره و له قتل له في العالم
تلكا ايت اخاه تعالون في بركة شفاعه بياكيت جيمه رسول الله عليه وسلامه و ان غايه عجرة
سكنا انبيا في فلسطين و ان غايه بركه كرميه عصايت بفاقت و ان غايه بركه سلطنته العارفين
سنة سنة محمد الدين عبد القادر جيه اني و ان غايه بركه سكره قطب الرحاني و رمرت الصلوات في ان و ان
بركه سكره باسلا و ليا و الله تعالون العليدين من من و ان الارض الصايعا و ان غايه بركه عاقله و لا مريم
سكنا و ان غايه بركه افوه و مروه و سيد الكمال و ان غايه و سر سلطنت اسكندر روي اجوهن بره و
ظلاله و ان غايه بركه سلطنته سحابه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
سنة بر فتيكه و ان غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
و ان غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
يبد باي و سر سكره ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
سور و ان غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
تايد و ان غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
نوا سكره ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
سركه و ان غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
انيد بر فتيكه و سر سكره ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
انم موكم غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت غايه بركه ايت
كلام ايدي

Dari G.L. Tichelman, "Een Atjesche Sarakata" (Afschrift van een besluit van Sultan Iskandar Muda) *TBG* 73, (1933), hal. 370-371.

Lampiran 2



Derham (Mata uang emas) Kerajaan Aceh masa Sultan Iskandar Muda yang sudah dibesarkan 6,23 kali dari aslinya.

Derham ini berdiameter 13mm.

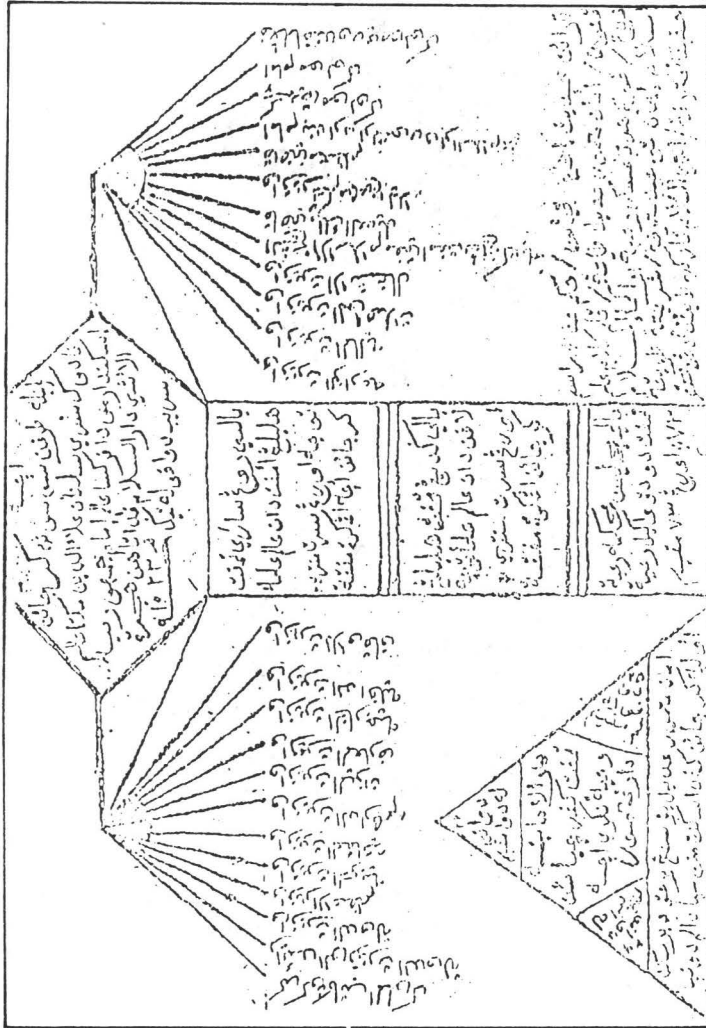
Berat 0,6 gram

Kadar emas 22 karat

Depan bertulisan Sultan Iskandar Muda.

Belakang bertulisan Johan berdaulat Fi'alam.

Lampiran 3



Masukrip uang memuat susunan Pemerintahan Kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda.
Manuskrip ini milik University Kebangsaan Malaysia yang belum dikatalogkan.

Lampiran 4

ADAT MEUKUTA ALAM SULTAN ISKANDAR MUDA ¹

**PERATOERAN DI DALAM NEGERI ATJEH
BANDAR DARAS - SALAM DI SALIN DERI
PADA DAFTAR PADUE KASRI SULTAN MAKOTA
ALAM ISKANDAR MOEDA**

1. Jikalau siapa juga yang hendak di angkat jadi Panglima sagi atau hulubalang dalam segi di mana tempat yang biasa dalam tiga segi Aceh atau di takluk jajahannya maka adalah ahli waris hulubalang yang meninggal itu mupakat dengan' segala orang-orang tuuaha-tuha yang berakal pada tempat itu seperti kecihik wakil dan imam serta ulama mesyurat.
2. Jikalau sudah tetap dapat dalam ahli warisnya maka berkenduri berkumpul segala hulubalang yang hampir padanya di angkat serta di taroh gelarnya sudah mau tamat.
3. Maka di bawah menghadap raja serta membawa satu dalung terisi didalamnya dengan persembahan tetapi di tilik hal keadaan hulubalang itu jikalau panglima sagi atau orang kaya sri Maharaja Lela hulubalang anam atau yang sama derajatnya hulu balang dua belas atau yang sama derajatnya.
4. Dipersembahkan kebawah duli hadlerat paduka Sri Sultan di atau balai Baitul-Rahman menyambut serta memberi peraturan yang biasa adat yang melazamah dalam negeri Aceh bandar Dar-as-salam dengan memberi kehormatan.

5. Panglima sagi atau orangkaya sri Maharaja Lela di pasang meriam 21 kali Hulubalang dalam sagi atau yang sama derajatnya di pang meriam 12 kali. Adapun Sri Maharaja Indra Laksamana dan Raja Uda na Lela di pasang meriam 9 kali. Adapun hulubalang anam Bintara 1 Dikutip dari K. F. H van Langen, "De Inrichting van het Atjehche Staatsbestuur onder het Sultanaat", BKI 37 (1988), hal. 436-442. Gighen sendiri di pang meriam 9 kali yang lagi lima di pasang meriam 5 kali. Adapun hulubalang dua belas atau sama derajatnya di pasang meriam 7 kali.
6. Adapun panglima sagi atau hulubalang dalam sagi tiada memakai cap halilintar karena ia menerima pusaka ahli warisannya boleh bertanya melainkan lain jabatan di kurniakan oleh raja maka ia memakai cap halilintar.
7. Adapun hulubalang di dalam ta'aluk jajahannya atau didalam tanggungan sultan memakai cap halilintar seperti tersebut di bawah ini kami beri tahu kepada sekalian hulubalang, datu, iman, kejuruan, panglima, kecihik, wakil dan segala pertuha kecil besar tua dan muda rakyat sekalian.

Maka adalah seperti panglima di ta'luk jajahannya sudah kami memberi jabatan hulubalang kurnia Allah dan rasul kemudian menjadi wakil kami menggantikan pekerjaan inilah yang perbuat pekerjaan kami di dalam negeri pertama mengambil hasil kami dan perintah berniaga laut dan dataran yang telah ada menerimanya dan akan kami pun hendaklah di bawahnya segenap tahun lepas berniaga negeri pertama di perbuat jalan segala hamba Allah berjalan dan di perbuat mesjid yang runtus atau yang belum ada dahulunya patut di perbuat hendaklah memperbuatkan dan wawiah dan madrasah dan serta hendaklah di suruh sembahyang jumat dan sembahyang jumat mengeluarkan zakat dan fitrah dan hendaklah pelihara akan negeri dengan keadilan mengikut Islami dan hendaklah jangan disukakan pada perbuatan haru-hara matsiat dan durhaka dan jikalau di maka atasilah durhakannya ia dari pada pekerjaan jabatannya serta gugurlah sendirinya maka jangan lah kamu mengikut jua adanya.

8. Hulubalang raja bersama hulubalangnya Rama Setia yang berjaga di balai kota daral-duanya yang di titahkan oleh raja periksa dalam kampung mungkin sagi dan ta'luk jajahannya melihat hal keadaan peraturan dalam adat negeri.
9. Jikalau hulubalang itu dapat celaka mati teraniaya pada suatu kampung mukim sagi atau negeri maka raja bertitah menyuruh orang kaya sri Maharaja Lela atau wakilnya dengan membawa alat senjata pergi periksa serta meminta orang jahat itu kepada hulubalang mukim itu atau sagi telah wajiblah mencari orang jahat itu melawan di bunuh tiada melawan di tangkap.
10. Satu orang hamba raja mati tujuh orang gantinya di ambil dari para ahli waris orang yang jahat itu di putuskan melainkan berpindah ahli warisnya kepada raja buat apa yang suka.
11. Hulubalang mukim itu atau sagi tiada suka mencari orang jahat itu karena ahli warisannya atau sebab lain maka hulubalang itu jatuh kepada kesalahannya kena denda atas kadarnya dari lima ratus real sampai lima ribu real.
12. Hulubalang mukim itu atau sagi tersangkal tiada menurut hukuman itu maka raja memanggil Tungkuh cibik Sri Muda Pehalawan raja negeri Merdu menyuruh pukul hulubalang mukim itu atau sagi dengan di perangai dan di usir segala pohon tanaman di potong sumur di tubuh harta di rampas rumah-rumah di bakar habis.
13. Hamba raja sa orang atau banyak tiada bersama dengan hulubalangnya di suruh oleh raja memanggil orang atau pergi mengambil harta dimana dia berenti atau bermalam hendaklah ia memberi tahu dan mendapatkan kepala kampung di tempat itu seperti kecihik atau iman wajiblah memelihara hamba raja itu atas kadarnya supaya jangan di binasaa oleh orang jahat.
14. Jikalau hamba raja itu binasa dalam kampung atau mukim mati atau lua raja mencentut belanja hamba itu kepada hulubalang mukim itu seperti yang telah tersebut dalam pasal 9, 10, 11, 12.
15. Hamba raja yang disuruh sampai pada suatu kampung yang kecil sedikit orangnya lagi jauh dari pada kampung orang banyak tiba-tiba binasa di tempat itu mati atau luka jikalau

orang kampung itu tiada campur atau tiada terlawan sebab banyak orang jahat maka di suruh bersumpah dan buat jadi saksi dan menurut hulubalang yang punya pemerintahan serta Rama Setia mencari orang jahat itu jikalau sudah nyata orang jahat itu sudah lari keluar dari tiga segi negeri Aceh atau orang luaran yang jahat itu maka adalah raja bersabdalah memberi perintah kepada panglima sagi dan hulubalang dalam sagi tiada boleh orang durhaka itu berbalik masuk kedalam tiga sagi negeri Aceh melainkan dibunuh hukumnya jikalau ada ahli warisannya di denda atas kadarnya mengikut apa suka raja saja.

16. Jikalau ada panglima sagi atau hulubalang dalam sagi negeri Aceh sembunyikan orang jahat atau tiada di kuatirkannya ada di dialam kampung mukim merentahnya tiada peduli menjaga negeri kiranya sampai kabar keterangannya kepada raja menyuruh orang kaya Sri Maharaja Lela atau wakilnya minta kepada hulubalang yang sembonikan orang jahat itu supaya di tangkapnya dan jatuh kepada hulubalang itu kesalahan di denda dari lima ratus rejal sampai lima ribu rejal.
17. Jikalau ada orang jahat dari pada bangsa Aceh atau lain bangsa lari dari pada satu mukim kepada lain mukim atau sagi di dalam tiga segi Aceh atau takluk jajahannya maka sekian hulubalang tiada boleh terima duduk di dalam pemerintahannya masing-masing melainkan ditangkap dan boleh dia menghukumkan sendiri dengan adat yang kelazaman dalam negeri aceh jangka keadilan menurut hukum Allah dan rosul atas kesalahannya tiada lagi di bawa menghadap raja melainkan memberi tahu saja kepada raja perbuatannya yang telah di perlakukannya.
18. Adapun orang luaran yang Islam lain dari pada bangsa orang Aceh seperti orang Arab, Banggali, Klieng, Melayu dan Jawa atau seumpamanya masuk kedalam negeri Aceh bandar daras-salam pekerjaannya berniaga tetapi ketika dia baru datang ada menghantarkan persembahan kepada raja supaya boleh kenal dengan raja.
19. Jikalau dia pergi jualan di mana tempat juga pun dalam tiga sagi negeri Aceh tiba-tiba datang celaka di bunuh orang

teraniaya mati atau luka atau di rampas hartanya maka adalah raja menuntut belanja seperti tersebut dalam pasal 9, 10,11 dan 12.

20. Jikalau orang luaran datang menuntut ilmu kedalam tiga sagi negeri Acehuduknya dalam masjid atau zawiah atau madrasah kiranya dapat celaka kena teraniaya sampai mati maka hulubalang yang punya tempat pemerintahan jadi ahli warisnya akan menuntut bela yang mati dan menyempurnakan kematiannya dengan kenduri atas kadarnya tiada raja campur atas hal ini sebab diada mengadap raja melainkan mengikut peraturan hulubalang di tempat itu tetapi wajiblah hulubalang itu memberi tahu saja kepada raja.
21. Jikalau orang luaran yang lain agama dari pada agama Islam yang lain pada orang hindi tiada boleh di terima oleh orang negeri tinggal duduk di dalam kampungnya melainkan di suruh balik ke laut kedalam tempatnya.
22. Jikalau orang lain agama itu hendak tinggal juga duduk di darat kedalam kampung orang islam kalau dapat celaka mati atau luka atau kena rampas hartanya dalam kampung itu tempat dia bermalam sama ada orang dalam kampung itu yang buat aniaya atau lain orang jahat kalau mati saja luka luka saja kalau dirampas hartanya habis saja tiada diterima pengaduannya oleh raja atau hulubalang sebab dari pada taksirnya sendiri punya salah.
23. Adapun orang yang menerima pada orang yang lain agama itu tinggal duduk bermalam pada kampungnya contoh kesalahan kepada ulama kena kafarat denda kenduri memberi makan sidang jumat.
24. Jikalau orang yang kena kafarat itu tiada menurut peraturan ulama boleh mengadu kepada hulubalang yang punya pemerintahan di tempat itu menghukumkan menurut timbangan kesukaannya yang adil.
25. Adapun rakyat Islam dalam segi atau mukim yang pergi kepada lain segi atau mukim pekerjaannya berniaga atau menuntut ilmu kiranya datang celaka di bunuh orang dengan teraniaya atau dirampas hartanya maka ahli waris orang yang teraniaya itu minta pertimbangan dan pertolongan kepada hulubalang dia

- sendiri itu berbicara kepada hulubalang tempat orang aniaya itu mesupat dan menyurat dengan segala patuha dan ulama supaya di bayar diat yang mati atau ganti harta yang kena rampas.
26. Adapun bangun orang yang merdhika dengan seratus onta di bayar kepada ahli waris orang yang mati demikianlah banyak bangun orang yang merdhika.
 27. Jikalau sudah di bayar bangun yang mati kepada ahli warisnya tiada boleh di bunuh orang yang aniaya itu tarena taubat dan berdamai.
 28. Jikalau ahli waris yang mati tiada suka terima diat atau hendak di bunuh juga yang aniaya.
 29. Maka kedua belah hulubalang itu wajib memperkenankan permintaan ahli waris yang mati.
 30. Jikalau hulubalang sebelah orang yang aniaya tiada suka beri bunuh yang aniaya itu sebab ahli warisnya dia hendak bayar juga bangun maka hulubalang orang yang mati titah wajib membawa ahli waris yang mati maka telah wajiblah raja menyelesaikannya.
 31. Maka yang berkhusumat dua hulubalang serta dua belah ahli waris yang tersebut telah wajib menurut timbangan raja dengan ualama menurut hukum Allah dan rosul.
 32. Adapaun bangun pagi mengikut harganya dengan aras.
 33. Dari harta yang rampas telah diwajibkan hulubalang tempat orang yang aniaya itu menjatuhkan hukuman kepada orang yang menyamun itu serta dengan ahli warisnya memulangkan harta yang di ambilnya atau digantinya.
 34. Yang merampas itu telah lari keluar dari dalam tiga segi Aceh maka tiada boleh berbalik kedalam tidga segi negeri Aceh.
 35. Jikalau yang merampas berbalik kedalam tiga segi negeri Aceh maka wajib hulubalang menangkap dan memotong tangannya.
 36. Maka yang merampas ketika hendak di tangkap dia melawan sah di bunuh.
 37. Raja tiada mencampur atas ini hal rampas dan rebut dalam segi atau mukim melainkan menurut timbangan musapat segala pertuha serta ulama suarat dengan hulubalang memberi keputusannya.

38. Jikalau ada satu kumpulan atau banyak orang yang berniat hendak membuat kejahatan kepada raja atau hendak membuat huru hara dalam kampung dan mukim atau segi jikalau di ketahui oleh satu orang atau banyak telah wajiblah atas orang melihat kumpulan itu memberi tahu dengan segera kepada hulubalangnya.
39. Hulubalang itu telah wajiblah dengan segalanya pergi periksa kumpulan itu, serta di undurkan supaya jangan jadi perbuatan yang kejahatan.
40. Seorang rakyat atau banyak sudah tahu melihat suatu kumpulan orang jahat berniat kejahatan tiada kumpulan itu ytelah berangkat dendak menjalankan kejahatan maka dapat khabar keterangannya oleh hulubalang yang punya pemerintahan satu kumpulan telah berangka hendak membuat kejahatan tetapi dia punya rakyat sianu atau kecihik ada melihat kumpulan itu tiada memberi tahu kepada hulubalangnya yang mendapat tahu sendiri maka contoh kesalahan kepada rakyat itu saja tetapi dengan musapat dan menyurat dengan segala pertuha serta ulama menilik keadannya.
41. Jikalau kumpulan itu hendak melakukan kejahatannya tiada peduli nasiat hulubalang yang menyurat kepunya maka wajiblah atas hulubalang itu pukul dengan perang kumpulan itu hingga habis binasa yang melawan di bunuh tiada melawan di tangkap dan diserahkan kepada raja di punya suka saja memperbuatkan.
42. Siapa juga hulubalang dalam segi atau panglima segi telah mengetahui ada kumpulan orang yang berniat kejahatan kepada raja telah musapat dan mnyurat dalam pemerintahannya tiada di kkuatirkan kiranya mendapat khabar keterangan oleh raja ia menyuruh orang kaya sri Maharaja Lela atau wakilnya pergi periksa hal itu.
43. Jikalau perbuatan kumpulan itu belum jadi sekali pun jatuh kesalahan kepada hulubalang itu subahat tetapi di timbang dan dipikir oleh raja dengan kedilan memelihara rakyatnya.
44. Adapun panglima segi kuasa menjatuhkan hukuman kepada rakyat yang bersalahan dalam dia punya segi lagi dari pada

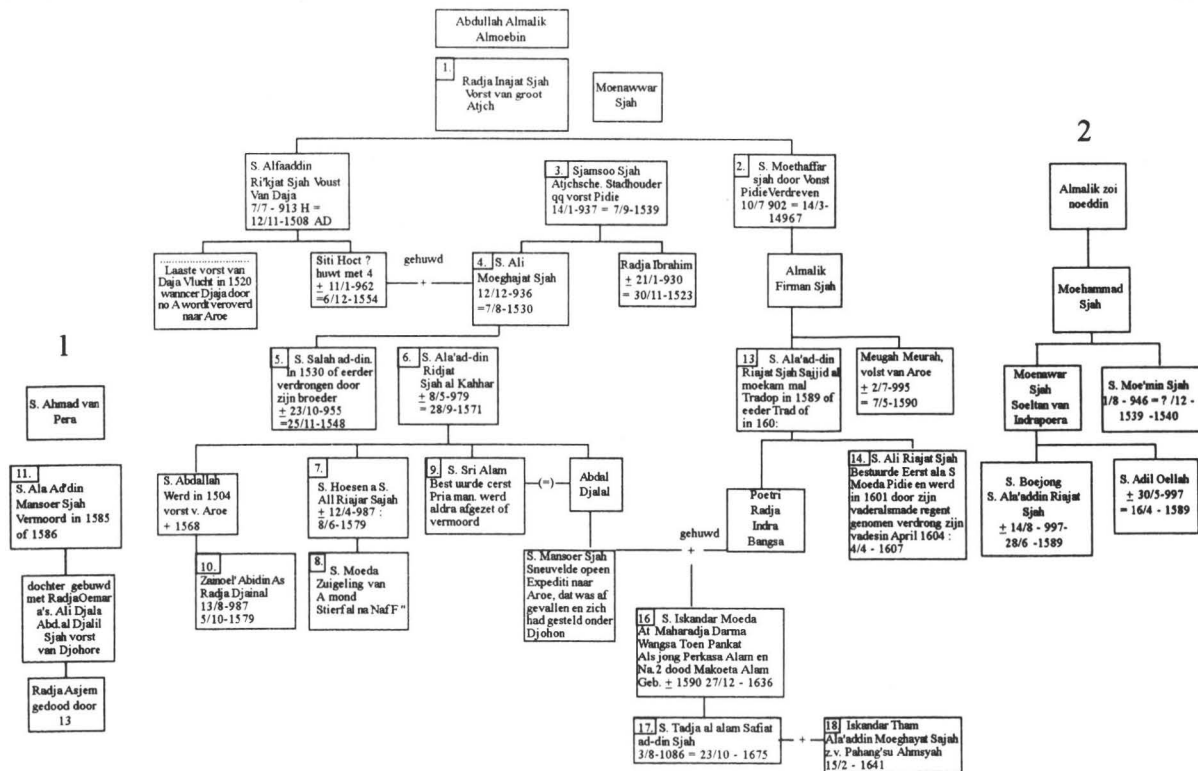
hamba raja atau segi yang lain tetapi wajib memberi tahu kepada raja perbuatan yang sudah di perlakukan.

45. Panglima segi tiada kuasa menjatuhkan hukuman hamba raja yang berbuat salah dalam seginya melainkan di tangkap di serahkan kepada raja buat apa dia punya suka.
46. Hamba raja itu ketika hendak di tangkap ditanya melawan harus di bunuh saja tetapi wajib memberi tahu kepada raja adanya.

Lampiran 5



Genealogisch Overzicht der Atjehsche Soeltans tot 1675



Lampiran 7

**ACCORDT GEMAECKT TUSCHEN DEN VICE-ADMIRAEEL
 OLIVIER VAN DE VIVERE, UYT DEN NAME EN DE VAN
 WEGEN DE ED. MOG HEEREN STATEN GENERAL DER
 VEREENIGHDE NEDERLANDEN TER EEURE ENDE DEN
 DOORLUGHTIGEN CORNICK VAN ATCHIN TER ANDERE SYDE,
 DESEN 17 DEN JANUARI VAN 'T JAER ONSES HEREN,
 JESU CHRISTY 1607 IN DE STADT ATCHIN. I**

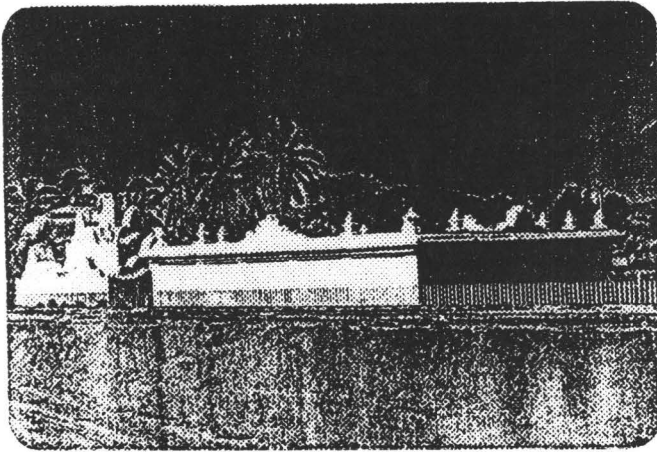
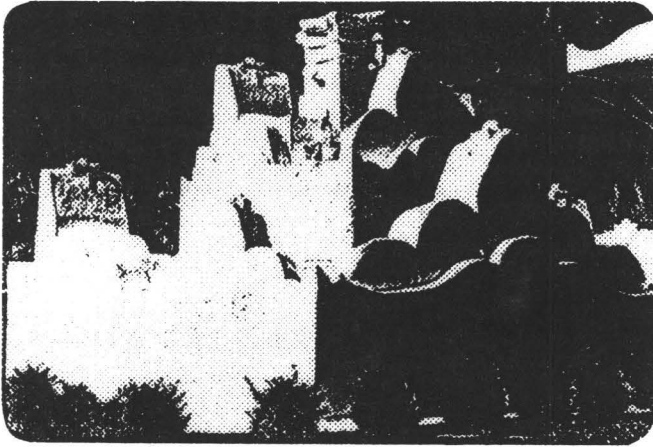
1. In den eersten, alsoo nooding in dat heeren staten voor hare capiteynen tot bewordering van degotie van desel ve in oost Indie eene verzekerde en de vaste plaetse hebben, om hare goederen, koopmanschappen en de aumuntie voor oorloge, als goschut, roers, harnassen, Spiesan, Kruidt, loodt, lonten, kabels, alderhande touwerch, balchen, planchen, arpuys, teer, peck en de andersins te verzamelen en de huysgezinmen te mogen bregen uyt haer landt, zal zyne maje-steyst geven alsulcke plaettse als zy zullen begeeren, tzn mejsteys wesende, soogroot offte cleyn als de heeren staten affte syne capiteynen sall goetdencken.
2. Alle coopmanschappen komende met vreemde natiën in dese plaetse onder het gebiedt van zyne mejstyt, alsoock deselve binnen de landen van zyne majesteyst valende zullen de vasalen van de heeren staten vrystaen deselde te mogan koopen neffens andere, zondar dat eenige vromdeling, hetselve sullen mogan verbieden onder't deck sel van zyner maysts. last, weermade syne majesteyst en de d'onse bedrogen worden en de het vervreemding onder de natie mackt.

3. Sullen de vasalen van de heeren staten voorsz hare schepen en de goerderen tzy van wat paltsen, day sy komen sok wederom vorsonden, mogan disponeren, sonder datsyne mejes teyt daera gets op sall te seggen hebben, nogh eenige toll daeraff te nomen, nogh nyt in.
4. Sall ook syne mejesteyt niet tulaten datter eenige Honlanders, Europische vollkeren offte nae (aen?) komelingen in eenige van zyne landen sullen mogen handelen offte sullen bescheydt van onsen Koningh moetan brengen en de hetzelve niet hebbende sullen als vyanden gehouden en vervolght worden.
5. Sullende voors staten ook vermogen in alle des Konings landen hont te healen en te howen tot bouwigh van de schepen en de nooddrufigheyte van heare woonlaets.
6. Soal oock geen van de bayde partyen pays maeken met den Koningh van Spaengian zonder breeder consent.
7. Soo wie eenige schandalan in eenighe religionssaeken geeft, die sall aengklaeght en de gestraft worden by syne overkeyt, daer hy onder sorteert, soowell van d' eene als van d' andre syde.
8. Soo eenide persooone van 'd een en d'ander parten yets op anderen hadden te seggen van schuldt en weder schuldt, 'tzy door loonen offte coopmanschappen, hoo het zonde gescheden zall de Koningh geouden wesen ten eersten versaeck van den aenk lager recht tedun.
9. Soo daer ymandt van d'onse om eenigh quaedt rumur by zyne majesteyt hulpe versaght tzy met loochenen van syn geloove offte andersins, om syn quadt leven te bedecken, zal zyne mejsteyt hun niet aeuhouden, naer geven henter bewaringh van de onse, om ter gelegener tyt zulcken straffe daerover to doen, datter een ander, exampel aen sall nemen.
10. Hieren tegen sullen de Heeren staten zyne majesteyt helpen met alle meght maer uytersten vermohgen on de Potogesen en

Spangiarerden haren bey vyanden alle moghelyche affibrenck to doen, en de soo ymandt van de Portugesen en de Spangiaerden, zall 'dandere partye niet gehouden wesen deselve te assisteren dan allenlyck in defensie.

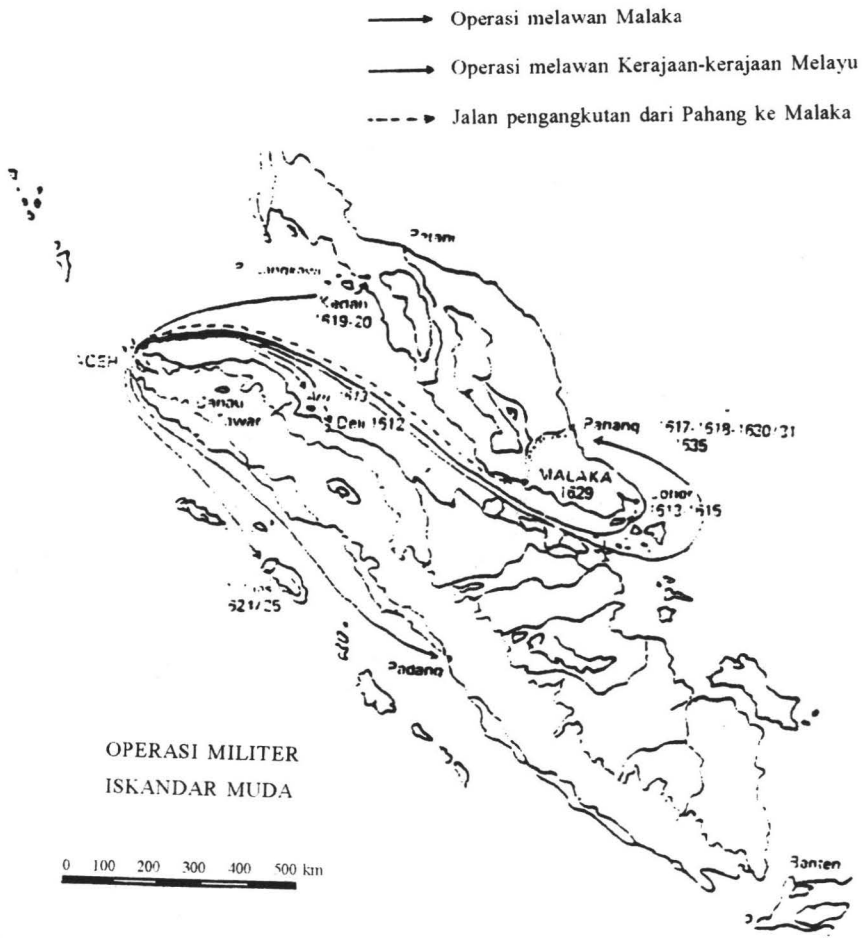
11. Syne majeteyt eenige wapenen uyt onse landen van doen hebbende, hoe die sondan mogen wesen, sullen deselve brenghen mits dat s. Mayt. ons daer gelth afte waeran voor zall geven, voor sooveel deselve in ons landst konsten.

Lampiran 8

**"GUNUNGAN" dan "KANDANG"**

Menurut tradisi bangunan ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lihat, Hoesein Djajadiningrat "De Stichting Van het "Goenoengan" Gehetan Monument te Koetaraja", *TBG* 57 (1916), hal. 561-576.

Lampiran 9



Sumber. Denys Lombard, **Kerajaan Aceh**, Jakarta, Balai Pustaka, 1886, hal 375

Lampiran 10



Sumber. Denys Lombard, **Kerajaan Aceh**, Jakarta, Balai Pustaka, 1886, hal 376

Perpustakaan
Jenderal